Buku Referensi

INDEKS PARTISIPASI PEMILU

DAN TANTANGAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Trasmianto, S.H.

BUKU REFERENSI

INDEKS PARTISIPASI PEMILU

DAN TANTANGAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Trasmianto, S.H.

MPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

INDEKS PARTISIPASI PEMILU DAN TANTANGAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Ditulis oleh:

Trasmianto, S.H.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-7305-52-7
IV + 165 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Juli 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

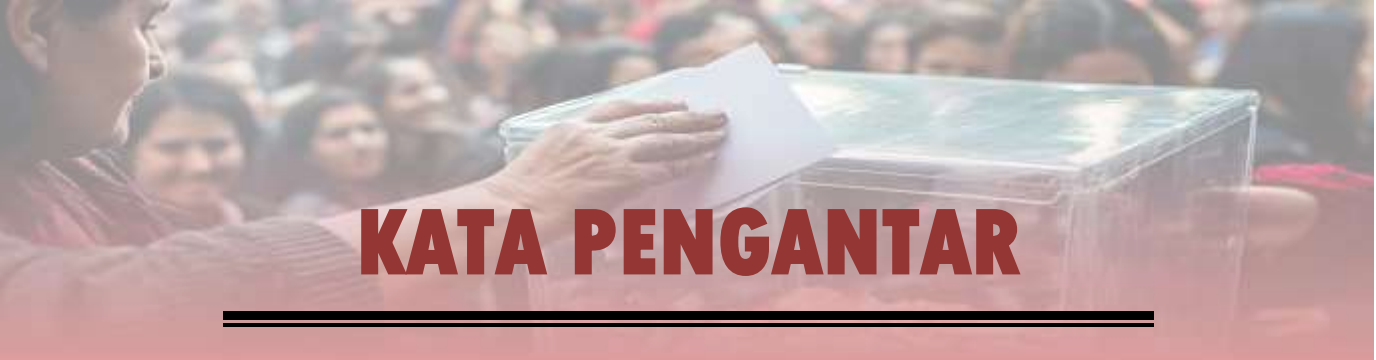

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
H. Agustiar Sabran, S.Ikom

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia" karya Trasmianto, S.H., Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, dapat hadir dan diterbitkan dengan baik.

Sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, saya menyambut dengan penuh apresiasi kehadiran buku ini, yang menjadi bagian penting dari upaya mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah dan di Indonesia pada umumnya. Buku ini tidak hanya menyajikan analisis mengenai tingkat partisipasi pemilu sebagai indikator kesehatan demokrasi, tetapi juga menguraikan tantangan-tantangan fundamental yang dihadapi bangsa dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu fokus utamanya adalah penguatan sumber daya manusia melalui Pendidikan inklusif termasuk di dalamnya adalah Pendidikan politik yang sesuai dengan kaidah ***Belom Bahadat*** yaitu kaidah hidup masyarakat suku Dayak yang mengedapankan norma hukum, tata krama dan sopan santun.

Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan karakter dan kesadaran warga negara terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi dengan mengedepankan *spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan sebagai salah satu instrumen edukatif yang mendukung misi tersebut.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga tidak hanya bagi kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi generasi muda, aparatur pemerintahan, serta seluruh Masyarakat

khususnya di Kalimantan Tengah dalam rangka menyambut Indonesia Emas Tahun 2045, Dengan buku ini saya juga berharap agar Masyarakat lebih mampu memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan memperluas literasi politik, kita turut membangun demokrasi yang lebih kuat dan bermartabat di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila yang kita cintai ini menuju Kalteng berkah, Kalteng maju dan Kalteng yang bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Saudara Trasmianto, S.H. atas kontribusinya dalam dunia literasi dan pendidikan politik. Semoga karya ini memberi manfaat luas dan menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemikiran kritis dan konstruktif dari putra-putri terbaik daerah.

Palangka Raya, 1 Juli 2025
Gubernur Kalimantan Tengah

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Ikom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Pentingnya Partisipasi Pemilu 1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Buku 5
C. Metodologi Penulisan dan Pendekatan Kajian 8

BAB II KONSEP DASAR PARTISIPASI POLITIK DAN DEMOKRASI 13
A. Pengertian Partisipasi Politik 13
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 17
C. Konsep Demokrasi dan Indikator Keberhasilannya 22
D. Kaitan antara Partisipasi dan Kualitas Demokrasi 27

BAB III SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA 31
A. Pemilu era Orde Lama dan Orde Baru 32
B. Reformasi dan Perubahan Sistem Pemilu 36
C. Tren Partisipasi Pemilu dari Masa Ke Masa 40

BAB IV INDEKS PARTISIPASI PEMILU DI INDONESIA 47
A. Definisi dan Indikator Indeks Partisipasi 48
B. Data Partisipasi Pemilu Legislatif dan Presiden 52
C. Perbandingan antar Daerah dan Antar Pemilu 57
D. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi/Rendahnya Indeks Partisipasi 61

BAB V ANALISIS FAKTOR PENENTU PARTISIPASI PEMILU 67

A. Pendidikan Politik Masyarakat 68
B. Peran Media dan Teknologi Informasi 74
C. Pengaruh Ekonomi dan Sosial Budaya 80
D. Kepercayaan terhadap Lembaga Demokrasi 86

BAB VI TANTANGAN DEMOKRASI DI MASA DEPAN 95
A. Politik Uang dan Oligarki 96
B. Polarisasi Politik dan Disinformasi 99
C. Menurunnya Kepercayaan Publik 103
D. Tantangan Generasi Muda dalam Demokrasi Digital 108

BAB VII STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KUALITAS DEMOKRASI 115
A. Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik 116
B. Reformasi Sistem Pemilu dan Transparansi 126
C. Penguatan Partai Politik dan Lembaga Pengawas 129
D. Mendorong Partisipasi Generasi Muda dan Kelompok Marginal 136
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 143
A. Ringkasan Temuan Penting 143
B. Implikasi Kebijakan 145
C. Rekomendasi untuk Pemerintah, KPU, dan Masyarakat Sipil 148

DAFTAR PUSTAKA 153
GLOSARIUM 161
INDEKS 163
BIOGRAFI PENULIS 167

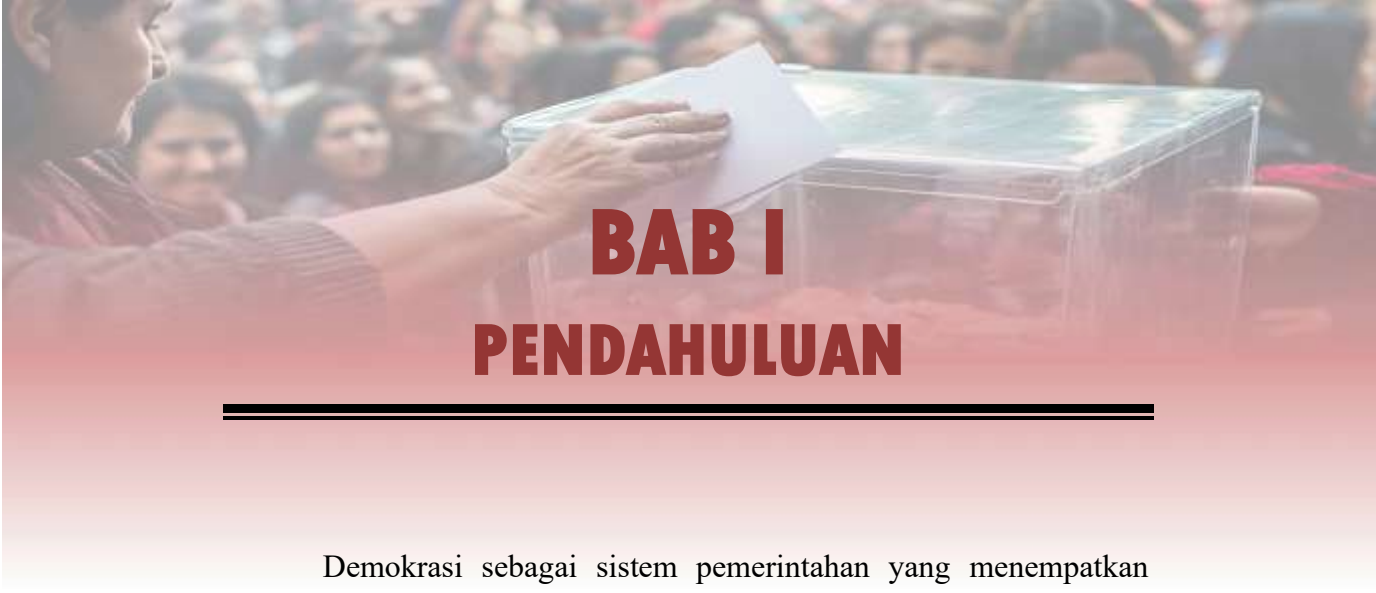

BAB I
PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi telah menjadi fondasi penting dalam kehidupan politik Indonesia pascareformasi. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bebas, adil, dan partisipatif. Pemilu bukan hanya sekadar sarana memilih pemimpin atau wakil rakyat, tetapi juga merupakan mekanisme penting untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator utama bagi keberhasilan demokrasi, karena semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin besar pula keterlibatan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun, partisipasi yang dimaksud tidak hanya bersifat kuantitatif semata, melainkan juga harus mencerminkan kualitas, kesadaran, dan pemahaman yang mendalam terhadap proses politik. Di tengah meningkatnya angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu, Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam kualitas demokrasi itu sendiri, mulai dari praktik politik uang, disinformasi di media sosial, polarisasi identitas, hingga minimnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis dinamika indeks partisipasi pemilu serta tantangan masa depan demokrasi Indonesia demi menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat dan inklusif.

A. Latar Belakang Pentingnya Partisipasi Pemilu

1. Partisipasi Pemilu sebagai Pilar Utama Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme inti dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung

memilih pemimpinnya dan menentukan arah kebijakan publik. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi pemilih dalam pemilu tidak hanya mencerminkan legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Demokrasi yang sehat sangat bergantung pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, terutama melalui pemilu. Tanpa partisipasi aktif, demokrasi akan mengalami stagnasi dan membuka peluang bagi praktik otoritarianisme atau dominasi elite politik yang tidak akuntabel (Dahl, 2000). Oleh karena itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana rakyat menjalankan hak politiknya dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik.

Tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, misalnya, tren partisipasi pemilih menunjukkan kenaikan yang signifikan pascareformasi. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden 2019 mencapai 81,97%, meningkat dibandingkan Pemilu 2014 yang berada pada angka 70,99% (KPU, 2019). Ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi cerminan dari keberhasilan reformasi demokrasi. Meski demikian, tingginya angka partisipasi ini masih perlu dikaji dari segi kualitas, karena partisipasi yang sehat bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga sejauh mana pemilih memahami isu, kandidat, dan platform kebijakan yang ditawarkan.

Partisipasi pemilu yang berkualitas juga berkaitan erat dengan kesetaraan politik dan inklusi sosial. Pemilu yang demokratis harus memberikan ruang yang setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan etnis, serta masyarakat adat. Jika kelompok-kelompok ini tidak memiliki akses atau tidak didorong untuk berpartisipasi, maka hasil pemilu akan bias terhadap kelompok dominan, dan demokrasi menjadi tidak representatif (Norris, 2002). Di Indonesia, upaya untuk mendorong inklusi dilakukan antara lain melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang cukup besar. Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilu harus dilihat sebagai agenda

strategis untuk memperkuat demokrasi inklusif dan responsif terhadap keragaman masyarakat Indonesia.

Pemilu merupakan sarana utama untuk memastikan terjadinya akuntabilitas politik. Pemilih memiliki kekuasaan untuk memberikan atau mencabut mandat kepada para pemimpin politik berdasarkan kinerja dan rekam jejaknya. Dalam konteks ini, partisipasi pemilih menjadi kunci untuk menciptakan sistem politik yang kompetitif dan akuntabel. Menurut Schumpeter (1942), demokrasi yang sehat bukan hanya tentang pemilu yang berlangsung secara berkala, tetapi juga tentang pemilu yang memungkinkan pemilih untuk mengevaluasi dan mengontrol para pemimpin melalui mekanisme pemilihan. Dengan kata lain, partisipasi bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan bentuk konkret dari pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Dalam situasi ketika partisipasi rendah, kontrol terhadap kekuasaan akan melemah, dan risiko penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar.

2. Konteks Sosial-Politik Indonesia dan Tantangan terhadap Partisipasi Pemilu

Meskipun pentingnya partisipasi pemilu telah menjadi konsensus dalam teori dan praktik demokrasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan sosial-politik yang dapat menghambat partisipasi yang bermakna. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 45% pemilih yang memahami secara jelas perbedaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kurangnya pemahaman ini berdampak langsung pada kualitas keputusan pemilih saat memilih kandidat atau partai, dan sering kali membuatnya rentan terhadap manipulasi informasi, politik uang, dan propaganda identitas. Literasi politik yang rendah menjadikan proses pemilu sebagai formalitas belaka, tanpa adanya partisipasi yang reflektif dan kritis.

Fenomena politik uang juga menjadi kendala serius dalam mendorong partisipasi pemilih yang sehat. Praktik ini bukan hanya menurunkan nilai moral dalam proses politik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam kompetisi elektoral. Kandidat dengan sumber daya finansial besar cenderung lebih dominan, sementara kandidat yang mengandalkan integritas dan visi sering kali kalah dalam medan yang tidak setara. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW, 2020), politik uang masih marak terjadi di hampir semua tingkatan

pemilu, mulai dari pilkades hingga pilpres. Hal ini berdampak pada kualitas demokrasi, karena partisipasi yang dibangun melalui insentif ekonomi jangka pendek tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Polarisasi politik berbasis identitas juga menjadi ancaman bagi partisipasi yang inklusif. Pemilu di Indonesia, terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019, memperlihatkan meningkatnya pembelahan masyarakat berdasarkan preferensi politik yang sering kali dikaitkan dengan agama dan etnis. Polarisasi ini tidak hanya mempengaruhi relasi sosial di tingkat akar rumput, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam diskursus publik dan kampanye politik. Pemilih yang berada di tengah cenderung enggan terlibat secara aktif karena khawatir menjadi korban intimidasi atau kekerasan verbal di media sosial. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi menciptakan apatisme politik dan menurunkan partisipasi karena proses demokrasi dianggap sebagai ajang konflik, bukan sarana deliberasi dan konsensus (Mietzner, 2020).

Kondisi geografis dan ketimpangan pembangunan juga menjadi faktor pembatas partisipasi politik di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan karakteristik demografis yang beragam, tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi dan logistik pemilu. Di daerah terpencil, partisipasi sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya kehadiran negara, serta kurangnya kampanye pendidikan pemilih. Laporan Bawaslu (2020) mencatat bahwa sebagian besar pelanggaran administratif pemilu justru terjadi di wilayah luar Jawa, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan sosialisasi di daerah tersebut. Akibatnya, banyak pemilih di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sadar dan mandiri, melainkan karena tekanan sosial atau mobilisasi kelompok tertentu.

Tantangan partisipasi juga muncul dari kalangan muda. Meskipun secara demografis generasi muda merupakan kelompok pemilih terbesar, minat terhadap politik formal cenderung rendah. Survei CSIS (2022) mencatat bahwa hanya 28,1% generasi milenial dan Gen Z yang menyatakan tertarik mengikuti perkembangan politik. Banyak dari yang merasa bahwa partai politik tidak merepresentasikan kepentingan anak muda, sehingga memilih jalur partisipasi alternatif seperti gerakan sosial, media digital, atau komunitas kreatif. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada transformasi kelembagaan yang lebih membuka ruang

partisipasi politik anak muda, termasuk reformasi sistem kepartaian, pelibatan dalam pembuatan kebijakan, dan peningkatan pendidikan politik berbasis teknologi informasi.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Buku

1. Tujuan Penyusunan Buku: Menjawab Kebutuhan Demokratisasi yang Substantif

Demokrasi yang kokoh tidak dibangun hanya melalui prosedur elektoral yang rutin, tetapi menuntut kesadaran politik yang berkembang secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk menjadi rujukan konseptual dan praktis dalam memahami dinamika partisipasi pemilu di Indonesia serta implikasinya terhadap masa depan demokrasi nasional. Melalui kajian yang berbasis data empiris dan kerangka teori mutakhir, buku ini hadir sebagai kontribusi terhadap wacana penguatan demokrasi substantif yang menekankan pentingnya partisipasi politik sebagai fondasi utama. Dalam pengertian ini, buku tidak semata membahas statistik partisipasi, tetapi juga menjabarkan tantangan, hambatan, serta peluang yang muncul di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi di Indonesia.

Salah satu tujuan strategis dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum tentang pentingnya indeks partisipasi sebagai instrumen evaluatif kualitas demokrasi. Dengan mendasarkan pada teori partisipasi politik seperti yang dikemukakan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995), buku ini menekankan bahwa partisipasi politik yang bermakna harus dibangun dari tiga pilar: *resources* (sumber daya), *engagement* (keterlibatan), dan *recruitment* (rekrutmen). Ketiga elemen ini menjadi fokus analisis dalam mengevaluasi berbagai fenomena politik elektoral yang selama ini terjadi di Indonesia. Pemahaman terhadap pilar-pilar tersebut diharapkan dapat membuka perspektif baru dalam mendesain kebijakan pemilu yang inklusif dan adil.

Buku ini bertujuan membekali para pemangku kepentingan dengan landasan normatif dan praktis untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu sering kali direduksi sebagai rutinitas lima tahunan yang prosedural, padahal dalam demokrasi yang sehat,

pemilu merupakan alat untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Tujuan lainnya adalah memperluas cakrawala berpikir para pemilih agar tidak terjebak pada politik identitas, pragmatisme jangka pendek, atau disinformasi yang kini banyak beredar melalui media sosial. Oleh karena itu, penyusunan buku ini juga diarahkan untuk memberikan literasi politik yang lebih dalam dan kontekstual kepada publik, termasuk generasi muda yang kelak akan berperan penting dalam arah politik nasional.

Tujuan penting lain dari buku ini adalah mendorong adanya reformasi struktural dalam kelembagaan politik dan sistem kepemiluan di Indonesia. Melalui pembahasan yang bersifat reflektif dan evaluatif, buku ini menyuguhkan berbagai alternatif solusi dalam merespons penurunan kepercayaan terhadap partai politik, maraknya politik uang, dan lemahnya pengawasan elektoral. Dengan merujuk pada *best practices* dari negara-negara lain, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi elektoral, seperti penggunaan teknologi informasi secara transparan, penerapan sistem pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas pemilu yang independen dan kredibel.

2. Ruang Lingkup Pembahasan: Multidisipliner, Multisektor, dan Prospektif

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini dirancang untuk mencakup berbagai dimensi yang saling terkait dalam memahami partisipasi pemilu di Indonesia. Dimensi pertama adalah dimensi teoritik yang mencakup konsep-konsep dasar partisipasi politik, demokrasi prosedural vs. demokrasi substantif, serta indeks partisipasi pemilu sebagai instrumen evaluasi sistem politik. Kerangka teoritis dalam buku ini merujuk pada karya-karya ilmuwan politik seperti Robert Dahl (2000), Samuel Huntington (1991), dan Sidney Verba *et al*. (1995) yang memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya keikutsertaan warga dalam proses politik sebagai cermin keberhasilan demokrasi. Pemahaman teoretis ini penting sebagai pijakan awal dalam menilai realitas partisipasi pemilih di Indonesia yang sangat kompleks dan dinamis.

Dimensi kedua adalah dimensi empiris yang berisi data, tren, dan analisis komparatif mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu nasional dan lokal di Indonesia sejak era reformasi. Buku ini menyajikan

data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga-lembaga survei independen yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai fluktuasi partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Analisis data ini mencakup perbandingan antarwilayah, antarsegmen demografis, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan pemilih. Misalnya, dalam Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di DKI Jakarta hanya mencapai 77,5%, sementara di Sulawesi Selatan mencapai 86,1% (KPU, 2019). Perbedaan ini menjadi bahan kajian penting dalam mengidentifikasi penyebab disparitas dan solusi yang bisa ditawarkan.

Dimensi ketiga yang menjadi cakupan buku ini adalah dimensi normatif dan kebijakan. Buku ini menganalisis regulasi pemilu yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menelaah sejauh mana aturan tersebut mendukung peningkatan partisipasi yang adil dan setara. Buku juga membahas isu strategis seperti representasi kelompok rentan, efektivitas kampanye pendidikan pemilih, serta evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilu legislatif. Isu-isu ini dikaji dalam konteks kebutuhan untuk melakukan reformasi pemilu yang mampu mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara rasional, bebas dari tekanan, dan tidak transaksional.

Ruang lingkup buku ini juga menyentuh dimensi teknologi dan digitalisasi pemilu. Dengan kemajuan teknologi informasi, partisipasi pemilih tidak lagi hanya terkait dengan kehadiran fisik di TPS, tetapi juga dengan interaksi digital yang membentuk persepsi politik masyarakat. Buku ini membahas peran media sosial, platform digital, dan sistem informasi pemilu (Sidalih, Sirekap) dalam membentuk kesadaran politik serta potensi penyebaran hoaks dan disinformasi. Kajian dalam bagian ini didasarkan pada studi dari organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo, 2020) yang mendokumentasikan tingginya intensitas hoaks politik menjelang pemilu. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini juga membahas bagaimana literasi digital dan kecerdasan informasi menjadi modal penting untuk mendorong partisipasi yang cerdas.

Ruang lingkup terakhir adalah dimensi prospektif yang menawarkan pandangan ke depan mengenai skenario masa depan demokrasi Indonesia. Buku ini membahas berbagai kemungkinan transformasi dalam sistem kepemiluan dan peran masyarakat sipil ke

depan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis kepercayaan publik, populisme digital, serta perubahan perilaku pemilih akibat pandemi dan disrupsi teknologi. Dalam bagian ini, penulis juga menyampaikan rekomendasi strategis untuk para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merancang program-program penguatan partisipasi pemilu yang lebih partisipatif dan inklusif di masa mendatang. Pendekatan prospektif ini bertujuan agar buku tidak hanya menjadi kajian retrospektif, tetapi juga sebagai panduan masa depan dalam penguatan demokrasi elektoral.

C. Metodologi Penulisan dan Pendekatan Kajian

1. Metodologi Penulisan

Demokrasi yang kokoh tidak dibangun hanya melalui prosedur elektoral yang rutin, tetapi menuntut kesadaran politik yang berkembang secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk menjadi rujukan konseptual dan praktis dalam memahami dinamika partisipasi pemilu di Indonesia serta implikasinya terhadap masa depan demokrasi nasional. Melalui kajian yang berbasis data empiris dan kerangka teori mutakhir, buku ini hadir sebagai kontribusi terhadap wacana penguatan demokrasi substantif yang menekankan pentingnya partisipasi politik sebagai fondasi utama. Dalam pengertian ini, buku tidak semata membahas statistik partisipasi, tetapi juga menjabarkan tantangan, hambatan, serta peluang yang muncul di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya sekadar angka, tetapi juga kualitas dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.

Salah satu tujuan strategis dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada akademisi, penyelenggara pemilu, pelajar, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum tentang pentingnya indeks partisipasi sebagai instrumen evaluatif kualitas demokrasi. Dengan mendasarkan pada teori partisipasi politik seperti yang dikemukakan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995), buku ini menekankan bahwa partisipasi politik yang bermakna harus dibangun dari tiga pilar: *resources* (sumber daya), *engagement* (keterlibatan), dan *recruitment* (rekrutmen). Ketiga elemen ini menjadi fokus analisis dalam mengevaluasi berbagai fenomena politik elektoral yang selama ini

terjadi di Indonesia. Pemahaman terhadap pilar-pilar tersebut diharapkan dapat membuka perspektif baru dalam mendesain kebijakan pemilu yang inklusif dan adil. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan data, tetapi juga analisis mendalam tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik yang bermakna.

Buku ini bertujuan membekali para pemangku kepentingan dengan landasan normatif dan praktis untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu sering kali direduksi sebagai rutinitas lima tahunan yang prosedural, padahal dalam demokrasi yang sehat, pemilu merupakan alat untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, buku ini juga diarahkan untuk memberikan literasi politik yang lebih dalam dan kontekstual kepada publik, termasuk generasi muda yang kelak akan berperanan penting dalam arah politik nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilih tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga memahami makna dan dampak dari partisipasinya.

Tujuan penting lain dari buku ini adalah mendorong adanya reformasi struktural dalam kelembagaan politik dan sistem kepemiluan di Indonesia. Melalui pembahasan yang bersifat reflektif dan evaluatif, buku ini menyuguhkan berbagai alternatif solusi dalam merespons penurunan kepercayaan terhadap partai politik, maraknya politik uang, dan lemahnya pengawasan elektoral. Dengan merujuk pada *best practices* dari negara-negara lain, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi elektoral, seperti penggunaan teknologi informasi secara transparan, penerapan sistem pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas pemilu yang independen dan kredibel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pemilu di Indonesia tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga substansial dan inklusif.

Pada konteks Indonesia, buku ini juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam partisipasi politik, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan afirmatif dan transformasional dalam meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok ini dalam proses politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mewakili kepentingan sebagian, tetapi juga seluruh rakyat.

Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang bermakna. Dengan memberikan literasi politik yang lebih dalam dan kontekstual, buku ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana partisipasi dapat membentuk kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga substansial dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi penyelenggara pemilu dalam merancang dan melaksanakan pemilu yang lebih inklusif dan adil. Dengan menganalisis tantangan dan hambatan yang ada, buku ini dapat membantu penyelenggara pemilu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga alat untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Buku ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana penguatan demokrasi di Indonesia. Melalui analisis mendalam tentang partisipasi politik dan pemilu, buku ini dapat membantu memperluas cakrawala berpikir para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga substansial dan berdasarkan pada kepentingan publik.

2. Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian dalam buku ini dirancang dengan sifat multidisipliner, mencakup ilmu politik, hukum tata negara, komunikasi politik, sosiologi pemilu, dan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menangkap kompleksitas persoalan partisipasi pemilu yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berakar pada aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan digital. Kajian ini tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi juga pada realitas lapangan, sehingga dapat menjadi jembatan antara pendekatan akademik dan kebutuhan praktis. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika partisipasi pemilu di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan tematik. Setiap bab dalam buku difokuskan pada tema sentral yang

berkaitan erat satu sama lain, seperti tren partisipasi, tantangan demokrasi elektoral, peran generasi muda, pengaruh media sosial, reformasi kelembagaan pemilu, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari tataran konseptual, lalu masuk ke pembahasan empiris, dan diakhiri dengan refleksi kebijakan. Model ini memastikan bahwa setiap tema dianalisis secara mendalam dan menyeluruh. Dengan pendekatan tematik, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terstruktur tentang berbagai aspek partisipasi pemilu dan implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia.

Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara demokrasi berkembang lainnya seperti India, Brasil, dan Filipina. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menempatkan pengalaman Indonesia dalam konteks internasional dan mengevaluasi kualitas demokrasi secara objektif. Laporan dari International IDEA (2021), Freedom House (2022), dan *The Economist Intelligence Unit* (2022) menjadi rujukan utama dalam menilai posisi Indonesia dalam spektrum demokrasi global. Pendekatan komparatif ini juga membuka ruang untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain yang relevan dengan kondisi Indonesia. Dengan membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara lain, buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan peluang dalam penguatan demokrasi elektoral.

Untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih, misalnya, buku ini memadukan pendekatan sosiologis dan komunikasi politik dengan literasi digital. Teori dari McQuail (2010) dan Buckingham (2013) digunakan untuk menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi politik, partisipasi pemuda, dan pembentukan opini publik. Dengan pendekatan lintas-disiplin ini, analisis menjadi lebih tajam dan kontekstual. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan politik modern, dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih tidak dapat diabaikan. Dengan memadukan berbagai pendekatan, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik yang bermakna.

Dengan menyatukan pendekatan tematik, komparatif, dan multidisipliner, kajian dalam buku ini tidak hanya membahas fakta dan tren, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Oleh

karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia, baik bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, akademisi, maupun masyarakat sipil. Rekomendasi kebijakan yang aplikatif dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia. Buku ini juga bertujuan untuk menjadi sumber referensi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, sehingga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berpartisipasi.

Pendekatan multidisipliner dalam kajian ini memungkinkan untuk melihat persoalan partisipasi pemilu dari berbagai sudut pandang. Dengan melibatkan ilmu politik, hukum tata negara, komunikasi politik, sosiologi pemilu, dan teknologi informasi, buku ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilu. Hal ini penting karena persoalan partisipasi pemilu tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berakar pada aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan digital. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika partisipasi pemilu di Indonesia.

BAB II
KONSEP DASAR PARTISIPASI POLITIK DAN DEMOKRASI

Partisipasi politik merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui partisipasi politik, warga negara tidak hanya menyalurkan aspirasinya, tetapi juga turut membentuk arah kebijakan publik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang, partisipasi politik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan politik dan kedewasaan berdemokrasi suatu bangsa. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga, mulai dari penggunaan hak pilih dalam pemilu, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, hingga partisipasi dalam diskusi dan aksi politik di ruang digital. Oleh karena itu, memahami konsep dasar partisipasi politik dan demokrasi menjadi langkah krusial untuk mengevaluasi sejauh mana sistem demokrasi bekerja secara substansial dan tidak hanya prosedural. Konsep ini juga membantu menjelaskan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dalam menciptakan tata kelola yang inklusif, responsif, dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peran partisipasi dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, diperlukan kajian mendalam yang mampu mengurai dimensi teoritis dan aplikatif dari partisipasi politik sebagai instrumen demokratisasi.

A. Pengertian Partisipasi Politik

1. Konsep Dasar dan Perspektif Teoretis Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu konsep kunci dalam ilmu politik yang merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik dan

pengambilan keputusan politik. Secara klasik, Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat publik dan kebijakan yang ditetapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya terbatas pada tindakan formal seperti memilih, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lain, termasuk demonstrasi, petisi, dan partisipasi dalam forum publik.

Verba dan Nie (1972) membagi partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, seperti partisipasi pemilihan (voting), kampanye politik, kontak dengan pejabat, serta aktivitas komunitas dan protes. Pembagian ini menunjukkan adanya spektrum partisipasi yang luas, dari yang bersifat konvensional hingga non-konvensional. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik dianggap sebagai instrumen utama untuk menjamin kedaulatan rakyat dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Melalui partisipasi aktif, warga negara tidak hanya mengontrol para pemimpin terpilih, tetapi juga turut serta dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan negara.

Pada pendekatan struktural-fungsional yang dikemukakan Almond dan Powell (1966), partisipasi politik merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem politik yang menunjukkan integrasi antara masyarakat dan struktur pemerintahan. Partisipasi dianggap sebagai mekanisme sirkulasi elite, mobilisasi massa, dan legitimasi kekuasaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur institusi seperti partai politik, parlemen, dan pemilu dalam mengatur kanal partisipasi masyarakat. Sebaliknya, pendekatan behavioralis yang berkembang pada era pasca-Perang Dunia II lebih menekankan perilaku individu dan motivasi psikologis sebagai faktor penentu dalam partisipasi politik (Milbrath, 1965).

Pada konteks demokrasi modern, terutama demokrasi elektoral, partisipasi politik sering dipersempit pada perilaku memilih dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dimengerti mengingat pemilu merupakan sarana utama perwujudan demokrasi prosedural. Namun demikian, pemahaman sempit ini kerap mengabaikan bentuk-bentuk partisipasi non-elektoral yang justru dapat lebih substantif dalam mencerminkan aspirasi politik masyarakat. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan, partisipasi digital melalui media sosial, serta gerakan sosial berbasis isu menunjukkan ekspansi bentuk partisipasi di era kontemporer (Dalton, 2013).

Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan individual. Menurut Rosenstone dan Hansen (1993), faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, umur, serta kepemilikan informasi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi individu. Di sisi lain, faktor kontekstual seperti sistem pemilu, regulasi politik, dan iklim demokrasi juga turut menentukan sejauh mana partisipasi politik dapat berlangsung secara inklusif dan adil. Dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia, faktor budaya politik dan sejarah otoritarianisme juga menjadi variabel penting yang mempengaruhi pola partisipasi masyarakat.

2. Partisipasi Politik dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Di Indonesia, partisipasi politik mengalami dinamika yang cukup kompleks. Sejak era Reformasi 1998, ruang partisipasi politik terbuka luas seiring dengan perubahan sistem politik menjadi lebih demokratis dan desentralistik. Pemilu langsung, kebebasan pers, kebangkitan masyarakat sipil, serta kemajuan teknologi informasi menjadi katalis bagi tumbuhnya berbagai bentuk partisipasi. Namun demikian, tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu belum tentu mencerminkan partisipasi politik yang substantif. Dalam banyak kasus, partisipasi warga masih bersifat mobilisasi pragmatis, berbasis iming-iming materi atau ikatan patronase, bukan didorong oleh kesadaran kritis sebagai warga negara (Mietzner, 2012).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mencapai 81%, angka yang secara statistik tergolong tinggi. Namun jika ditelisik lebih dalam, partisipasi ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi substantif. Masih banyak pemilih yang tidak memahami visi-misi calon, tidak mengikuti proses kampanye secara aktif, dan mudah terpengaruh informasi palsu (hoaks) yang tersebar luas di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Indonesia lebih banyak bersifat prosedural daripada partisipatif secara kritis (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Partisipasi politik di Indonesia menunjukkan kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial. Di wilayah perkotaan dan kalangan terdidik, partisipasi politik cenderung lebih aktif dan beragam, termasuk dalam bentuk digital *engagement* seperti diskusi daring dan kampanye di media sosial. Sementara itu, di wilayah pedesaan atau kelompok

masyarakat marginal, partisipasi cenderung pasif dan terbatas pada aktivitas memilih. Faktor akses informasi, tingkat literasi politik, serta kepercayaan terhadap sistem politik menjadi kendala utama bagi terwujudnya partisipasi yang setara (Muhtadi, 2019).

Partai politik dan organisasi masyarakat sipil (CSO) memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi politik. Namun kenyataannya, partai politik di Indonesia masih minim dalam membangun pendidikan politik dan kaderisasi, sehingga gagal menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Sebaliknya, sejumlah CSO justru lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik, melakukan advokasi kebijakan, dan membangun kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara lebih bermakna. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan. Media sosial membuka ruang baru bagi ekspresi politik, tetapi juga membawa risiko polarisasi, penyebaran hoaks, dan budaya politik yang dangkal (Lim, 2017).

Partisipasi politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor usia dan generasi. Survei yang dilakukan oleh CSIS (2022) menunjukkan bahwa generasi muda (milenial dan Gen Z) memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan perubahan politik, namun cenderung skeptis terhadap institusi politik formal, lebih nyaman menyuarakan pendapat melalui media sosial dan gerakan sosial berbasis isu, daripada bergabung dalam partai politik. Ini menunjukkan pentingnya redefinisi partisipasi politik yang tidak hanya mengandalkan mekanisme elektoral, tetapi juga mengakui bentuk-bentuk partisipasi alternatif yang lebih sesuai dengan karakter generasi baru.

Meskipun demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, oligarki, dan fragmentasi sosial, ruang partisipasi tetap harus dijaga dan diperluas. Dalam hal ini, penting bagi negara untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi inklusif, transparan, dan adil. Pendidikan politik, literasi digital, reformasi kepartaian, serta pelibatan aktif masyarakat sipil adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa partisipasi politik benar-benar menjadi sarana pemberdayaan warga negara, bukan sekadar formalitas prosedural semata.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pengambilan keputusan pemerintah. Bentuk-bentuk partisipasi politik sangat beragam, mulai dari yang konvensional hingga non-konvensional, serta partisipasi langsung dan tidak langsung. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan berbagai referensi.

1. Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi politik konvensional merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik yang diakui secara formal dan legal dalam sistem demokrasi. Bentuk partisipasi ini biasanya dilakukan melalui saluran resmi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan. Partisipasi politik konvensional merupakan fondasi utama bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan berfungsi, karena melalui mekanisme ini warga dapat menyalurkan aspirasi, memilih wakilnya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu wujud partisipasi politik konvensional yang paling fundamental dan umum dikenal adalah pemungutan suara atau voting dalam pemilihan umum.

Pemungutan suara merupakan bentuk partisipasi paling dasar sekaligus paling signifikan dalam sistem demokrasi. Melalui hak suara, warga negara berkesempatan menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana kebijakan publik akan dijalankan. Voting tidak hanya menjadi mekanisme pemilihan, tetapi juga simbol legitimasi kekuasaan negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Norris (2002), partisipasi melalui voting sangat penting karena membantu menentukan arah kebijakan nasional dan lokal yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Selain itu, Dalton (2008) menggarisbawahi bahwa legitimasi pemerintah yang terpilih sangat bergantung pada partisipasi pemilih yang tinggi dan representatif. Oleh sebab itu, partisipasi dalam pemilu merupakan indikator kesehatan demokrasi sekaligus sarana bagi rakyat untuk melakukan kontrol politik.

Warga juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik melalui keikutsertaan dalam kampanye politik. Bentuk partisipasi ini mencakup berbagai aktivitas seperti menjadi relawan partai politik,

menyebarkan materi kampanye, serta menghadiri rapat umum atau debat publik. Keikutsertaan dalam kampanye politik tidak hanya meningkatkan kesadaran politik warga, tetapi juga memperkuat jaringan dukungan bagi kandidat atau partai politik tertentu. Verba dan Nie (1972) menekankan bahwa keterlibatan dalam kampanye membantu warga memahami isu-isu politik secara lebih mendalam, sekaligus membangun solidaritas sosial. Rosenstone dan Hansen (1993) menambahkan bahwa kampanye juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan sosial dan politik yang esensial dalam sistem demokrasi, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan calon dalam pemilu.

Partisipasi politik konvensional juga dapat diwujudkan melalui keanggotaan dalam partai politik atau kelompok kepentingan. Melalui keanggotaan ini, warga dapat mempengaruhi kebijakan publik secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Partai politik memiliki peran penting sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Teori Duverger (1954) menjelaskan bahwa partai politik merupakan jembatan penghubung yang memungkinkan aspirasi rakyat sampai ke pemerintah dan sebaliknya. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, yang mana individu-individu potensial dapat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin atau pejabat publik (Hague & Harrop, 2010). Keanggotaan dalam partai atau kelompok kepentingan memungkinkan warga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, serta memperjuangkan kepentingan kolektif melalui jalur formal.

Kontak langsung dengan pejabat politik atau aparat pemerintah merupakan bentuk lain dari partisipasi politik konvensional yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara personal dan langsung. Bentuk kontak ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti surat atau petisi, audiensi dengan anggota legislatif, serta pengaduan melalui lembaga pengawas atau ombudsman. Verba *et al*. (1995) menunjukkan bahwa efektivitas kontak politik ini cenderung lebih tinggi di tingkat lokal, di mana warga memiliki akses lebih mudah dan hubungan yang lebih dekat dengan pejabat publik. Namun, untuk melakukan kontak politik yang efektif, warga memerlukan akses informasi yang cukup serta pemahaman tentang mekanisme birokrasi dan prosedur penyampaian aspirasi, sebagaimana dijelaskan oleh Brady *et al*. (1995). Oleh karena itu, pendidikan politik dan transparansi

pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan partisipasi ini.

Secara umum, partisipasi politik konvensional memiliki karakteristik formal, terorganisir, dan diatur oleh sistem hukum negara. Bentuk-bentuk partisipasi ini sering kali menjadi fokus utama dalam evaluasi kesehatan demokrasi di suatu negara, karena mencerminkan tingkat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik yang sah. Meskipun demikian, tidak semua warga memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi secara efektif. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, status sosial ekonomi, serta budaya politik mempengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi politik konvensional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik konvensional harus mempertimbangkan berbagai hambatan struktural dan kultural yang ada.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini juga mempengaruhi pola partisipasi politik konvensional. Misalnya, penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital dapat mempermudah akses warga terhadap berita politik dan kampanye, sehingga meningkatkan partisipasi pemilih muda yang sebelumnya kurang aktif. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi politik yang dapat merusak kualitas partisipasi. Oleh sebab itu, literasi politik dan digital menjadi sangat penting agar partisipasi politik konvensional tetap relevan dan efektif dalam konteks modern.

2. Partisipasi Politik Non-Konvensional

Partisipasi politik non-konvensional merupakan bentuk keterlibatan warga yang dilakukan di luar mekanisme formal atau saluran resmi sistem politik. Bentuk partisipasi ini biasanya muncul ketika warga merasa bahwa jalur konvensional tidak cukup efektif dalam menyampaikan aspirasi atau menuntut perubahan. Aktivitas non-konvensional sering kali menjadi alternatif yang penting dalam demokrasi modern karena mampu memberikan tekanan politik dan mengangkat isu-isu yang mungkin diabaikan oleh institusi formal. Dalam konteks ini, partisipasi politik non-konvensional mencakup berbagai tindakan yang bersifat lebih langsung dan terkadang kontroversial, seperti demonstrasi, boikot, serta gerakan sosial yang menggunakan teknologi digital.

Salah satu bentuk partisipasi non-konvensional yang paling terlihat dan sering terjadi adalah demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Demonstrasi merupakan cara bagi warga untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau protes terhadap kebijakan pemerintah, institusi, maupun situasi sosial-politik yang dirasa tidak adil. Menurut Tarrow (1998), demonstrasi sering kali merupakan respons langsung terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Demonstrasi berfungsi sebagai alat tekanan yang memungkinkan kelompok-kelompok marginal untuk menuntut perhatian dan perubahan, terutama ketika suaranya sulit didengar melalui mekanisme formal. Selain itu, McAdam dan koleganya (2001) menegaskan bahwa aksi protes merupakan strategi penting bagi kelompok yang kurang memiliki akses kekuasaan, sehingga dapat mengartikulasikan tuntutannya secara lebih efektif.

Boikot dan pembelian politikal merupakan bentuk partisipasi non-konvensional yang menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat perubahan politik. Boikot produk tertentu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan atau produk yang dianggap tidak etis atau berkontribusi pada masalah sosial dan politik. Sebaliknya, pembelian politikal mengacu pada dukungan terhadap produk atau perusahaan yang selaras dengan nilai dan isu tertentu. Stolle dan kolega (2005) menjelaskan bahwa praktik ini mendorong tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberi insentif kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Meskipun bentuk partisipasi ini bersifat pasif dibandingkan demonstrasi fisik, Micheletti (2003) berargumen bahwa boikot dan pembelian politikal efektif sebagai strategi kolektif yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan pada akhirnya kebijakan publik.

Perkembangan teknologi digital dan internet telah melahirkan bentuk partisipasi politik non-konvensional baru yang sangat dinamis dan luas jangkauannya. Gerakan sosial yang menggunakan platform digital menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahan akses dan kemampuan mobilisasi yang besar. Petisi online, seperti yang ada di Change.org, memungkinkan warga untuk menggalang dukungan secara cepat dan efisien terhadap suatu isu tanpa harus melakukan aksi fisik. Selain itu, kampanye di media sosial seperti Twitter (X), Facebook, dan Instagram membuka ruang baru bagi aktivisme digital yang dapat menjangkau audiens global dengan pesan

yang kuat dan persuasif. Contoh kampanye seperti ReformasiDikorupsi menunjukkan bagaimana media digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengorganisasi aksi secara masif.

Media digital tidak hanya memperluas jangkauan partisipasi politik tetapi juga mempermudah mobilisasi massa secara real-time. Bennett dan Segerberg (2012) membahas bahwa media digital memungkinkan pola partisipasi yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi, di mana individu dapat bergabung dalam gerakan tanpa harus bergantung pada organisasi tradisional. Dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi, warga dapat terlibat dalam berbagai kampanye dan aksi politik yang sebelumnya sulit dijangkau. Tufekci (2017) menambahkan bahwa media sosial dapat menjadi alat ampuh untuk memobilisasi massa secara cepat, mengorganisasi protes besar, dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik.

Meski demikian, partisipasi politik non-konvensional juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Demonstrasi dan aksi protes sering kali berisiko mengalami kekerasan atau represi oleh aparat keamanan, sehingga para peserta harus mempertimbangkan potensi bahaya fisik dan hukum. Selain itu, dalam konteks digital, gerakan aktivisme bisa menghadapi masalah seperti penyebaran disinformasi, manipulasi data, dan serangan siber yang dapat merusak kredibilitas gerakan. Ketergantungan pada platform digital juga menimbulkan pertanyaan mengenai privasi dan keamanan data peserta. Oleh karena itu, partisipasi non-konvensional harus diimbangi dengan strategi yang bijak dan kesadaran akan risiko yang mungkin muncul.

Partisipasi politik non-konvensional menjadi pelengkap penting dalam sistem demokrasi, terutama ketika mekanisme formal dianggap kurang responsif atau tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat. Bentuk partisipasi ini memberikan saluran alternatif bagi warga untuk menyuarakan aspirasi dan menekan perubahan kebijakan. Demonstrasi, boikot, dan aktivisme digital merupakan contoh konkret bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik di luar jalur konvensional. Dengan demikian, partisipasi non-konvensional tidak hanya memperkaya demokrasi, tetapi juga meningkatkan inklusivitas dan keberagaman suara dalam proses politik.

Peran partisipasi non-konvensional semakin vital di era modern yang ditandai oleh kompleksitas masalah sosial dan politik yang cepat

berubah. Isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan hak asasi manusia sering kali menuntut respons yang segera dan mendalam dari masyarakat. Dalam konteks ini, aksi protes dan gerakan sosial menjadi alat utama untuk menuntut keadilan dan perubahan. Media digital menjadi fasilitator utama yang menghubungkan berbagai kelompok dan individu, memperkuat solidaritas, dan memperluas jangkauan gerakan. Dengan demikian, partisipasi politik non-konvensional tidak hanya merupakan bentuk perlawanan, tetapi juga inovasi dalam cara warga mempengaruhi kebijakan dan membentuk demokrasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

C. Konsep Demokrasi dan Indikator Keberhasilannya

Demokrasi merupakan sistem politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi terus berkembang seiring perubahan zaman, tetapi prinsip utamanya tetap meliputi partisipasi publik, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi sebagai sebuah konsep telah menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan modern di banyak negara di dunia. Pada dasarnya, demokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Abraham Lincoln, dalam pidatonya pada tahun 1863, merumuskan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," sebuah definisi yang menekankan peran sentral rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik. Definisi ini tidak hanya menggarisbawahi aspek kekuasaan rakyat, tetapi juga menjelaskan bahwa tujuan utama demokrasi adalah untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas.

Definisi demokrasi oleh Robert Dahl pada tahun 1971 memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif. Dahl mengidentifikasi beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem politik agar dapat dikatakan demokratis. Pertama, partisipasi efektif yang memungkinkan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menjadi dasar penting agar demokrasi tidak

hanya menjadi sistem yang eksklusif bagi sebagian kecil masyarakat saja. Kedua, persamaan suara yang menegaskan bahwa setiap suara warga memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil keputusan politik, sehingga menghindari dominasi kelompok tertentu.

Demokrasi menurut Dahl mensyaratkan pemahaman yang jernih dari warga negara, yaitu adanya akses informasi yang memadai dan transparan agar rakyat dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan fakta. Kriteria berikutnya adalah kontrol terhadap agenda politik, yang mengacu pada kemampuan rakyat untuk menentukan isu-isu yang dibahas dan dijadikan prioritas dalam pemerintahan. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak dapat semena-mena menentukan hal-hal yang akan menjadi fokus perhatian tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Terakhir, inklusivitas yang menekankan bahwa semua orang dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau status sosial, menjadi indikator bahwa demokrasi adalah sistem yang berkeadilan dan universal.

Pada praktiknya, demokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik di suatu negara. Demokrasi langsung merupakan bentuk paling murni, di mana rakyat secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara. Contohnya dapat ditemukan dalam sistem referendum yang diterapkan di beberapa negara seperti Swiss, di mana warga negara diberikan hak untuk secara langsung memutuskan kebijakan tertentu. Demokrasi langsung menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga dan dapat memberikan kontrol yang kuat kepada rakyat atas kebijakan yang dibuat. Namun, bentuk ini seringkali sulit diterapkan dalam negara dengan populasi besar karena kompleksitas pengelolaan proses politik secara langsung.

Demokrasi perwakilan atau representatif adalah model yang lebih umum dan praktis di dunia modern. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakilnya melalui pemilu yang kemudian bertugas membuat keputusan politik atas nama konstituen. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia, di mana mekanisme pemilihan umum menjadi sarana utama untuk memilih pejabat publik yang dipercaya. Demokrasi representatif memungkinkan pengelolaan negara dengan populasi besar secara lebih efisien karena pengambilan keputusan diserahkan kepada wakil yang dianggap memiliki kemampuan dan mandat dari masyarakat. Namun, tantangan

dalam sistem ini adalah memastikan bahwa wakil tersebut benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Muncul juga konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya proses diskusi rasional dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berfokus pada interaksi dan dialog antar warga sebagai dasar legitimasi kebijakan publik. Jürgen Habermas pada tahun 1996 menjadi salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep ini, menekankan bahwa keputusan politik harus melalui proses komunikasi yang terbuka dan argumentatif, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Contoh penerapan demokrasi deliberatif dapat dilihat dalam musyawarah desa di Indonesia, di mana warga secara bersama-sama membahas dan menentukan kebijakan lokal melalui diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa inovasi dalam bentuk demokrasi modern, yakni demokrasi elektronik atau e-democracy. Demokrasi elektronik menggunakan teknologi digital untuk memperluas akses partisipasi politik dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Contoh nyata dari e-democracy adalah penggunaan petisi online yang memungkinkan warga menggalang dukungan untuk suatu isu politik tanpa harus bertemu langsung, serta voting elektronik yang mempermudah proses pemilihan umum secara digital. Bentuk demokrasi ini menjanjikan peningkatan partisipasi publik, terutama di era di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan e-democracy juga menimbulkan tantangan seperti keamanan data, akses digital yang tidak merata, dan risiko manipulasi informasi.

Demokrasi tidak hanya sebuah sistem politik, tetapi juga sebuah nilai yang harus dijaga dan dikembangkan melalui partisipasi aktif warga negara. Konsep demokrasi yang inklusif dan partisipatif menuntut keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap proses politik, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, demokrasi harus terus diadaptasi agar tetap relevan dan efektif menghadapi dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Demokrasi juga harus mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak politiknya secara adil dan setara.

2. Indikator Keberhasilan Demokrasi

Keberhasilan demokrasi merupakan topik yang penting dalam kajian politik dan pemerintahan, karena demokrasi bukan sekadar sistem formal yang diterapkan, melainkan juga sebuah proses yang harus menghasilkan hasil yang baik bagi masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan, yang secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu indikator prosedural dan indikator substansial. Indikator prosedural lebih menekankan pada proses demokrasi itu sendiri, sedangkan indikator substansial menilai hasil dan dampak dari sistem demokrasi terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Indikator prosedural menjadi dasar penting dalam menilai apakah sebuah negara benar-benar menjalankan demokrasi secara formal. Salah satu indikator yang paling utama adalah pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum harus berlangsung secara kompetitif dengan transparansi yang tinggi dan tanpa adanya kecurangan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Aspek ini meliputi juga tingkat partisipasi pemilih yang tinggi sebagai tanda bahwa masyarakat merasa yakin dan memiliki akses untuk menentukan wakil. Selain itu, independensi penyelenggara pemilu menjadi faktor penting agar proses pemilu tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Organisasi seperti *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) sering menjadi rujukan dalam menilai kualitas pemilu di berbagai negara.

Kebebasan sipil dan politik juga menjadi indikator prosedural yang esensial. Kebebasan ini mencakup hak warga untuk menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, dan membentuk organisasi sosial atau politik tanpa rasa takut akan represi. Kebebasan pers juga termasuk dalam aspek ini, karena media yang bebas berperan sebagai pengawas pemerintah dan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik. Indeks kebebasan pers dari lembaga seperti Freedom House dan The Economist Intelligence Unit sering dijadikan tolok ukur untuk mengukur kebebasan sipil ini dalam konteks demokrasi.

Indikator prosedural lain yang penting adalah rotasi kekuasaan, yakni adanya pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan teratur. Hal ini menandakan bahwa sistem demokrasi mampu menjamin kelangsungan pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan yang merusak stabilitas politik. Contoh nyata dari keberhasilan indikator ini dapat dilihat pada Indonesia setelah reformasi 1998, di mana pergantian

presiden berlangsung melalui pemilihan umum yang sah dan diterima oleh semua pihak. Mekanisme ini penting agar tidak terjadi stagnasi kekuasaan dan memastikan adanya akuntabilitas serta pembaruan kepemimpinan.

Mekanisme *check and balances* atau pengawasan dan keseimbangan kekuasaan menjadi bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat. Dalam sistem ini, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran yang saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Independensi lembaga peradilan menjadi indikator utama dalam hal ini, karena pengadilan yang bebas dari tekanan politik dapat menegakkan hukum secara adil dan melindungi hak-hak warga negara. *World Justice Project* misalnya, menyediakan penilaian atas independensi lembaga peradilan sebagai bagian dari indeks *rule of law* yang sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Keberhasilan demokrasi juga harus dilihat dari indikator substansial, yang mengukur hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Salah satu aspek yang paling mendasar adalah akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang akuntabel berarti dapat memberikan transparansi terhadap kebijakan dan tindakannya serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Tingkat korupsi menjadi salah satu tolok ukur penting, karena korupsi yang rendah menunjukkan pemerintah bekerja dengan integritas dan demi kepentingan publik. Transparency International secara rutin menerbitkan indeks persepsi korupsi yang menjadi bahan evaluasi dalam hal ini.

Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan indikator substansial yang tidak kalah penting. Demokrasi yang berhasil harus mampu menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan perlindungan bagi kelompok minoritas. Laporan dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch kerap digunakan untuk menilai bagaimana sebuah negara menghormati dan menegakkan HAM. Negara demokrasi yang baik harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Keberhasilan demokrasi juga dilihat dari kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Demokrasi tidak hanya soal proses politik, tetapi juga soal keadilan dan pemerataan dalam aspek kehidupan. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang diterbitkan oleh *United Nations*

Development Programme (UNDP) dapat menjadi indikator bagaimana sistem demokrasi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga negara. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Gini Index, juga menjadi ukuran penting. Demokrasi yang berhasil seharusnya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

D. Kaitan antara Partisipasi dan Kualitas Demokrasi

1. Partisipasi Politik sebagai Fondasi Demokrasi Substantif

Partisipasi politik bukan hanya simbol demokrasi, tetapi merupakan fondasi yang menentukan kualitas dari sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dibangun melalui prosedur pemilu yang rutin dan institusi formal yang mapan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik. Menurut Dahl (1989), demokrasi yang berkualitas ditandai dengan adanya "polyarchy" atau pluralisme politik, yang salah satu cirinya adalah partisipasi luas dan setara dari warga negara. Partisipasi inilah yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah dan menjamin bahwa proses politik tidak dikuasai oleh segelintir elite saja.

Pada konteks ini, partisipasi politik dipandang sebagai mekanisme distribusi kekuasaan secara horizontal. Warga negara berperan tidak hanya dalam pemilihan pejabat publik, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan, mengontrol pelaksanaan program, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Fung dan Wright (2003) dalam konsep "democratic deepening", yang menekankan pentingnya pelibatan publik dalam setiap tahap tata kelola pemerintahan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, menantang dominasi oligarki, dan memperjuangkan keadilan sosial. Oleh karena itu, tingginya tingkat partisipasi politik menjadi indikator langsung atas kualitas demokrasi suatu negara.

Tidak semua bentuk partisipasi menghasilkan peningkatan kualitas demokrasi. Partisipasi yang bersifat instrumental, seperti mobilisasi untuk kepentingan elite, politik uang, atau manipulasi etnis dan agama dalam pemilu, justru dapat merusak sendi-sendi demokrasi (Schedler, 2002). Demokrasi yang baik menuntut partisipasi yang

bermakna (*meaningful participation*), yaitu yang dilandasi oleh kesadaran politik, informasi yang memadai, dan tujuan yang berorientasi pada kepentingan publik. Partisipasi seperti ini hanya dapat dibangun melalui pendidikan politik yang konsisten, kebebasan berpendapat, dan ruang publik yang terbuka.

Di negara-negara dengan demokrasi mapan, seperti negara-negara Skandinavia, tingkat partisipasi politik yang tinggi tidak hanya terlihat dalam pemilu, tetapi juga dalam aktivitas keseharian seperti musyawarah warga, keterlibatan dalam organisasi sipil, dan partisipasi dalam pengawasan publik. Keadaan ini berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, efektivitas kebijakan, dan stabilitas politik (Norris, 2011). Sebaliknya, negara-negara dengan partisipasi yang rendah cenderung menghadapi tantangan berupa krisis legitimasi, apatisme politik, dan meningkatnya populisme anti-demokrasi.

2. Kualitas Demokrasi Indonesia dan Tantangan Partisipasi Bermakna

Di Indonesia, meskipun transisi demokrasi telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak Reformasi 1998, kualitas demokrasi masih menghadapi sejumlah persoalan serius, salah satunya adalah rendahnya kualitas partisipasi politik. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam laporan Democracy Index 2023, Indonesia menempati peringkat 54 dari 167 negara, dengan skor 6,71 dan masuk dalam kategori "*flawed democracy*". Salah satu komponen yang mendapat penilaian rendah adalah partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur elektoral telah berjalan dengan baik, namun esensi partisipasi yang kritis dan deliberatif masih kurang berkembang.

Fenomena partisipasi dalam pemilu yang tinggi kerap dijadikan indikator keberhasilan demokrasi di Indonesia. Padahal, partisipasi seperti ini tidak selalu mencerminkan kedewasaan politik warga. Survei LSI (2022) menunjukkan bahwa sekitar 70% pemilih tidak mengetahui secara mendalam visi dan program calon yang dipilih. Lebih dari 40% mengaku memilih berdasarkan popularitas atau kedekatan emosional. Ini menandakan adanya defisit dalam literasi politik yang pada akhirnya melemahkan kemampuan warga untuk membuat keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab.

Demokrasi Indonesia juga dibayangi oleh praktik politik transaksional dan patronase yang kental. Politik uang menjadi fenomena yang mengakar, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks ini, partisipasi warga lebih sering dimobilisasi oleh kepentingan jangka pendek dan pragmatis, bukan oleh kesadaran kritis sebagai warga negara. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019), struktur patronase yang kuat di banyak daerah membuat partisipasi politik terjebak dalam logika "*vote buying*" dan balas jasa. Keadaan ini menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi prosedural, bukan substantif.

Ruang sipil (*civic space*) yang semestinya menjadi arena utama partisipasi juga mengalami pembatasan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks kebebasan sipil dari Freedom House (2023) menunjukkan penurunan skor Indonesia akibat maraknya penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik, pembubaran aksi unjuk rasa damai, dan pelemahan peran LSM. Dalam situasi seperti ini, warga menjadi ragu untuk berpartisipasi aktif karena khawatir akan mendapat represi. Ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul sebagai hak dasar warga negara.

Semua indikator menunjukkan tren negatif. Munculnya gerakan sosial berbasis digital seperti ReformasiDikorupsi dan GejayanMemanggil menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mencari bentuk partisipasi alternatif yang lebih langsung dan bersifat horizontal. Ini merupakan potensi besar bagi perbaikan kualitas demokrasi di masa depan, asalkan disertai dengan upaya institusional untuk merangkul dan mendukung partisipasi semacam ini secara legal dan inklusif.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, diperlukan strategi peningkatan kualitas partisipasi. Pertama, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperluas pendidikan politik, terutama di kalangan pemilih muda. Kedua, partai politik harus melakukan reformasi internal agar lebih demokratis, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi warga. Ketiga, kebebasan sipil harus dijaga dengan merevisi regulasi yang represif dan membuka ruang publik yang sehat untuk diskusi politik. Dan terakhir, sistem pemilu harus dievaluasi agar tidak lagi mendorong politik biaya tinggi yang menghasilkan elite yang tidak akuntabel.

Demokrasi yang berkualitas bukanlah hasil dari prosedur elektoral semata, melainkan dari partisipasi warga negara yang aktif,

kritis, dan bertanggung jawab. Ketika partisipasi hanya sebatas memilih setiap lima tahun tanpa keterlibatan dalam proses antara pemilu, maka demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen bangsa – negara, partai, masyarakat sipil, dan warga – untuk secara kolektif menciptakan ekosistem demokrasi yang mendorong partisipasi bermakna sebagai pondasi bagi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

BAB III
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan instrumen politik utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, yang sejak awal kemerdekaan telah mengalami evolusi signifikan dalam sistem, mekanisme, dan partisipasinya. Pemilu pertama tahun 1955 menandai tonggak demokrasi elektoral dengan pelaksanaan yang relatif bebas dan kompetitif, menghasilkan Konstituante dan DPR yang mencerminkan keragaman politik nasional saat itu. Namun, masa Orde Lama dan Orde Baru membawa perubahan drastis: dari demokrasi terpimpin hingga sentralisasi kekuasaan dengan pemilu yang bersifat seremonial, didominasi Golkar dan dikontrol militer. Reformasi 1998 membuka jalan menuju demokratisasi sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilu yang lebih bebas, jujur, dan adil. Sejak 1999, pemilu di Indonesia mengalami transformasi struktural dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka, dari pemilihan tak langsung menjadi langsung untuk presiden dan kepala daerah. Lembaga penyelenggara pemilu pun berubah menjadi independen melalui pembentukan KPU. Era pascareformasi juga mencatat tingginya frekuensi pemilu, meningkatnya partisipasi, serta kompleksitas tata kelola pemilu akibat fragmentasi partai dan teknologi digital. Sejarah pemilu Indonesia mencerminkan dinamika antara kekuasaan dan aspirasi rakyat, antara stabilitas politik dan ekspresi demokrasi, yang terus membentuk wajah politik nasional hingga hari ini.

A. Pemilu era Orde Lama dan Orde Baru

1. Pemilu pada Masa Orde Lama (1945–1966): Demokrasi Terpimpin dan Tantangan Politik

Era Orde Lama di Indonesia, yang berlangsung sejak kemerdekaan hingga sekitar tahun 1966, merupakan masa yang penuh dinamika dan kompleks dalam perjalanan politik bangsa. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam membangun sistem demokrasi yang kokoh, dengan berbagai kelompok politik yang berusaha mencari posisi dan pengaruh di tengah situasi nasional yang baru dan masih rentan. Salah satu pencapaian penting pada masa ini adalah terselenggaranya pemilu pertama pada tahun 1955, yang menjadi tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis di kawasan Asia Tenggara pada masa itu, karena mampu menghadirkan wakil rakyat dari beragam partai politik, termasuk Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), serta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki pengaruh besar dalam lanskap politik nasional (Mietzner, 2014).

Pemilu 1955 tidak hanya sekadar mekanisme untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga menjadi medan pertarungan ideologi yang sangat sengit antara berbagai kelompok politik yang memiliki visi dan misi berbeda. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada saat itu tengah mencari jati diri dan sistem politik yang tepat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini menyebabkan persaingan antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis menjadi semakin tajam, sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik yang signifikan. Pergantian kabinet yang terjadi secara sering dan ketidakmampuan parlemen untuk menciptakan pemerintahan yang stabil menjadi bukti nyata dari lemahnya sistem demokrasi parlementer pada masa itu (Ricklefs, 2008).

Ketidakstabilan politik yang terus berlanjut pada masa demokrasi parlementer tersebut menjadi salah satu faktor utama yang kemudian mengarah pada runtuhnya sistem tersebut. Presiden Soekarno pada awal 1960-an mengusung konsep “Demokrasi Terpimpin” sebagai jawaban atas krisis politik dan ketidakmampuan parlemen dalam mengelola negara. Demokrasi Terpimpin menandai pergeseran besar dalam tata kelola politik Indonesia, di mana kekuasaan mulai terkonsentrasi pada

presiden dan peran parlemen serta partai politik menjadi sangat terbatas. Sistem ini secara praktis menghapus mekanisme demokrasi elektoral yang sehat dan kompetitif, menggantikannya dengan politik otoriter yang mengutamakan konsolidasi kekuasaan di tangan Soekarno (Mietzner, 2014).

Pada Demokrasi Terpimpin, Soekarno menggunakan berbagai instrumen negara untuk mengendalikan politik nasional. Parlemen dibekukan, dan banyak partai politik yang dilarang atau dibatasi aktivitasnya. Pemilu formal yang sebelumnya menjadi sarana partisipasi politik rakyat tidak lagi diselenggarakan, sehingga ruang demokrasi elektoral tertutup. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pengembangan sistem demokrasi, dan justru memperkuat kekuasaan presiden yang semakin otoriter. Situasi ini membawa konsekuensi buruk bagi pembangunan demokrasi Indonesia, di mana kebebasan politik semakin terkikis dan institusi demokrasi menjadi lemah.

Konsekuensi dari penerapan Demokrasi Terpimpin terlihat jelas dalam melemahnya lembaga-lembaga demokrasi serta meningkatnya ketegangan politik di berbagai sektor masyarakat. Politik yang terpusat dan otoriter memicu perlawanan dari berbagai kelompok yang merasa hak politiknya diabaikan. Ketegangan politik yang semakin tinggi ini kemudian berujung pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa tersebut menandai klimaks dari konflik ideologi dan persaingan politik yang selama ini berlangsung secara tersembunyi dan intens.

G30S/PKI menjadi peristiwa yang sangat menentukan masa depan politik Indonesia. Setelah peristiwa ini, rezim Orde Lama runtuh dan digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru mengambil langkah tegas untuk menata ulang sistem politik Indonesia dengan menegakkan stabilitas politik yang ketat, namun dengan cara yang lebih otoriter dan terstruktur. Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru menjadi babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang penuh tantangan dan kontradiksi.

Masa Orde Lama, dengan segala ketidakstabilan dan konflik yang ada, sebenarnya merupakan cermin dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya negara yang sangat majemuk. Demokrasi pada masa ini masih dalam tahap konsolidasi dan mengalami berbagai kendala yang

berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi ketegangan ideologi, lemahnya institusi politik, serta tekanan dari dinamika global seperti Perang Dingin yang turut mempengaruhi politik nasional.

Era Orde Lama merupakan masa penting yang menggambarkan perjalanan demokrasi Indonesia yang masih sangat muda dan rentan. Meskipun pemilu 1955 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggelar proses demokrasi yang relatif sukses, ketidakstabilan politik dan munculnya Demokrasi Terpimpin menandai kemunduran dalam praktik demokrasi elektoral. Namun demikian, pengalaman-pengalaman pada masa ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang lebih stabil dan berkelanjutan pada masa-masa berikutnya. Sejarah Orde Lama menjadi refleksi penting dalam memahami dinamika demokrasi Indonesia yang kompleks dan terus berkembang (Ricklefs, 2008; Mietzner, 2014).

2. Pemilu pada Masa Orde Baru (1966–1998): Demokrasi Terbatas dan Rezim Otoriter

Masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia yang berbeda signifikan dibandingkan dengan era Orde Lama. Pada masa ini, negara Indonesia memasuki periode stabilitas politik yang lebih terstruktur, namun dengan harga yang harus dibayar dalam bentuk demokrasi yang sangat terbatas. Rezim Orde Baru dikenal dengan sistem demokrasi terbatas yang lebih mengedepankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi daripada kebebasan politik yang liberal dan kompetitif. Dalam konteks ini, pemilu tetap menjadi bagian dari proses politik, tetapi fungsi dan maknanya jauh berbeda dibandingkan masa demokrasi parlementer sebelumnya (Heryanto, 2006).

Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan secara rutin dengan interval lima tahun, mulai dari tahun 1971 hingga 1997. Namun, meskipun secara prosedural pemilu tetap berlangsung, substansi demokrasi yang sesungguhnya, seperti kebebasan memilih dan persaingan politik yang sehat, sangat dikendalikan dan dibatasi oleh rezim. Pemilu lebih berfungsi sebagai alat legitimasi bagi rezim Soeharto untuk menunjukkan citra demokrasi yang berjalan, sementara kenyataannya kekuasaan politik sangat terkonsentrasi dan dikontrol

dengan ketat. Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara berkala itu tidak menggambarkan persaingan politik yang bebas, melainkan sebuah ritual yang terstruktur untuk memastikan kemenangan rezim (Mietzner, 2009).

Salah satu ciri utama pemilu pada masa Orde Baru adalah dominasi mutlak Golongan Karya (Golkar) sebagai partai penguasa. Golkar bukanlah partai politik tradisional yang berakar dari basis massa tertentu, melainkan sebuah organisasi fungsional yang didukung penuh oleh birokrasi dan aparat negara. Keberhasilan Golkar dalam memenangkan pemilu dengan suara besar secara konsisten merupakan hasil dari intervensi rezim yang sistematis, mulai dari manipulasi administrasi pemilu, pembatasan partai oposisi, hingga penggunaan kekuatan aparat keamanan untuk mengintimidasi dan mengawasi proses pemilu. Golkar berhasil meraih suara mayoritas yang sangat besar, seringkali mencapai lebih dari 60% suara nasional dalam setiap pemilu (Mietzner, 2009).

Rezim Orde Baru juga melakukan pembatasan ketat terhadap partai politik oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini dibatasi ruang geraknya, mengalami pengawasan ketat, dan seringkali mengalami tekanan politik yang bertujuan melemahkan daya saing dalam kontestasi politik. Kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, dan akses media bagi oposisi sangat dibatasi. Media massa cenderung dikontrol untuk mendukung rezim, sementara laporan-laporan independen menunjukkan adanya kecurangan, intimidasi terhadap pemilih, dan praktik-praktik manipulatif selama pelaksanaan pemilu (Aspinall, 2005).

Meskipun pemilu Orde Baru sangat dikontrol dan cenderung represif, peran pemilu tidak dapat sepenuhnya diabaikan dalam konteks politik rezim tersebut. Pemilu memberikan legitimasi formal bagi Soeharto dan elite penguasa lainnya, sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial yang menjaga stabilitas politik. Dengan menampilkan citra demokrasi yang berjalan, meskipun terbatas, rezim mampu menyeimbangkan kepentingan elite politik dan menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Stabilitas politik ini kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yang signifikan selama masa Orde Baru, terutama pada dekade-dekade awal pemerintahan Soeharto (Mietzner, 2009).

Ketegangan antara kebutuhan stabilitas politik dan tuntutan demokrasi mulai meningkat menjelang akhir masa Orde Baru. Krisis ekonomi Asia pada 1997-1998 yang melanda Indonesia memperparah ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim yang sudah lama mengakar dengan gaya otoriter. Selain dampak ekonomi yang berat, muncul tuntutan reformasi politik yang semakin kuat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, tokoh politik, dan masyarakat sipil yang menuntut kebebasan politik, transparansi, dan akuntabilitas. Tekanan-tekanan ini memicu gerakan reformasi yang akhirnya berhasil menggulingkan Soeharto dan membuka jalan bagi era demokrasi yang lebih terbuka (Buehler, 2016).

Gerakan Reformasi 1998 menjadi momentum penting dalam sejarah politik Indonesia yang menandai transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi yang lebih transparan dan kompetitif. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mulai menggelar pemilu yang lebih bebas dan adil, dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan aturan main yang lebih demokratis. Proses demokratisasi ini menjadi fondasi bagi pembangunan sistem politik yang lebih sehat, di mana partai politik oposisi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkompetisi secara fair dan masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

B. Reformasi dan Perubahan Sistem Pemilu

1. Latar Belakang Reformasi dan Dorongan Demokratisasi Pasca-Orde Baru

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia setelah lebih dari tiga dekade rezim Orde Baru yang otoriter. Krisis ekonomi Asia 1997-1998 yang menghantam Indonesia dengan sangat keras menjadi pemicu utama dari gejolak sosial dan politik yang meluas di seluruh negeri. Dampak krisis ini tidak hanya menggerus kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mendalam, memperburuk ketimpangan sosial, serta mengikis legitimasi rezim yang selama ini berkuasa. Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin meluas, sehingga tuntutan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan pemerintahan pun semakin kuat (Mietzner, 2013).

Tuntutan reformasi politik yang muncul pada masa itu menegaskan kebutuhan akan demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat menuntut agar proses politik tidak lagi menjadi alat penguasa untuk memperkuat kekuasaannya sendiri, melainkan sebagai sarana yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Dalam konteks ini, reformasi sistem pemilu menjadi salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius. Pemilu yang selama masa Orde Baru sangat dikontrol dan sarat dengan manipulasi serta intimidasi dipandang perlu dirombak total agar dapat menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar representatif dan berkompetisi secara sehat.

Proses reformasi pemilu dimulai dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 1999. Pembentukan KPU menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena lembaga ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. KPU bertugas memastikan seluruh proses mulai dari pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dilakukan dengan integritas dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Kehadiran KPU memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemilu dapat menjadi sarana demokrasi yang sah dan bermartabat (Buehler, 2016).

Reformasi pemilu tidak hanya menghadirkan perubahan mekanisme teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang lebih mendalam. Sistem pemilu dikembangkan agar memberikan peluang yang lebih adil bagi partai politik dan calon legislatif untuk bersaing, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Kebebasan berpolitik dijamin dengan lebih baik, serta adanya pengawasan ketat terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini menjadikan pemilu sebagai arena persaingan politik yang sehat, dimana keberagaman suara masyarakat dapat diakomodasi dan tercermin secara nyata dalam representasi politik.

Reformasi politik Indonesia juga diikuti dengan perubahan fundamental dalam struktur konstitusional negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap mulai tahun 1999 hingga 2002, yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan menegaskan supremasi hukum sebagai landasan negara. Amandemen ini menjadi fondasi penting bagi penguatan lembaga-

lembaga demokrasi, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Dengan demikian, reformasi pemilu merupakan bagian integral dari transformasi politik yang lebih luas menuju demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

Meskipun reformasi membawa harapan besar, proses demokratisasi yang dijalankan tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Fragmentasi partai politik menjadi salah satu permasalahan utama, di mana munculnya banyak partai baru dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda menyebabkan terjadinya polarisasi dan persaingan yang terkadang tidak sehat. Fragmentasi ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik karena sulitnya membentuk koalisi yang kuat dan berkelanjutan dalam parlemen, sehingga berdampak pada efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Konflik kepentingan juga menjadi tantangan yang tidak ringan dalam proses reformasi pemilu. Elite politik yang memiliki pengaruh kuat sering kali berusaha memanipulasi sistem demi keuntungan politiknya sendiri, meskipun dalam bingkai demokrasi. Praktik-praktik seperti politik uang, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi dalam berbagai tahap pelaksanaan pemilu, yang pada akhirnya mengurangi kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Dinamika sosial yang kompleks, seperti ketegangan antar kelompok etnis dan agama, juga mempengaruhi stabilitas politik dan jalannya proses demokrasi yang sedang dibangun.

Tantangan lain yang dihadapi dalam era Reformasi adalah upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dengan stabilitas nasional. Kebebasan berpendapat dan berkumpul yang semakin meluas kadang menimbulkan gesekan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pemerintah dan lembaga demokrasi harus mampu mengelola keragaman aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban nasional. Hal ini memerlukan strategi kebijakan yang matang dan penegakan hukum yang konsisten agar demokrasi dapat tumbuh secara sehat tanpa menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak.

Latar belakang reformasi dan dorongan demokratisasi pasca-Orde Baru merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim otoriter dan kegagalan sistem politik yang tidak demokratis selama puluhan tahun. Reformasi pemilu menjadi simbol

penting dari upaya Indonesia meninggalkan masa lalu otoritarianisme dan memasuki era baru demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, semangat perubahan dan komitmen masyarakat serta lembaga-lembaga demokrasi memberikan harapan kuat bahwa demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mietzner, 2013; Buehler, 2016; Heryanto, 2011).

2. Perubahan Sistem Pemilu: dari Pemilu Proporsional Tertutup ke Sistem Terbuka dan Demokratis

Perubahan sistem pemilu pasca-Reformasi merupakan salah satu aspek paling menonjol dalam transformasi politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih memilih partai politik dan partai yang menentukan daftar calon legislatifnya. Namun, sejak Reformasi, sistem ini mengalami perubahan signifikan menuju sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang diinginkan dalam sebuah daftar partai (Liddle & Mujani, 2007).

Sistem proporsional terbuka ini memberi kesempatan lebih besar kepada pemilih untuk berperan aktif dalam menentukan wakil, sehingga meningkatkan akuntabilitas calon legislatif terhadap pemilihnya. Selain itu, pemilu langsung untuk presiden dan wakil presiden yang mulai diterapkan sejak 2004 memperkuat legitimasi eksekutif dan memberikan masyarakat peran langsung dalam memilih pemimpin nasional (Buehler, 2016). Selain perubahan sistem pemilu legislatif dan eksekutif, reformasi juga mengubah lembaga penyelenggara pemilu menjadi lebih independen dan profesional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen memastikan transparansi dan integritas proses pemilu, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindak pelanggaran (Mietzner, 2013).

Tantangan dalam pelaksanaan pemilu pasca-Reformasi tetap ada, seperti politik uang, mobilisasi identitas, dan manipulasi media. Fragmentasi partai politik yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif (Liddle & Mujani, 2007). Namun, perubahan sistem pemilu ini tetap merupakan kemajuan besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia, menunjukkan

konsistensi negara ini dalam memperkuat sistem demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan.

C. Tren Partisipasi Pemilu dari Masa Ke Masa

1. Partisipasi Pemilu pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Partisipasi pemilu di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru mencerminkan perjalanan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya yang berkembang pada masing-masing era. Pada masa Orde Lama, khususnya pada Pemilu 1955, partisipasi pemilih menunjukkan angka yang sangat tinggi, mencapai sekitar 91,2%. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat pada saat itu sangat antusias dan bersemangat untuk turut menentukan arah masa depan bangsa setelah perjuangan kemerdekaan. Pemilu 1955 dianggap sebagai tonggak demokrasi pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara relatif bebas dan kompetitif, memberikan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara sehat dan demokratis. Hal ini menjadi bukti bahwa kesadaran politik masyarakat terhadap hak pilihnya sudah cukup tinggi dan partisipasi politik berjalan dengan baik dalam konteks demokrasi parlementer yang sedang dibangun (Liddle, 1999).

Kondisi politik pada masa Orde Lama memang masih penuh dengan tantangan, terutama terkait dengan ketidakstabilan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu tetap mencerminkan harapan besar terhadap demokrasi dan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan. Pemilu 1955 tidak hanya menjadi ajang pemilihan wakil rakyat, tetapi juga sebagai manifestasi dari aspirasi rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat yang tinggi juga didukung oleh situasi politik yang memungkinkan kompetisi antar partai dan kebebasan berpolitik relatif terbuka, sehingga partisipasi menjadi lebih bermakna dan mendalam.

Situasi ini mulai berubah ketika memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966, yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam pola penyelenggaraan pemilu dan sistem politik Indonesia. Selama Orde Baru, partisipasi pemilih secara kuantitatif tetap tinggi, dengan angka partisipasi yang konsisten berada dalam rentang 75 hingga 85 persen pada setiap pemilu yang diselenggarakan, mulai dari pemilu pertama

pada tahun 1971 hingga pemilu terakhir pada 1997 (Mietzner, 2009). Secara formal, angka partisipasi yang tinggi ini memberi kesan bahwa masyarakat tetap terlibat aktif dalam proses politik, namun jika dilihat lebih dalam, kualitas partisipasi tersebut mulai dipertanyakan.

Kualitas partisipasi pada masa Orde Baru berbeda jauh dengan masa Orde Lama karena pemilu menjadi instrumen bagi rezim otoriter Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Partisipasi pemilih tidak lagi dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi, melainkan lebih banyak didorong oleh mekanisme kontrol dan mobilisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan birokrasi negara. Aparat desa, lurah, dan berbagai instansi pemerintah mengarahkan masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan suara, sehingga partisipasi tersebut lebih bersifat administratif dan formal daripada partisipasi politik yang genuine. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa harus memilih sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh keadaan, bukan sebagai ekspresi kebebasan politik.

Sistem politik yang dibangun Orde Baru sangat menguntungkan partai pemerintah Golongan Karya (Golkar), yang bukan merupakan partai politik konvensional, melainkan organisasi fungsional yang memiliki akses penuh terhadap birokrasi dan aparat negara. Golkar selalu meraih kemenangan besar dalam setiap pemilu yang digelar, berkat pengaturan yang rapi dan dukungan kuat dari kekuasaan pusat. Sementara itu, partai-partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibatasi ruang geraknya, mengalami berbagai bentuk tekanan politik dan pengawasan ketat. Kondisi ini semakin mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik yang tidak dianggap fair atau kompetitif.

Menjelang akhir masa Orde Baru pada akhir 1990-an, legitimasi rezim mulai runtuh di tengah krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan gelombang tuntutan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik dan kualitas pemilu yang dianggap manipulatif semakin meningkat. Akibatnya, tingkat partisipasi mulai menurun, mencerminkan sikap apatisme dan kekecewaan masyarakat terhadap proses politik yang selama ini hanya dijadikan alat oleh rezim otoriter. Meskipun demikian, pemilu tetap menjadi simbol penting bagi masyarakat yang ingin menunjukkan

keterlibatan dalam proses politik, walaupun keterlibatan tersebut masih sangat dibatasi oleh rezim yang berkuasa (Aspinall, 2005).

Fenomena partisipasi pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa angka kehadiran pemilih tidak selalu mencerminkan kualitas demokrasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang tinggi bisa saja merupakan hasil dari tekanan politik, mobilisasi aparat, atau kewajiban administratif, bukanlah cerminan dari kesadaran politik atau komitmen demokrasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi politik pada masa ini lebih tepat dipahami sebagai mobilisasi politik yang dikendalikan oleh rezim, bukan partisipasi politik yang tulus dan aktif dari masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya memerlukan kehadiran fisik dalam pemilu, tetapi juga perlu didukung oleh kebebasan berpolitik, persaingan yang sehat, dan partisipasi yang bermakna.

Dengan demikian, perjalanan partisipasi pemilu di Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru menunjukkan bahwa perubahan angka partisipasi pemilih sangat terkait dengan kualitas demokrasi dan kebebasan politik yang ada pada tiap era. Pemilu 1955 menampilkan partisipasi yang tidak hanya tinggi secara kuantitatif tetapi juga berkualitas, sedangkan masa Orde Baru menunjukkan partisipasi yang tinggi secara angka, tetapi terdistorsi oleh kontrol rezim dan manipulasi politik. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini menjadi penting dalam upaya memperkuat demokrasi Indonesia di masa pasca-Orde Baru dan menjadikan partisipasi politik sebagai cerminan nyata dari kebebasan dan kedaulatan rakyat dalam menentukan masa depan bangsa.

2. Partisipasi Pemilu Pasca-Reformasi dan Dinamika Modern

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama dalam hal partisipasi pemilu. Pemilu 1999 menjadi momentum bersejarah karena menjadi pemilu demokratis pertama setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang otoriter. Pada pemilu ini, partisipasi pemilih mencapai sekitar 90%, yang menunjukkan antusiasme dan harapan besar masyarakat terhadap sistem politik yang baru dan lebih demokratis (Buehler, 2016). Tingginya partisipasi ini juga mencerminkan kebebasan berpolitik yang mulai dirasakan oleh rakyat, setelah bertahun-tahun mengalami represi dan pembatasan kebebasan berpendapat selama masa Orde Baru. Pemilu

1999 bukan hanya sebuah proses politik, tetapi juga simbol kebangkitan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan terbuka.

Kesadaran politik masyarakat meningkat seiring dengan munculnya berbagai partai politik baru dan lebih banyaknya ruang bagi kebebasan berpolitik. Pemilu ini memberikan peluang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara lebih luas. Partisipasi yang tinggi tersebut menjadi indikasi bahwa masyarakat merasakan pemilu sebagai mekanisme efektif untuk menentukan masa depan bangsa dan memperjuangkan hak-hak politiknya. Namun, di balik euforia tersebut, muncul tantangan dalam proses demokratisasi, termasuk fragmen partai yang sangat banyak dan kurangnya pengalaman dalam sistem demokrasi yang baru, yang kemudian memunculkan dinamika politik yang kompleks.

Tren partisipasi pemilu mulai menunjukkan fluktuasi pada pemilu-pemilu berikutnya, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Kedua pemilu ini mengalami penurunan tingkat partisipasi menjadi sekitar 70-75%, yang mengindikasikan adanya tantangan baru dalam menjaga antusiasme dan keterlibatan pemilih (Mietzner, 2013). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk munculnya apatisme politik di kalangan pemilih, khususnya di kalangan generasi muda dan warga perkotaan yang mulai menunjukkan sikap skeptis terhadap partai politik dan sistem politik secara keseluruhan. Kepercayaan terhadap partai politik dan elit politik menurun akibat kasus korupsi dan praktik politik uang yang masih merajalela, sehingga masyarakat mulai merasa bahwa suaranya tidak terlalu berpengaruh.

Fenomena apatisme politik ini menjadi peringatan penting bagi sistem demokrasi Indonesia bahwa kehadiran fisik di TPS saja tidak cukup untuk memastikan demokrasi yang sehat. Masyarakat yang secara formal hadir tetapi tidak memiliki kesadaran atau keinginan untuk benar-benar berpartisipasi aktif dalam proses politik akan berdampak negatif pada kualitas demokrasi. Selain itu, praktik politik uang yang masih menjadi masalah serius juga menurunkan motivasi pemilih untuk datang ke TPS dengan sukarela dan berdasarkan kesadaran politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga integritas dan transparansi dalam proses politik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pada pemilu-pemilu berikutnya, seperti Pemilu 2014 dan 2019, pemerintah dan lembaga

penyelenggara pemilu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai cara. Pendidikan pemilih menjadi fokus utama dengan upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak pilih dan dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Kampanye anti-politik uang juga gencar dilakukan, termasuk penindakan terhadap praktik-praktik curang dalam pemilu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Upaya ini didukung oleh penguatan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, yang semakin independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya (Hidayat, 2020).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mulai memberikan dampak signifikan terhadap dinamika partisipasi politik. Generasi milenial, yang merupakan kelompok demografis besar di Indonesia, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh informasi politik, berinteraksi dengan kandidat dan partai politik, serta menyuarakan pendapatnya. Media sosial menjadi alat penting dalam mobilisasi pemilih, kampanye politik, dan pengawasan pemilu. Hal ini membuka peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih luas dan dinamis, tetapi juga menghadirkan tantangan terkait disinformasi dan polarisasi politik yang dapat mempengaruhi kualitas partisipasi.

Tren partisipasi pemilu Indonesia pada era Reformasi menunjukkan pola yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang pada tiap periode. Meskipun terdapat fluktuasi dan berbagai tantangan, kesadaran politik masyarakat dan partisipasi pemilih tetap menjadi pilar utama dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Partisipasi politik yang aktif dan bermakna adalah indikator penting dari kedewasaan demokrasi yang mampu menjamin hak dan suara rakyat dalam menentukan masa depan bangsa.

Pada konteks ini, penting untuk terus mengembangkan mekanisme yang mendorong partisipasi politik yang berkualitas, seperti peningkatan literasi politik, penguatan lembaga demokrasi, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan juga menjadi kunci untuk membentuk warga negara yang tidak hanya hadir secara fisik dalam pemilu, tetapi juga memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan

semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Peran generasi muda sangat krusial dalam proses ini, karena adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, pemberdayaan dan partisipasi generasi muda dalam proses politik harus menjadi prioritas, agar tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku aktif dalam menentukan arah pembangunan politik dan sosial Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi, potensi generasi muda untuk berkontribusi dalam demokrasi semakin besar, asalkan didukung oleh lingkungan yang kondusif dan pendidikan politik yang memadai.

BAB IV
INDEKS PARTISIPASI PEMILU DI INDONESIA

Indeks partisipasi pemilu merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi dalam pemilu bukan hanya soal kehadiran fisik untuk memberikan suara, melainkan juga mencakup kesadaran politik, pengetahuan, serta motivasi untuk berkontribusi dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik. Tingginya indeks partisipasi pemilu sering kali diartikan sebagai tanda sehatnya demokrasi, menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam proses politik serta memiliki kepercayaan terhadap sistem pemilu dan lembaga penyelenggara. Sebaliknya, rendahnya partisipasi bisa menjadi pertanda adanya masalah seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau hambatan struktural yang menghalangi akses masyarakat terhadap proses politik. Di Indonesia, indeks partisipasi pemilu telah mengalami dinamika yang cukup signifikan seiring dengan perjalanan sejarah politik negara ini, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik turut mempengaruhi fluktuasi partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Oleh karena itu, memahami indeks partisipasi pemilu secara komprehensif penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan keterlibatan politik warga negara secara berkelanjutan dan inklusif.

A. Definisi dan Indikator Indeks Partisipasi

1. Definisi Indeks Partisipasi dalam Konteks Pemilu

Indeks partisipasi pemilu merupakan konsep sentral dalam studi ilmu politik dan demokrasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. Sebagai ukuran kuantitatif, indeks ini tidak hanya sekadar menghitung jumlah warga negara yang hadir dan menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara, tetapi juga berupaya menggambarkan partisipasi politik secara lebih luas. Hal ini penting karena partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan individu dalam kehidupan politik, seperti mengikuti kampanye, berdiskusi mengenai isu-isu politik, serta melakukan berbagai aksi atau kegiatan yang bertujuan mempengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, indeks partisipasi pemilu berperan sebagai cermin dari kesehatan sistem demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang ada (Verba, Schlozman, & Brady, 1995).

Partisipasi pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling dasar dan paling langsung, karena menggunakan hak suara merupakan cara paling konkret warga negara untuk mengekspresikan pilihan politiknya dalam sistem perwakilan demokratis. Menurut Norris (2002), partisipasi ini menggambarkan hubungan antara warga negara dengan negara, di mana tingkat partisipasi yang tinggi menandakan adanya kepercayaan dan legitimasi yang kuat terhadap institusi politik dan pemerintahan. Dengan kata lain, ketika masyarakat merasa sistem politik dapat dipercaya dan mewakili kepentingan, cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi pemilu sering kali menjadi indikator adanya alienasi politik, ketidakpuasan, atau bahkan rasa apatis yang mengakar terhadap proses dan pelaku politik (Putnam, 2000).

Pengukuran indeks partisipasi pemilu pada dasarnya adalah sebuah refleksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi. Lipset (1960) dalam teorinya tentang modernisasi politik menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan ia untuk terlibat aktif dalam politik, termasuk dalam proses pemilu. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan politik yang lebih baik, tetapi juga membentuk

sikap positif terhadap demokrasi dan kewarganegaraan. Pendapatan yang memadai juga memungkinkan individu memiliki sumber daya dan waktu untuk berpartisipasi.

Faktor akses informasi dan media juga sangat mempengaruhi indeks partisipasi. Masyarakat yang mudah mendapatkan informasi mengenai pemilu, kandidat, dan isu politik cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Media massa dan media sosial berperan besar dalam menyediakan ruang diskusi politik yang dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik warga negara. Namun, akses informasi yang tidak merata juga menjadi tantangan dalam memastikan partisipasi yang inklusif. Kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau tinggal di daerah terpencil sering mengalami keterbatasan informasi, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasinya dalam pemilu.

Kondisi politik dan budaya di suatu negara atau wilayah juga berpengaruh besar terhadap indeks partisipasi. Dalam konteks negara demokrasi yang mapan dengan tradisi politik yang kuat, partisipasi cenderung tinggi karena masyarakat memiliki budaya politik yang mendukung keterlibatan aktif warga negara. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem politik yang otoriter atau transisi demokrasi yang belum stabil, partisipasi pemilu bisa sangat rendah karena ketidakpercayaan, ketakutan, atau tidak adanya pilihan politik yang nyata. Budaya politik yang demokratis memupuk rasa tanggung jawab warga negara untuk terlibat dalam proses politik sebagai bagian dari hak dan kewajibannya.

Pengukuran indeks partisipasi tidak hanya relevan untuk memantau kesehatan demokrasi, tetapi juga menjadi alat penting bagi para pembuat kebijakan dan peneliti dalam menganalisis dinamika politik. Dengan memahami pola dan tingkat partisipasi, dapat mengidentifikasi hambatan yang menghalangi keterlibatan masyarakat serta merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi politik. Misalnya, jika partisipasi rendah disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, maka program literasi politik bisa dikembangkan. Jika disebabkan oleh ketidakpercayaan pada proses pemilu, maka upaya transparansi dan reformasi institusi perlu diperkuat.

Indeks partisipasi pemilu juga menjadi indikator legitimasi bagi pemerintahan yang terpilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat legitimasi politik yang diperoleh oleh pemimpin terpilih karena dianggap mewakili suara mayoritas rakyat. Legitimasi ini sangat penting

untuk menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai mandat politik pemerintah dan meningkatkan risiko ketidakstabilan politik serta konflik sosial.

Indeks partisipasi dalam konteks pemilu tidak selalu mencerminkan kualitas partisipasi politik secara keseluruhan. Kehadiran fisik di tempat pemungutan suara belum tentu diikuti dengan kesadaran politik yang tinggi atau pemahaman mendalam mengenai pilihan yang dibuat. Oleh karena itu, indeks partisipasi harus dilengkapi dengan indikator lain yang mengukur kualitas partisipasi, seperti tingkat pengetahuan politik, keterlibatan dalam diskusi politik, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil.

2. Indikator Utama dalam Mengukur Indeks Partisipasi Pemilu

Indikator-indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks partisipasi pemilu mencerminkan berbagai aspek keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Indikator yang paling sering dipakai dan menjadi tolok ukur utama adalah tingkat partisipasi pemilih atau voter turnout, yaitu persentase warga negara yang benar-benar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Indikator ini menjadi sangat penting karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk langsung menggambarkan seberapa banyak warga yang berpartisipasi dalam proses demokrasi formal. Data voter turnout biasanya mudah diperoleh dan secara historis sering menjadi fokus utama dalam analisis partisipasi pemilu (IDEA, 2018). Keberadaan indikator ini memberi gambaran dasar mengenai seberapa efektif sistem demokrasi dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran di tempat pemungutan suara. Berbagai studi menunjukkan bahwa untuk mendapatkan gambaran partisipasi politik yang lebih komprehensif dan mendalam, perlu diukur pula aktivitas politik lain di luar pemungutan suara. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menekankan pentingnya indikator tambahan yang mengukur keaktifan warga dalam kampanye politik, seperti keikutsertaan dalam rapat umum, diskusi politik, penyebaran informasi politik, serta keanggotaan dalam partai atau organisasi politik. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan dimensi partisipasi politik yang lebih luas dan mencerminkan tingkat keterlibatan

warga secara lebih intens dan berkelanjutan dibandingkan hanya datang ke TPS.

Sejalan dengan itu, munculnya konsep indeks partisipasi politik yang menggabungkan beberapa variabel menjadi indikator yang lebih kompleks. Dalton (2008) mengembangkan konsep Political Activity Participation Index yang mengukur berbagai aktivitas politik formal dan informal yang dilakukan oleh warga negara. Indeks ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana warga berkontribusi terhadap proses demokrasi, termasuk partisipasi non-formal yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pengukuran tradisional. Pendekatan ini dianggap lebih akurat dalam merefleksikan kekayaan dan keberagaman bentuk partisipasi politik dalam masyarakat modern.

Kualitas partisipasi politik juga semakin diakui sebagai indikator penting dalam menilai indeks partisipasi. Norris (2002) membahas bahwa selain berapa banyak yang berpartisipasi, kualitas partisipasi seperti tingkat pengetahuan pemilih tentang proses dan kandidat, motivasi untuk memilih, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan pemilu juga harus diperhitungkan. Indikator-indikator ini membantu memahami apakah partisipasi yang terjadi benar-benar didasarkan pada kesadaran politik dan tanggung jawab sebagai warga negara, atau sekadar formalitas tanpa pemahaman yang cukup. Kualitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan partisipasi berkontribusi positif terhadap legitimasi politik.

Pentingnya pengukuran kualitas partisipasi ini membuka ruang untuk melihat partisipasi tidak hanya dari sudut kuantitatif, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosiologis. Motivasi memilih, misalnya, bisa berkaitan dengan rasa kepercayaan pada sistem politik atau keyakinan bahwa suaranya akan berdampak pada perubahan. Sementara tingkat kepuasan terhadap proses pemilu seringkali mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus berpartisipasi di masa depan. Dengan demikian, indikator kualitas partisipasi memberikan gambaran lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi politik yang sesungguhnya.

Penggunaan beragam indikator ini juga memberikan manfaat besar bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Misalnya, jika data menunjukkan rendahnya partisipasi dalam diskusi politik atau kegiatan kampanye, maka program peningkatan literasi

politik dan keterlibatan masyarakat bisa menjadi fokus utama. Jika indikator kepuasan terhadap proses pemilu rendah, reformasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemilu menjadi prioritas. Dengan demikian, data dari berbagai indikator ini menjadi alat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan berkualitas.

Indeks partisipasi yang menyeluruh juga mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks dan multidimensional. Partisipasi politik dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, budaya politik, tingkat pendidikan, serta akses informasi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengukuran indikator-indikator partisipasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik setempat agar hasilnya lebih akurat dan relevan. Ini menjadikan indeks partisipasi tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan representasi nyata dari hubungan warga negara dengan sistem politik.

B. Data Partisipasi Pemilu Legislatif dan Presiden

1. Data Partisipasi Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi nasional yang mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih wakil di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif mengalami dinamika yang beragam, yang tidak hanya mencerminkan perkembangan politik, tetapi juga situasi sosial dan ekonomi yang ada pada setiap periode. Pemilu legislatif 1955 menjadi salah satu contoh paling bersejarah, dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, mencapai sekitar 91,2%. Angka ini menunjukkan antusiasme dan optimisme masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan untuk turut serta menentukan arah masa depan bangsa (Liddle, 1999). Momen ini dianggap sebagai puncak partisipasi politik yang ideal, di mana sistem demokrasi berjalan relatif bebas dan kompetitif.

Memasuki masa Orde Baru, angka partisipasi pemilu legislatif secara kuantitatif memang tetap tinggi, berada pada kisaran 75-85%. Namun, meskipun angka partisipasi tampak besar, kualitas partisipasi mulai dipertanyakan karena pemilu tersebut didominasi oleh satu partai, yaitu Golkar, dan adanya kontrol yang ketat dari rezim otoriter. Pemilu

lebih berfungsi sebagai alat legitimasi bagi pemerintah, bukan sebagai cermin partisipasi politik yang demokratis dan bebas. Mekanisme pemilu pada masa ini cenderung diwarnai oleh tekanan birokrasi dan aparat pemerintah untuk memastikan kehadiran pemilih, yang tidak selalu mencerminkan kesadaran politik atau pilihan bebas masyarakat (Mietzner, 2009). Dengan demikian, walaupun tingkat partisipasi tinggi secara statistik, substansi demokrasi dan partisipasi politik yang bermakna menjadi terbatas.

Reformasi pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan pada landscape politik Indonesia, termasuk dalam hal partisipasi pemilu legislatif. Pemilu legislatif pertama pada era Reformasi tahun 1999 mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi, sekitar 90,1%, menandakan kebangkitan kesadaran dan antusiasme politik masyarakat setelah puluhan tahun dibawah rezim otoriter. Pada masa ini, pemilu berlangsung dalam suasana yang lebih demokratis dan kompetitif, di mana muncul berbagai partai politik baru yang mewakili spektrum ideologi dan kepentingan yang lebih luas (Buehler, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa transisi politik berhasil menggerakkan rakyat untuk kembali aktif dalam proses demokrasi dan menggunakan hak pilih sebagai bentuk keterlibatan politik yang lebih genuine.

Pada beberapa pemilu legislatif berikutnya, partisipasi pemilih menunjukkan tren penurunan. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009, tingkat partisipasi berada pada kisaran 70-75%, menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain meningkatnya apatisme politik di kalangan warga, kekecewaan terhadap kinerja partai politik yang dinilai kurang transparan dan penuh praktik korupsi, serta pengaruh negatif dari politik uang dan pragmatisme. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas demokrasi dan mekanisme pemilu dalam merepresentasikan aspirasi rakyat secara nyata (Mietzner, 2013). Penurunan partisipasi ini menjadi perhatian penting bagi pelaku demokrasi untuk mencari solusi agar partisipasi politik dapat kembali meningkat.

Pemilu legislatif terbaru, khususnya pada tahun 2014 dan 2019, memperlihatkan upaya nyata dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui program-program edukasi dan sosialisasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait gencar mengadakan kampanye pendidikan pemilih yang bertujuan

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan cara berpartisipasi secara efektif. Selain itu, pengawasan pemilu juga ditingkatkan untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan. Hasilnya, tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 mencapai 81,97%, menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Indonesia setelah beberapa periode sebelumnya mengalami penurunan (KPU, 2019). Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti maraknya politik identitas dan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi pola partisipasi dan pemilihan masyarakat (Hidayat, 2020).

Data partisipasi pemilu legislatif ini menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memilih wakil rakyat sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial yang berlaku. Pada masa demokrasi awal dan Reformasi, ketika kebebasan berpolitik relatif lebih luas, partisipasi mencapai puncak tertinggi karena masyarakat merasa suaranya benar-benar berarti dan dapat mempengaruhi perubahan. Sebaliknya, pada masa otoriter, meskipun angka partisipasi tinggi, partisipasi tersebut lebih bersifat mekanis dan terkontrol, bukan hasil dari kesadaran politik yang mendalam. Ini menegaskan bahwa angka partisipasi saja tidak cukup untuk menilai kualitas demokrasi tanpa melihat konteks dan substansi di balik angka tersebut.

Fluktuasi partisipasi pemilu legislatif juga dapat dilihat sebagai cermin dari dinamika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemerintahan. Saat masyarakat merasa proses pemilu bebas dan adil, serta partai politik menawarkan alternatif yang kredibel, partisipasi cenderung meningkat. Namun, jika muncul kekecewaan terhadap sistem politik, praktik korupsi, atau manipulasi politik, kepercayaan itu akan menurun dan berpengaruh pada tingkat partisipasi. Oleh karena itu, pemulihan partisipasi yang terjadi pada Pemilu 2019 menunjukkan adanya upaya perbaikan dan reformasi dalam penyelenggaraan pemilu serta peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Data partisipasi pemilu legislatif juga menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan partisipasi politik. Misalnya, peningkatan kualitas pendidikan politik, penegakan hukum terhadap praktik politik uang, serta pemberdayaan masyarakat melalui forum diskusi dan kegiatan sosial politik. Dengan cara ini, diharapkan partisipasi politik tidak hanya sekadar angka kehadiran di TPS, tetapi

juga berkembang menjadi keterlibatan yang lebih aktif dan kritis dalam proses politik secara keseluruhan. Partisipasi seperti ini menjadi fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Data Partisipasi Pemilu Presiden

Pemilu Presiden di Indonesia merupakan puncak dari proses demokrasi elektoral yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih langsung pemimpin tertinggi negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Sejak diselenggarakan secara langsung mulai tahun 2004, pemilu presiden menjadi ajang politik yang sangat menarik perhatian dan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini menandai sebuah lompatan besar dalam demokrasi Indonesia, karena hubungan antara rakyat dan pemimpin negara menjadi lebih langsung dan personal, berbeda dengan sistem sebelumnya di mana presiden dipilih oleh anggota DPR. Oleh karena itu, tingkat partisipasi dalam pemilu presiden menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga dalam proses demokrasi nasional.

Pada Pemilu Presiden pertama secara langsung pada tahun 2004, tingkat partisipasi masyarakat tercatat sangat tinggi, mencapai sekitar 84,1% (Lijphart, 2012). Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang besar dalam menentukan pemimpin secara langsung, sekaligus memberikan legitimasi yang kuat bagi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Partisipasi tinggi ini juga menandakan adanya optimisme besar masyarakat terhadap sistem demokrasi yang baru dijalankan dan keyakinan bahwa suaranya dapat berkontribusi secara signifikan dalam menentukan arah pemerintahan. Momentum ini sangat penting sebagai fondasi bagi pengembangan demokrasi elektoral di Indonesia.

Pada Pemilu Presiden 2009, partisipasi pemilih mengalami penurunan cukup signifikan, menjadi sekitar 70,99% (KPU, 2009). Penurunan ini berkaitan dengan meningkatnya skeptisisme dan apatisme politik yang tumbuh di kalangan masyarakat, terutama karena kekecewaan terhadap partai politik dan praktik politik yang dinilai kurang bersih dan transparan. Selain itu, faktor seperti politik uang dan manipulasi informasi turut mempengaruhi motivasi masyarakat untuk tidak berpartisipasi secara penuh. Meski demikian, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), bersama berbagai lembaga terkait, terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan

melakukan edukasi politik yang lebih masif untuk mengatasi penurunan partisipasi tersebut.

Pada Pemilu Presiden 2014, tingkat partisipasi mengalami sedikit kenaikan menjadi sekitar 69,58% (KPU, 2014), meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan pemilu 2004. Tantangan yang dihadapi pada masa ini termasuk masalah politik uang, kampanye negatif, serta polarisasi politik yang cukup tajam. Namun, tingkat partisipasi yang stabil ini tetap menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki minat untuk berpartisipasi, meskipun dalam kondisi politik yang penuh tantangan. Upaya edukasi dan transparansi pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa partisipasi tersebut tidak hanya kuantitatif tetapi juga bermutu, yakni berdasarkan pemahaman yang baik terhadap kandidat dan isu politik.

Pemilu Presiden 2019 kembali menunjukkan peningkatan partisipasi yang cukup signifikan, mencapai 81,97% (KPU, 2019). Kenaikan ini menandakan semakin kuatnya keinginan dan kesadaran politik masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden secara langsung. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu, penanganan isu politik identitas, serta keterlibatan media dan teknologi informasi yang membantu memperluas akses dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu. Meskipun masih ada tantangan seperti penyebaran hoaks dan kampanye negatif, data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Melihat data partisipasi pemilu presiden tersebut bersama data pemilu legislatif, terlihat bahwa partisipasi pemilih di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, kualitas penyelenggaraan pemilu, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial yang membentuk sikap dan motivasi warga dalam berpolitik. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi juga turut mempengaruhi bagaimana masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi dalam proses politik.

Secara umum, tren partisipasi dalam pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat yang cukup tinggi dalam menjalankan hak politiknya, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Meski demikian, masih ada tantangan besar untuk

meningkatkan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas partisipasi agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Kualitas partisipasi ini mencakup kesadaran politik yang baik, pemahaman tentang calon dan program, serta sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan.

Data partisipasi pemilu presiden menjadi alat penting untuk menilai keberhasilan sistem demokrasi elektoral dan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik. Informasi ini juga menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu dalam merancang strategi edukasi pemilih, memperbaiki mekanisme pemilu, dan memberantas praktik-praktik curang yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, pemilu presiden sebagai puncak demokrasi elektoral di Indonesia akan terus menjadi fokus utama dalam upaya menguatkan partisipasi politik yang inklusif dan bermakna.

C. Perbandingan antar Daerah dan Antar Pemilu

1. Perbandingan Partisipasi Pemilu Antar Daerah di Indonesia

Variasi tingkat partisipasi pemilu antar daerah di Indonesia mencerminkan kompleksitas lanskap sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi motivasi serta kemampuan warga untuk menggunakan hak suaranya. Di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, yang umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan infrastruktur memadai, angka partisipasi cenderung berada di atas rata-rata nasional. Ketersediaan akses informasi politik melalui media massa dan media sosial yang luas, ditambah fasilitas Transportasi dan logistik pemungutan suara yang baik, memudahkan warga untuk hadir dan memberikan suaranya pada hari pemilu . Sebaliknya, di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, keterbatasan jaringan jalan, transportasi, dan sarana komunikasi menyebabkan banyak TPS sulit dijangkau, sehingga partisipasi pemilih menurun dibandingkan wilayah lain.

Komponen ekonomi juga menjadi penentu penting perbedaan antar daerah. Daerah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi umumnya mencatat partisipasi yang lebih besar karena warga memiliki sumber daya waktu, biaya, dan akses informasi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya, di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi,

warga seringkali menghadapi dilema antara bekerja seharian demi penghidupan keluarga atau menghadiri TPS yang berjarak jauh. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan partisipasi antara kelompok ekonomi mapan dan kurang mampu .

Faktor budaya politik juga berperan krusial. Di sejumlah daerah dengan tradisi musyawarah dan keterlibatan masyarakat yang kuat, misalnya di beberapa kabupaten di Jawa Tengah atau Sulawesi Selatan, partisipasi pemilu cenderung lebih tinggi. Warga di sana menganggap pemilu sebagai peristiwa kolektif yang wajib diikuti, dan kepemimpinan lokal sering memobilisasi komunitas melalui jaringan tokoh adat atau agama. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap lembaga lokal akibat sejarah ketidakadilan atau praktik korupsi muncul apatisme politik yang menurunkan angka partisipasi .

Kondisi politik lokal turut menentukan antusiasme pemilih. Di daerah yang menjelang pemilihan kepala daerah yang diwarnai persaingan ketat antara calon dengan basis dukungan jelas, partisipasi sering melonjak karena warga merasa suaranya memiliki dampak besar pada hasil. Namun, daerah yang mengalami konflik horizontal atau ketegangan etnis-agama sering menyaksikan intimidasi dan ketakutan, yang membuat warga enggan atau tidak berani datang ke TPS. Studi di Kalimantan dan Aceh menunjukkan penurunan partisipasi signifikan di zona konflik, akibat perasaan tidak aman dan ketidakpastian politik .

Tantangan geografis terutama dirasakan di wilayah kepulauan yang terpencar, seperti Maluku dan Sulawesi Utara. Transportasi laut yang tidak menentu sering menghambat distribusi logistik pemilu, sehingga banyak TPS dibuka jauh dari pusat permukiman. Meski KPU berupaya menghadirkan TPS terapung atau menggunakan kapal cepat, kendala cuaca dan biaya tinggi menyebabkan proses pemilu di daerah tersebut berjalan lambat dan partisipasi berkurang .

Perbedaan gender dan generasi juga terlihat antar daerah. Di beberapa provinsi dengan budaya patrilineal kuat, partisipasi perempuan masih di bawah laki-laki karena peran domestik yang menuntutnya lebih dulu mengurus keluarga ketimbang datang ke TPS. Generasi muda di perkotaan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi berkat akses informasi digital, sementara di wilayah pedesaan anak muda sering teralienasi dari politik formal dan lebih tertarik pada migrasi ekonomi daripada berpartisipasi dalam pemilu.

Untuk mengatasi disparitas ini, program edukasi pemilih perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Di daerah terpencil, pelibatan tokoh adat dan agama dalam sosialisasi pemilu efektif memobilisasi warga, sedangkan di kawasan urban, kampanye digital dan kolaborasi dengan komunitas media sosial dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda. Fasilitasi akses seperti penyediaan transportasi gratis pada hari pemilu dan penambahan TPS di lokasi strategis juga terbukti meningkatkan kehadiran di TPS.

2. Perbandingan Partisipasi Antar Periode Pemilu

Tingkat partisipasi pemilu di Indonesia tidak hanya bervariasi antar daerah, tetapi juga mengalami perubahan signifikan antar periode pemilu, khususnya sejak era Reformasi. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika politik nasional dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas serta kredibilitas proses demokrasi yang berlangsung. Periode pasca-Orde Baru menjadi masa yang sangat penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk menyuarakan pilihannya secara langsung, sehingga memunculkan antusiasme tinggi dalam pelaksanaan pemilu.

Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi tonggak sejarah demokrasi yang baru bagi Indonesia setelah era otoritarianisme Orde Baru. Partisipasi pemilih pada pemilu legislatif ini mencapai angka sekitar 90 persen, menunjukkan bahwa masyarakat sangat bersemangat dan percaya bahwa suaranya dapat membawa perubahan politik yang signifikan. Antusiasme ini juga dipengaruhi oleh harapan yang tinggi terhadap demokrasi yang lebih terbuka dan pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel dibandingkan masa sebelumnya. Pada saat itu, kebebasan berpolitik yang diperoleh menjadi energi besar bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam proses politik.

Memasuki pemilu-pemilu berikutnya pada tahun 2004 dan 2009, terjadi penurunan partisipasi yang cukup signifikan. Penurunan ini tidak lepas dari kekecewaan masyarakat yang mulai muncul akibat berbagai praktik politik yang dinilai negatif, seperti korupsi yang merajalela, politisasi identitas yang memecah belah, dan ketidakpercayaan terhadap partai politik yang dianggap hanya mementingkan kepentingan elit dan bukan kepentingan rakyat. Sikap skeptis terhadap mekanisme demokrasi ini menyebabkan sejumlah pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, atau bahkan mengabaikan proses politik sama sekali.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan membangun kembali kepercayaan publik.

Merespons situasi tersebut, berbagai program pendidikan politik mulai digalakkan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan partisipasi politik. Penyelenggara pemilu bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat bekerja keras untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu melalui sosialisasi yang intensif. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa suaranya tetap penting untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan nasional, sekaligus menekan angka golput. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki tata kelola pemilu agar lebih efektif dan adil sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik secara bertahap.

Memasuki pemilu 2014 dan 2019, terlihat adanya tren pemulihan partisipasi yang cukup signifikan. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan yang nyata dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif tetapi juga aspek teknologi dan komunikasi. Implementasi sistem pendaftaran pemilih elektronik dan kampanye digital menjadikan proses pemilu lebih mudah diakses terutama oleh generasi muda yang sangat familiar dengan teknologi. Hal ini mendorong keterlibatan kelompok pemilih yang sebelumnya kurang aktif atau merasa teralienasi dalam proses politik.

Kesadaran politik masyarakat juga mengalami peningkatan, terutama didukung oleh media sosial dan peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi pemilih. Generasi muda yang kini menjadi bagian besar dari pemilih aktif lebih kritis dan selektif dalam memilih calon pemimpin dan partai politik. Kampanye yang lebih transparan dan dialogis juga ikut memperkuat keterlibatannya dalam pemilu. Tren ini memperlihatkan bahwa teknologi dan pendidikan politik yang efektif dapat menjadi kunci untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan merata di masa mendatang.

Meskipun ada tren positif tersebut, fluktuasi dalam tingkat partisipasi pemilu tetap menjadi peringatan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kepercayaan publik terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilu masih rentan terhadap isu-isu seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan manipulasi data pemilih. Praktik-praktik tersebut dapat mengikis kepercayaan

masyarakat dan menurunkan partisipasi politik secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan serius dan konsisten.

Menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting agar demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan partisipasi pemilih dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Penyelenggara pemilu, partai politik, dan semua elemen masyarakat perlu berkomitmen terhadap transparansi dan keadilan agar masyarakat merasa bahwa hak suaranya dihargai dan proses politik berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal ini membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga penyelenggara, pengawas pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat itu sendiri.

D. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi/Rendahnya Indeks Partisipasi

1. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan

Tingkat partisipasi politik dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan yang melekat dalam masyarakat. Ketiga faktor ini berperan krusial dalam menentukan sejauh mana individu dan kelompok dalam masyarakat merasa mampu dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan, sebagai salah satu faktor utama, menjadi kunci yang sangat menentukan kesadaran dan kemampuan seseorang dalam memahami proses politik, yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang sistem politik, hak-haknya sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu sebagai instrumen perubahan sosial dan politik.

Penelitian-penelitian yang dilakukan secara global maupun di Indonesia menguatkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menegaskan bahwa pendidikan berfungsi sebagai modal utama dalam membangun kapasitas kognitif dan sumber daya sosial yang memungkinkan individu untuk mengenali kepentingan politiknya dan mengekspresikannya secara efektif. Di Indonesia, data empiris yang dihimpun oleh Saragih (2017) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi cenderung mencatat angka partisipasi pemilu yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Hal ini mencerminkan bagaimana pendidikan

membuka akses pada informasi dan dialog politik yang pada akhirnya mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam pemilu.

Faktor ekonomi juga berperanan penting dalam mendorong atau membatasi partisipasi politik. Masyarakat dengan status ekonomi yang stabil dan lebih tinggi secara umum memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Memiliki waktu luang yang cukup, akses informasi yang lebih baik, dan jejaring sosial yang luas yang dapat membantu dalam memahami dan mengikuti perkembangan politik terkini. Brady, Verba, dan Schlozman (1995) menekankan bahwa sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan sosial sangat penting bagi partisipasi politik. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang baik secara langsung mendukung kapasitas individu untuk terlibat dalam proses politik, termasuk menghadiri kampanye, berdiskusi tentang isu politik, dan menggunakan hak pilihnya.

Masyarakat yang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, cenderung mengalami hambatan yang signifikan untuk berpartisipasi. Putnam (2000) menyatakan bahwa yang hidup dalam situasi ekonomi yang serba terbatas biasanya lebih fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan sehingga ruang untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi sesuatu yang diprioritaskan lebih rendah karena tuntutan kehidupan sehari-hari yang lebih mendesak. Kondisi ini membuat kesenjangan partisipasi semakin melebar antara kelompok ekonomi yang lebih mampu dan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi.

Faktor sosial juga berperanan penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Keterikatan dan integrasi sosial dalam komunitas yang kuat dapat menjadi pendorong utama bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk pemilu. Komunitas dengan jaringan sosial yang erat dan solidaritas yang tinggi biasanya memiliki mekanisme internal yang mendorong partisipasi anggotanya, misalnya melalui diskusi kelompok, pengorganisasian acara politik lokal, dan dorongan sosial untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Putnam (2000) membahas bahwa modal sosial yang kuat berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat meningkatkan partisipasi politik karena anggota komunitas merasa saling bertanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

Apabila masyarakat mengalami rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem politik, maka potensi apatisme politik akan meningkat. Dalton (2008) mengemukakan bahwa kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dan proses demokrasi sering kali berujung pada penurunan motivasi untuk berpartisipasi, karena masyarakat merasa bahwa suara dan partisipasinya tidak akan berdampak nyata pada kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Ketidakpercayaan ini sering muncul akibat pengalaman buruk dengan korupsi, praktik politik yang tidak transparan, atau konflik kepentingan yang melemahkan legitimasi lembaga politik. Akibatnya, masyarakat cenderung menarik diri dari kegiatan politik dan memilih sikap pasif.

Kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bukan sekadar pilihan individu yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan membuka pintu bagi akses informasi dan pengembangan kesadaran politik, status ekonomi menentukan ketersediaan sumber daya untuk berpartisipasi, dan kondisi sosial mempengaruhi motivasi dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketiga dimensi ini secara bersamaan.

Pemerintah dan berbagai institusi sosial perlu merancang program-program yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendidikan politik, tetapi juga pengentasan kemiskinan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat. Program pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan literasi politik yang inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang secara ekonomi dan sosial tertinggal. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan harus menjadi bagian integral dari strategi untuk mengurangi hambatan partisipasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Penguatan modal sosial melalui pembangunan jaringan komunitas, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga publik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga sangat penting. Ketika masyarakat merasa terlibat dan percaya bahwa partisipasinya berdampak, maka motivasi untuk berkontribusi dalam proses politik akan meningkat secara signifikan. Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis ini, diharapkan tingkat partisipasi politik dalam pemilu di

Indonesia dapat meningkat, menciptakan demokrasi yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Faktor Politik dan Institusional

Faktor politik dan institusional memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan tingkat partisipasi pemilu di suatu negara, termasuk di Indonesia. Sistem politik yang diterapkan akan sangat mempengaruhi seberapa besar ruang yang tersedia bagi warga negara untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Negara-negara dengan sistem politik yang terbuka dan inklusif cenderung mendorong partisipasi yang tinggi karena warga merasa memiliki akses yang sama dan haknya dihargai dalam proses demokrasi. Sebaliknya, sistem politik yang eksklusif, otoriter, atau penuh pembatasan cenderung menekan partisipasi karena warga merasa hak-hak politik dibatasi atau tidak diakui secara penuh (Diamond, 1999). Dalam konteks Indonesia, setelah masa Reformasi 1998, sistem politik mengalami perubahan yang signifikan dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini membawa dampak positif berupa peningkatan partisipasi pemilu karena masyarakat mulai memperoleh ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses politik. Namun demikian, transformasi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri seperti praktik politik uang dan masih adanya kekurangan dalam transparansi penyelenggaraan pemilu yang menjadi hambatan tersendiri bagi partisipasi yang maksimal (Mietzner, 2013).

Kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan faktor institusional yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Jika pemilu diselenggarakan dengan mekanisme yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan, maka masyarakat akan merasa yakin bahwa suaranya memiliki nilai dan dampak nyata dalam menentukan arah kebijakan serta pemerintahan. Kepercayaan publik terhadap integritas pemilu menjadi kunci utama dalam mendorong keterlibatan aktif pemilih. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu berperanan vital dalam menjaga kualitas penyelenggaraan. KPU yang kredibel dan efektif dalam menjalankan tugasnya mampu membangun kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan partisipasi. Sebaliknya, jika terdapat dugaan ketidakberesan, manipulasi suara, atau kecurangan, partisipasi cenderung menurun karena masyarakat kehilangan kepercayaan

terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung (Norris, 2014; KPU, 2019).

Tingkat polarisasi politik dan adanya konflik sosial di suatu daerah juga sangat mempengaruhi partisipasi pemilu. Dalam situasi di mana polarisasi politik sangat tajam atau ketika masyarakat mengalami konflik sosial dan perpecahan, partisipasi biasanya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan intimidasi, kekerasan, atau ketidakamanan yang dapat menghalangi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara. Aspinal dan Fealy (2003) mengemukakan bahwa di daerah-daerah yang rawan konflik politik, masyarakat lebih memilih untuk menghindar dari keterlibatan aktif karena risiko keamanan dan tekanan sosial. Namun, dalam beberapa konteks tertentu, polarisasi politik yang tinggi juga dapat memicu peningkatan partisipasi karena warga merasa terdorong untuk berpartisipasi demi mendukung atau menentang pihak tertentu. Buehler (2016) membahas fenomena ini, di mana ketegangan politik justru memicu semangat berkompetisi dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih sehingga meningkatkan tingkat partisipasi, meskipun hal ini berpotensi memperburuk konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Kampanye politik yang efektif dan edukasi pemilih juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat partisipasi pemilu. Di era modern ini, penggunaan media sosial dan teknologi informasi telah menjadi alat utama dalam kampanye politik, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan menjangkau kalangan pemilih muda yang selama ini cenderung kurang aktif berpartisipasi. Hidayat (2020) menekankan bagaimana media sosial memungkinkan kampanye politik menjadi lebih dinamis dan interaktif, sehingga dapat menarik perhatian generasi muda dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu, kampanye yang terorganisasi dengan baik, didukung oleh pesan-pesan yang edukatif dan informatif, dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap proses pemilu dan menumbuhkan motivasi untuk ikut serta. Program pendidikan politik yang diselenggarakan secara konsisten dan menyeluruh juga berperan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam demokrasi, sehingga mampu mengatasi sikap apatis dan ketidakpedulian politik.

Secara lebih luas, faktor institusional lain yang juga berpengaruh adalah kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Undang-undang dan peraturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif menciptakan fondasi yang kuat bagi demokrasi untuk berjalan dengan baik. Ketika aturan mainnya transparan dan konsisten, masyarakat merasa lebih percaya dan yakin bahwa partisipasinya akan dihargai dan tidak sia-sia. Sebaliknya, regulasi yang ambigu atau lemah dapat menimbulkan keraguan, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang pada akhirnya menurunkan partisipasi. Dalam konteks Indonesia, reformasi regulasi pemilu yang terus mengalami penyempurnaan diharapkan mampu memperbaiki mekanisme penyelenggaraan dan memberikan kepastian hukum yang kuat, sekaligus mencegah praktik-praktik kecurangan yang merugikan partisipasi publik.

Kondisi politik lokal juga berperan penting dalam membentuk tingkat partisipasi pemilu. Dalam beberapa daerah, dinamika politik lokal yang sehat dengan kandidat yang dipercaya dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan meningkatkan antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, di daerah-daerah di mana politik lokal didominasi oleh konflik kepentingan, nepotisme, atau politisasi isu-isu sensitif yang memecah belah masyarakat, tingkat partisipasi cenderung menurun. Hal ini karena masyarakat kehilangan harapan bahwa suaranya dapat membawa perubahan positif dan justru merasa takut terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, stabilitas politik lokal dan kualitas kepemimpinan daerah menjadi faktor penentu dalam mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkualitas.

Peran media massa dan komunikasi publik dalam konteks politik dan pemilu tidak bisa diabaikan. Media yang independen dan bertanggung jawab berfungsi sebagai sarana edukasi politik yang mampu menyediakan informasi yang obyektif dan berimbang kepada masyarakat. Media yang sehat mampu mengurangi disinformasi dan manipulasi politik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu. Sebaliknya, media yang bias atau termanipulasi dapat memperburuk polarisasi dan menimbulkan kebingungan sehingga menurunkan semangat partisipasi. Oleh karena itu, pembangunan media yang bebas, profesional, dan berintegritas menjadi bagian dari strategi institusional dalam meningkatkan partisipasi pemilu.

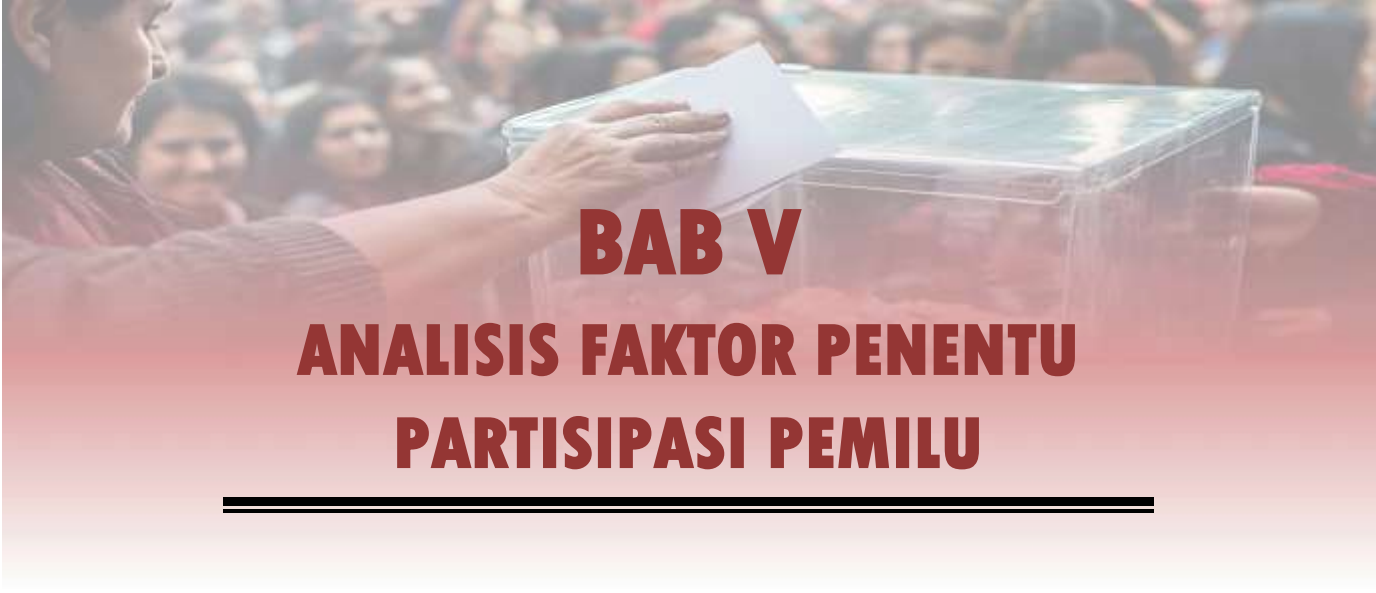

BAB V
ANALISIS FAKTOR PENENTU PARTISIPASI PEMILU

Partisipasi pemilu merupakan salah satu indikator utama kesehatan demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan pemimpin bangsa, sementara partisipasi yang rendah dapat menjadi sinyal adanya hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi keterlibatan politik. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang menentukan partisipasi pemilu sangat penting guna mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat demokrasi. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari aspek individu, seperti pendidikan, pendapatan, dan kesadaran politik, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas, termasuk kepercayaan terhadap institusi, kualitas penyelenggaraan pemilu, dan dinamika politik lokal. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut membantu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan inklusif. Selain itu, perubahan zaman dan perkembangan teknologi juga membawa dampak signifikan terhadap pola partisipasi, khususnya generasi muda yang kini semakin aktif menggunakan media digital sebagai sarana berpolitik. Dengan demikian, kajian ini menjadi landasan penting untuk memahami mekanisme yang mempengaruhi partisipasi pemilu dan bagaimana mengoptimalkan peran serta warga negara dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

A. Pendidikan Politik Masyarakat

1. Pengertian dan Peran Pendidikan Politik dalam Demokrasi

Pendidikan politik merupakan aspek fundamental dalam memperkuat kualitas demokrasi di suatu negara. Pada hakikatnya, pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan warga negara dalam menjalankan peran serta tanggung jawab politiknya secara efektif dan bertanggung jawab. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap sistem politik, mekanisme pemilu, hukum yang mengatur hak-hak sipil, serta nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan partisipasi aktif. Pendidikan politik tidak hanya sekadar pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku warga negara yang kritis dan berdaya guna dalam menghadapi dinamika politik. Dengan demikian, pendidikan politik berfungsi sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pentingnya pendidikan politik semakin mengemuka sebagai instrumen yang vital untuk mencegah fenomena apatisme dan ketidakpedulian politik di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang tidak terlibat aktif dalam proses demokrasi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya perannya. Hal ini sering kali berujung pada rendahnya partisipasi pemilu dan minimnya kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan politik berperan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang memadai sehingga dapat mengambil keputusan politik yang cerdas dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Selain itu, pendidikan politik juga mendorong warga untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu, propaganda, atau manipulasi yang beredar di ruang publik.

Pada konteks demokrasi, peran pendidikan politik sangat krusial karena demokrasi membutuhkan partisipasi yang luas dan bermakna. Partisipasi politik yang tinggi tidak hanya ditandai oleh kehadiran di bilik suara saat pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif dalam diskusi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta partisipasi dalam berbagai forum publik. Pendidikan politik yang efektif dapat menumbuhkan budaya politik yang inklusif dan dialogis, dimana perbedaan pendapat dipandang sebagai hal yang wajar dan bahkan

menjadi kekayaan dalam proses pengambilan keputusan. Kesadaran ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana keberagaman agama, suku, dan budaya dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang tengah berkembang menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapan pendidikan politik. Keragaman sosial dan budaya yang sangat tinggi menuntut pendekatan pendidikan politik yang sensitif dan adaptif terhadap konteks lokal. Program pendidikan politik yang hanya bersifat umum dan seragam tanpa memperhatikan karakteristik masyarakat setempat akan kurang efektif dalam membangun kesadaran politik yang mendalam. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil dengan tingkat pendidikan rendah membutuhkan metode penyampaian yang lebih sederhana dan aplikatif, berbeda dengan masyarakat urban yang lebih mudah mengakses teknologi informasi. Oleh karena itu, program pendidikan politik harus dirancang secara kontekstual agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan.

Peran berbagai pihak sangat penting dalam mengembangkan pendidikan politik yang berkualitas. Pemerintah, sebagai regulator dan fasilitator, perlu menyediakan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas harus memasukkan pendidikan politik sebagai bagian integral dari kurikulum, bukan hanya sekadar mata pelajaran tambahan. Pendidikan politik juga harus diperkuat melalui peran organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas untuk menjangkau komunitas-komunitas yang lebih luas dan beragam. Kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci sukses dalam membangun masyarakat yang sadar dan aktif secara politik.

Pada perkembangannya, pendidikan politik juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital membuka peluang besar untuk penyebaran informasi politik yang lebih cepat dan luas, sekaligus menghadirkan tantangan dalam bentuk disinformasi dan hoaks. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu mengajarkan literasi media dan keterampilan kritis dalam memilah informasi sehingga warga negara dapat menjadi konsumen informasi yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Penggunaan media sosial

sebagai alat pendidikan politik juga harus dimaksimalkan dengan penyajian konten yang menarik dan edukatif agar mampu menjangkau generasi muda yang merupakan bagian penting dari populasi pemilih.

Pendidikan politik harus mampu membangun nilai-nilai demokrasi yang mendalam dalam diri warga negara. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan solidaritas menjadi landasan moral yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat demokratis. Ketika warga negara memiliki nilai-nilai ini, akan lebih siap menerima perbedaan pendapat dan siap berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan sikap yang konstruktif. Pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai ini secara konsisten akan membantu mengurangi konflik politik dan memperkuat harmoni sosial.

Keberhasilan pendidikan politik akan sangat bergantung pada kontinuitas dan kualitas pelaksanaannya. Pendidikan politik bukanlah kegiatan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang harus berlangsung sepanjang hayat warga negara. Untuk itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan terus-menerus terhadap metode dan materi pendidikan politik agar tetap relevan dengan perkembangan sosial politik yang dinamis. Dengan pendidikan politik yang efektif dan berkelanjutan, masyarakat akan semakin cakap dan berdaya dalam mengelola demokrasi, sehingga demokrasi di Indonesia dapat tumbuh menjadi sistem yang tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

2. Strategi dan Media Pendidikan Politik di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan politik. Di era digital, cara masyarakat mengakses informasi dan berinteraksi dengan konten politik mengalami transformasi yang signifikan. Media digital, seperti media sosial, platform video, aplikasi pesan instan, dan berbagai alat komunikasi online lainnya, menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau khalayak yang sangat luas secara cepat dan efektif. Melalui media ini, pendidikan politik tidak lagi terbatas pada metode konvensional seperti ceramah atau buku, melainkan bisa disampaikan secara interaktif dan menarik, terutama kepada generasi muda yang merupakan kelompok demografis utama dan penentu masa depan demokrasi. Keunggulan media digital dalam memberikan informasi

secara real-time dan kemampuan untuk menyebarkan pesan secara viral menjadikannya alat yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Di balik berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh media digital, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dimanipulasi, yang dikenal dengan istilah misinformation dan hoaks. Informasi palsu ini dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial dan berpotensi mempengaruhi persepsi dan keputusan politik masyarakat secara negatif. Selain itu, media digital juga sering kali menjadi ruang bagi polarisasi politik, dimana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda semakin menguatkan posisi secara eksklusif tanpa adanya dialog yang konstruktif. Kondisi ini dapat mengancam kualitas demokrasi dengan menimbulkan konflik dan mengurangi rasa persatuan di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang menggunakan media digital harus dirancang dengan strategi yang mampu memitigasi dampak negatif ini dan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, melainkan juga aktif dalam mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.

Pada konteks ini, literasi media dan keterampilan berpikir kritis menjadi komponen penting yang harus dimasukkan dalam pendidikan politik. Literasi media mengajarkan masyarakat untuk memahami bagaimana media bekerja, mengenali bias dan agenda di balik informasi yang disajikan, serta membedakan antara fakta dan opini. Dengan keterampilan ini, warga negara dapat menghindari jebakan informasi yang menyesatkan dan lebih bijak dalam mengambil keputusan politik. Pendidikan politik yang berbasis pada penguatan literasi media akan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi. Hal ini juga menjadi langkah preventif dalam membangun demokrasi yang sehat, di mana warga negara mampu menjaga integritas proses politik dengan informasi yang akurat dan terpercaya.

Walaupun media digital menawarkan banyak kemudahan, pendidikan politik tradisional tetap memiliki peran penting yang tidak dapat diabaikan. Pendidikan politik yang dilakukan melalui sekolah-sekolah, kampanye publik, pelatihan komunitas, serta forum diskusi langsung memberikan kesempatan bagi warga untuk belajar secara

langsung dan berinteraksi secara personal. Metode konvensional ini memungkinkan dialog dua arah yang mendalam dan membangun kepercayaan antar peserta, yang sulit dicapai hanya melalui interaksi digital. Selain itu, pendidikan politik secara langsung juga mampu menyesuaikan pendekatan dan materi dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga lebih relevan dan efektif dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, penggabungan antara pendekatan pendidikan politik digital dan konvensional merupakan strategi yang ideal untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang dan tingkat akses teknologi.

Pendekatan partisipatif dalam pendidikan politik juga sangat penting untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai demokrasi. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam diskusi, pelatihan, dan kegiatan politik lainnya, tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman praktis dalam mengaplikasikan prinsip demokrasi. Pengalaman ini memperkuat rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap proses politik, sekaligus membangun budaya politik yang lebih inklusif dan dialogis. Pendekatan ini juga menumbuhkan solidaritas sosial dan mengurangi sikap apatisme yang kerap muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Oleh sebab itu, pendidikan politik yang mendorong partisipasi aktif di masyarakat dapat menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam kualitas demokrasi.

Di Indonesia, upaya pengembangan pendidikan politik telah menunjukkan kemajuan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital sekaligus mempertahankan metode konvensional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu aktif menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk melakukan edukasi pemilih. Kampanye edukasi yang dilakukan secara daring mampu menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk generasi muda yang sangat familiar dengan teknologi digital. KPU memanfaatkan konten video, infografik, serta interaksi online untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi politik. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi milenial dan Z yang selama ini relatif sulit dijangkau melalui metode tradisional.

Organisasi masyarakat sipil juga aktif dalam menyelenggarakan pendidikan politik dengan pendekatan yang beragam dan inovatif. Organisasi-organisasi ini sering melakukan pelatihan literasi digital dan politik bagi masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok yang secara geografis atau sosial sulit dijangkau oleh lembaga formal. Pendekatan berbasis komunitas dan penggunaan media digital memungkinkan pesan-pesan pendidikan politik dapat tersampaikan dengan cara yang lebih personal dan kontekstual. Selain itu, juga aktif memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi. Kegiatan ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, tantangan terbesar pendidikan politik digital di Indonesia adalah kesenjangan akses teknologi dan disparitas literasi digital antar wilayah. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, masih terdapat daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat tertentu yang sulit mengakses media digital secara optimal. Kondisi ini menyebabkan ketidakmerataan informasi dan peluang partisipasi politik. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik harus memperhatikan aspek inklusivitas dengan menyediakan akses yang merata serta meningkatkan kapasitas literasi digital secara khusus bagi kelompok-kelompok rentan tersebut. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi ini akan membantu mengurangi kesenjangan dan memastikan pendidikan politik menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pendidikan politik di era digital juga bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara optimal serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menjalankan peran politiknya. Selain itu, pengawasan terhadap konten dan penyebaran informasi di media digital juga perlu diperkuat untuk mencegah penyebaran hoaks dan propaganda yang dapat merusak kualitas demokrasi. Dengan koordinasi yang baik, pendidikan politik dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan aktif dalam demokrasi.

B. Peran Media dan Teknologi Informasi

1. Media Tradisional dan Perannya dalam Partisipasi Politik

Media massa tradisional telah lama menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan opini publik dan pendidikan politik masyarakat. Keberadaan televisi, radio, dan surat kabar berperan vital dalam menyampaikan informasi politik yang esensial bagi warga negara. Dalam konteks demokrasi, informasi yang diberikan oleh media tradisional menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami dinamika politik dan membuat keputusan yang bijak, terutama dalam konteks pemilihan umum. Fungsi media sebagai alat edukasi politik ini sudah berlangsung sejak lama dan memiliki fondasi teoritis yang kuat. Salah satunya adalah teori agenda-setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga mempengaruhi hal-hal apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan demikian, media tradisional berperan sebagai penentu agenda publik melalui penekanan pada isu-isu tertentu.

Peran media tradisional sebagai "penjaga pintu" atau gatekeeper juga merupakan konsep penting dalam memahami pengaruh media terhadap partisipasi politik. Shoemaker dan Vos (2009) menjelaskan bahwa media berfungsi menyaring dan memilih informasi mana yang layak untuk disampaikan kepada publik. Proses ini sangat menentukan bagaimana isu-isu politik disusun dan disampaikan, serta bagaimana masyarakat akan menanggapi isu tersebut. Jika media tradisional melakukan tugas ini secara objektif dan akurat, maka akan membantu menciptakan masyarakat yang melek politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Namun, apabila media menyajikan informasi dengan bias atau hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, maka peran edukatifnya bisa berubah menjadi alat manipulasi.

Pada konteks Indonesia, media tradisional masih menjadi sumber informasi politik yang penting, terutama bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Televisi nasional menjadi salah satu sarana utama dalam menyampaikan berita politik, debat calon pemimpin, serta kampanye pemilu. Liddle (2003) mencatat bahwa siaran televisi memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi politik masyarakat, khususnya pada pemilu-pemilu besar seperti pemilu presiden. Melalui siaran debat, berita politik harian, serta program

diskusi, televisi menyajikan beragam pandangan politik yang memungkinkan masyarakat mengenal lebih dekat profil dan visi-misi para kandidat. Dengan demikian, media televisi berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih.

Radio juga berperan penting dalam pendidikan politik, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan internet atau sinyal televisi. Radio komunitas, misalnya, mampu menjangkau lapisan masyarakat pedesaan dengan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal. Tapsell (2007) mencatat bahwa radio komunitas di Indonesia sangat efektif dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat akar rumput, terutama melalui program-program edukatif dan interaktif. Pendekatan ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mengajak pendengar untuk terlibat aktif dalam diskusi politik. Dengan demikian, radio tidak hanya menjadi alat komunikasi satu arah, tetapi juga media yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik.

Surat kabar juga memiliki peran historis dan intelektual yang penting dalam mendidik masyarakat mengenai politik. Surat kabar menyediakan ruang yang lebih mendalam untuk analisis politik, editorial, dan opini yang memberikan wawasan bagi pembaca untuk memahami isu-isu politik dari berbagai perspektif. Meskipun pembacanya lebih terbatas dibandingkan televisi dan radio, surat kabar memberikan kontribusi besar dalam membentuk opini di kalangan masyarakat menengah dan elite intelektual. Di Indonesia, surat kabar seperti Kompas dan Media Indonesia telah lama menjadi rujukan utama dalam memahami dinamika politik nasional. Dengan format cetak maupun digital, surat kabar menyajikan informasi yang memungkinkan pembaca merenung dan membentuk pendapat yang lebih matang.

Media tradisional di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang dapat menghambat perannya dalam meningkatkan partisipasi politik secara objektif. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik terhadap independensi media. Beberapa media dimiliki oleh tokoh politik atau pihak yang memiliki afiliasi politik tertentu, sehingga berita yang disampaikan cenderung berpihak dan tidak netral. Sen dan Hill (2006) mengkritisi konsentrasi kepemilikan media di Indonesia yang menyebabkan informasi politik menjadi kurang beragam dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini berdampak langsung pada persepsi publik yang mungkin hanya menerima informasi

yang telah difilter sesuai kepentingan pemilik media, bukan berdasarkan kenyataan yang seimbang dan faktual.

Bias pemberitaan juga menjadi isu yang sering kali merusak integritas media tradisional. Ketika media menyajikan berita dengan pendekatan yang tidak berimbang atau menyudutkan kelompok politik tertentu, maka fungsi media sebagai penyampai informasi menjadi tidak kredibel. Publik yang menyadari adanya keberpihakan dalam pemberitaan media bisa menjadi apatis atau justru menjadi ekstrem dalam pandangan politiknya, tergantung pada afiliasi informasi yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab etis media tradisional dalam menjaga objektivitas dan akurasi berita sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses politik dan demokrasi secara keseluruhan.

Perkembangan media digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi media tradisional. Masyarakat, khususnya generasi muda, kini lebih banyak mengakses informasi politik melalui media sosial dan platform daring yang lebih interaktif dan mudah diakses. Media tradisional mulai kehilangan dominasi sebagai sumber utama informasi politik karena kalah bersaing dari segi kecepatan, fleksibilitas, dan daya tarik konten. Akibatnya, media tradisional perlu beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional agar tetap relevan dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini mencakup transformasi format penyiaran, penggunaan media sosial sebagai kanal distribusi, serta pengembangan konten digital yang menarik namun tetap menjaga prinsip-prinsip jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab.

Integrasi antara media tradisional dan digital dapat menjadi peluang untuk memperkuat pendidikan politik yang lebih inklusif dan berdaya jangkau luas. Banyak stasiun televisi dan surat kabar kini telah merambah ke platform daring untuk memperluas audiens. Televisi tidak lagi hanya disiarkan melalui frekuensi udara, tetapi juga melalui platform streaming dan kanal YouTube, sementara surat kabar memiliki edisi digital yang bisa diakses melalui perangkat elektronik. Dengan strategi ini, media tradisional tidak hanya bertahan, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam menyebarkan informasi politik yang berkualitas. Perkawinan antara kekuatan narasi tradisional dengan kemampuan distribusi digital dapat menjadi kunci dalam menghadirkan media yang mampu mendidik masyarakat secara luas dan efektif.

2. Transformasi Digital dan Media Sosial sebagai Arena Baru Partisipasi Politik

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dengan dunia politik. Internet dan media sosial tidak hanya memfasilitasi akses informasi, tetapi juga menciptakan ruang baru untuk keterlibatan politik yang sebelumnya tidak tersedia dalam media konvensional. Platform seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan YouTube kini menjadi medan penting bagi berbagai aktivitas politik, mulai dari penyebaran informasi, pembentukan opini, mobilisasi massa, hingga kampanye politik secara daring. Perubahan ini menjadikan partisipasi politik lebih cair dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Chadwick (2013) menyebut fenomena ini sebagai pergeseran dari komunikasi politik terpusat menuju model hybrid yang melibatkan aktor-aktor baru, termasuk warga biasa yang kini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi wacana publik.

Media sosial telah memungkinkan siapa saja menjadi produsen sekaligus konsumen informasi politik. Dengan hanya menggunakan gawai dan jaringan internet, seseorang bisa berbagi pendapat, menyebarkan berita, mengomentari kebijakan publik, atau bahkan mengorganisasi gerakan sosial-politik. Dalam konteks ini, Loader dan Mercea (2012) menekankan bahwa partisipasi politik tidak lagi terbatas pada tindakan formal seperti mencoblos di bilik suara, tetapi juga mencakup aktivitas daring seperti ikut serta dalam petisi online, mendukung gerakan sosial digital, dan berdiskusi di forum-forum virtual. Bentuk-bentuk partisipasi ini semakin memperluas definisi keterlibatan politik dalam era digital, dan mengakomodasi cara baru warga negara dalam menyuarakan aspirasi politik.

Khususnya bagi generasi muda, media sosial telah menjadi ruang utama untuk berekspresi secara politis. Kelompok ini menunjukkan kecenderungan kuat untuk menggunakan platform digital sebagai sarana informasi, komunikasi, dan aksi kolektif. Menurut Bimber, Flanagin, dan Stohl (2012), media sosial meningkatkan peluang mobilisasi politik dengan mempercepat penyebaran pesan dan memperkuat jaringan komunitas yang memiliki kepentingan serupa. Di Indonesia, fenomena ini semakin menonjol dalam pelaksanaan pemilu nasional beberapa tahun terakhir. Kampanye politik tak lagi sekadar diselenggarakan dalam bentuk rapat umum atau iklan televisi, melainkan juga dalam bentuk konten kreatif yang disebar melalui TikTok, Instagram Reels, atau video

YouTube yang viral. Kandidat politik dan partai kini berlomba-lomba merebut perhatian netizen melalui strategi digital yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna muda.

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dalam komunikasi politik. Penelitian oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa dalam pemilu 2014 dan 2019, media sosial berperan sentral dalam penyebaran pesan kampanye dan pembentukan citra politik kandidat. Tim sukses politik memanfaatkan algoritma platform digital untuk menargetkan segmen pemilih tertentu, termasuk pengguna muda yang aktif di dunia maya. Selain itu, pemanfaatan influencer politik, buzzer, dan micro-celebrity juga menjadi bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan membentuk opini publik secara luas. Dalam banyak kasus, konten politik yang disampaikan dalam format ringan dan menghibur terbukti lebih efektif menjangkau pemilih muda dibandingkan pesan politik formal yang bersifat normatif dan kaku.

Kehadiran media sosial sebagai arena politik juga membawa berbagai tantangan serius yang dapat merusak kualitas partisipasi politik. Kemudahan akses dan kecepatan informasi memungkinkan penyebaran hoaks dan disinformasi yang sangat sulit dikendalikan. Allcott dan Gentzkow (2017) memperingatkan bahwa informasi palsu yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi opini politik publik secara tidak akurat, bahkan merusak integritas proses demokrasi. Dalam konteks pemilu, hoaks bisa digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, menyebarkan kebencian, atau menciptakan persepsi palsu yang membingungkan pemilih. Di Indonesia, masalah ini semakin kompleks karena sebagian besar pengguna media sosial masih memiliki literasi digital yang rendah, sehingga sulit membedakan informasi valid dan manipulatif.

Fenomena filter bubble dan echo chamber juga menjadi ancaman nyata bagi keberagaman pandangan politik. Pariser (2011) menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan pengguna, sehingga mempersempit eksposur terhadap pandangan yang berbeda. Akibatnya, individu hanya berinteraksi dengan informasi dan komunitas yang memperkuat pandangannya sendiri, tanpa kesempatan untuk mendengar argumen dari sisi lain. Keadaan ini berpotensi memicu polarisasi politik yang ekstrem dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berdialog

secara konstruktif. Ketika ruang digital terfragmentasi dalam kelompok-kelompok ideologis tertutup, maka kemungkinan tercapainya konsensus dan kohesi sosial dalam proses politik menjadi semakin sulit.

Literasi digital menjadi aspek krusial dalam mengoptimalkan peran media sosial untuk partisipasi politik yang sehat. Mihailidis dan Thevenin (2013) menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menavigasi informasi digital, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber, mengenali bias, serta memahami konteks sosial-politik dari informasi yang diterima. Upaya edukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai cara penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab perlu menjadi prioritas bersama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan membekali masyarakat dengan keterampilan literasi digital yang kuat, partisipasi politik daring dapat berkembang secara konstruktif dan tidak terjebak dalam perang informasi yang memecah belah.

Untuk menghadapi tantangan ini, berbagai institusi di Indonesia telah mulai mengambil langkah aktif. Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, telah memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi pemilu, edukasi pemilih, dan transparansi proses elektoral. Melalui akun resmi di berbagai platform, KPU menyampaikan informasi penting secara visual dan interaktif agar mudah dipahami oleh khalayak luas. Inisiatif ini menjadi contoh bagaimana lembaga negara dapat beradaptasi dengan dinamika digital untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Selain itu, keterlibatan KPU dalam upaya klarifikasi dan debunking hoaks politik menjadi bagian penting dari menjaga integritas pemilu dalam era digital.

Kerja sama lintas sektor juga dibutuhkan untuk menangkal dampak negatif media sosial terhadap proses demokrasi. Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dengan platform teknologi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Saragih (2020) mencatat bahwa selama masa pemilu, beberapa kerja sama dilakukan dengan platform seperti Facebook dan Google untuk mendeteksi serta menghapus konten yang menyesatkan atau menghasut. Pendekatan semacam ini perlu diperluas dan diinstitusionalisasi agar mampu memberikan perlindungan informasi yang adil dan netral bagi semua pihak. Selain itu, media sosial

juga dapat menjadi sarana advokasi, edukasi, dan pemantauan proses politik secara partisipatif oleh warga, sehingga memperluas ruang demokrasi dalam bentuk yang lebih inklusif dan transparan.

Dengan segala potensinya, media sosial harus diposisikan sebagai alat pendukung demokrasi, bukan ancaman bagi proses politik yang sehat. Peran aktif warga, institusi negara, dan penyedia teknologi sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang mendorong partisipasi politik berdasarkan informasi yang akurat, berimbang, dan inklusif. Transformasi digital seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, bukan menjadi arena manipulasi dan disinformasi. Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis, media sosial dapat dijadikan arena baru partisipasi politik yang lebih dinamis, representatif, dan sesuai dengan semangat demokrasi digital abad ke-21.

C. Pengaruh Ekonomi dan Sosial Budaya

1. Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Partisipasi Pemilu

Kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian ilmu politik dan sosiologi, variabel ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan menjadi penentu utama dalam mengukur sejauh mana seseorang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses politik. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak waktu luang, akses terhadap informasi, serta kemampuan untuk memahami isu-isu politik yang kompleks, juga lebih mungkin merasa bahwa suaranya memiliki dampak terhadap hasil politik, sehingga mendorong keikutsertaan dalam pemilu. Sebaliknya, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali harus memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan kesehatan, yang pada akhirnya membuatnya abai atau tidak mampu menyisihkan waktu dan energi untuk terlibat dalam proses elektoral.

Riset klasik dari Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menunjukkan bahwa status sosial ekonomi mempengaruhi tiga aspek utama partisipasi politik, yaitu sumber daya (*resources*), psikologis (*engagement*), dan jangkauan jaringan sosial (*recruitment* networks). Seseorang yang memiliki pekerjaan tetap, pendidikan tinggi, dan

lingkungan sosial yang aktif secara politik lebih mungkin terdorong untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini dikarenakan tidak hanya memiliki sarana material untuk berpartisipasi, tetapi juga merasa percaya diri, memiliki rasa kepedulian terhadap kebijakan publik, serta terdorong oleh lingkungannya untuk mengambil bagian dalam proses politik. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi menjadi hambatan struktural dalam membangun demokrasi yang inklusif, karena sebagian besar kelompok marginal tidak memiliki kondisi yang mendukung untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu.

Pada konteks Indonesia, pengaruh ekonomi terhadap partisipasi pemilu tercermin dari perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan yang umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan informasi, serta infrastruktur pemilu menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Penelitian Hadiz (2010) menggarisbawahi bagaimana kemiskinan struktural dan ketimpangan pembangunan antarwilayah menciptakan disparitas dalam kesadaran politik dan akses terhadap proses pemilu. Di beberapa daerah terpencil, warga bahkan mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan dan bagaimana cara memilih, belum lagi faktor logistik yang sering menghambat distribusi surat suara dan pendirian tempat pemungutan suara. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat miskin dan terpencil dalam pemilu menjadi sangat bergantung pada intervensi pihak luar, seperti mobilisasi dari tokoh masyarakat atau bantuan logistik dari pemerintah.

Ketika kondisi ekonomi makro mengalami tekanan, seperti krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau meningkatnya angka pengangguran, dampaknya juga bisa dirasakan dalam tingkat partisipasi pemilu. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan sistem politik bisa menurun drastis. Kenny (2006) menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kendali atas masa depan, termasuk terhadap kebijakan pemerintah. Perasaan ketidakberdayaan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk apatisme politik dan ketidakikutsertaan dalam pemilu. Dalam banyak kasus, warga yang mengalami kekecewaan terhadap pemerintah cenderung memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes pasif. Fenomena ini juga dapat memperparah krisis legitimasi politik, terutama jika disertai dengan meningkatnya persepsi korupsi atau ketidakadilan sosial.

Kondisi ekonomi yang stabil dan pemerataan kesejahteraan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi politik. Ketika masyarakat merasa aman secara ekonomi dan sosial, lebih cenderung untuk terlibat dalam urusan publik dan percaya bahwa suaranya dapat berkontribusi terhadap perubahan. Dalton (2008) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif mampu memperkuat demokrasi melalui perluasan kelas menengah, yang dikenal sebagai kelompok dengan tingkat kesadaran politik tinggi dan kecenderungan kuat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kelas menengah berperan penting dalam mendorong akuntabilitas politik, karena memiliki akses terhadap informasi, keterampilan literasi politik, serta kapasitas untuk mengorganisasi gerakan sosial dan tekanan politik terhadap elite penguasa.

Meskipun tingkat pendapatan dapat menjadi indikator partisipasi, tidak semua warga dengan status ekonomi tinggi otomatis aktif secara politik. Ada faktor psikologis dan budaya yang turut berpengaruh, seperti kepercayaan terhadap sistem pemilu, pengalaman masa lalu terhadap manipulasi politik, atau persepsi akan efektivitas suara. Dalam beberapa kasus, justru kelompok ekonomi menengah atas menunjukkan sikap skeptis terhadap hasil pemilu dan memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penting untuk melihat interaksi antara faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi dalam menganalisis tingkat partisipasi pemilih. Variabel seperti transparansi penyelenggara pemilu, keberpihakan media, serta kualitas kampanye politik juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dari berbagai lapisan ekonomi.

Salah satu tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi politik di tengah ketimpangan ekonomi adalah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses demokrasi. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan politik, informasi yang objektif, serta infrastruktur pemilu yang memadai. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa daerah-daerah tertinggal tidak terpinggirkan dari proses politik hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendekatan afirmatif seperti sosialisasi langsung ke komunitas miskin, penyediaan alat bantu suara bagi disabilitas, serta mobilisasi pemilih di daerah terpencil perlu ditingkatkan untuk memastikan inklusivitas. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan juga dapat menjadi

investasi jangka panjang dalam memperkuat partisipasi politik yang merata.

Pengaruh ekonomi terhadap partisipasi pemilu juga berkaitan erat dengan isu politik uang. Di banyak wilayah Indonesia, kondisi ekonomi yang lemah membuka celah bagi praktik vote buying atau politik transaksional, di mana suara rakyat dapat dibeli dengan uang atau bantuan materi. Praktik ini bukan hanya mencerminkan rendahnya kesadaran politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemiskinan dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk meraih kekuasaan. Masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut, meskipun menyadari bahwa hal itu merusak integritas demokrasi. Oleh karena itu, upaya mengatasi pengaruh negatif kondisi ekonomi terhadap pemilu tidak bisa dilepaskan dari agenda pemberantasan politik uang dan edukasi politik yang berkelanjutan.

2. Pengaruh Faktor Sosial Budaya dalam Partisipasi Politik

Faktor sosial budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk orientasi dan perilaku politik masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam suatu komunitas, termasuk norma sosial, tradisi, serta identitas kolektif seperti etnisitas dan agama, mempengaruhi bagaimana individu melihat pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Dalam masyarakat dengan budaya politik partisipatif yang kuat, seperti yang diuraikan oleh Putnam (1993), kohesi sosial dan kepercayaan antarpersonal dapat memperkuat rasa tanggung jawab warga terhadap urusan publik. Dalam konteks tersebut, partisipasi dalam pemilu dipandang bukan hanya sebagai hak, melainkan juga sebagai kewajiban moral untuk turut menentukan arah kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan bersama. Tradisi partisipasi ini biasanya diturunkan lintas generasi, membentuk pola yang konsisten dalam keterlibatan warga negara dalam pemilu.

Pada masyarakat demokratis yang telah matang, nilai-nilai partisipatif sering kali menjadi bagian dari identitas budaya. Inglehart dan Welzel (2005) mengemukakan bahwa perubahan nilai masyarakat dari yang bersifat materialistik menuju post-materialistik mendorong tumbuhnya budaya politik yang lebih partisipatif dan egaliter. Hal ini terlihat dari kecenderungan warga untuk lebih aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu, forum publik, maupun bentuk-bentuk partisipasi

nonformal lainnya. Dalam budaya semacam ini, pemilu bukan semata-mata urusan teknis memilih kandidat, melainkan bagian dari ritual kolektif yang memperkuat identitas sebagai warga negara. Oleh karena itu, masyarakat dengan nilai-nilai yang mendukung keterbukaan, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam masyarakat yang majemuk dan kompleks seperti Indonesia. Dengan keragaman etnis, agama, dan bahasa yang luar biasa, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam membangun budaya politik yang inklusif dan partisipatif. Di satu sisi, keberagaman ini dapat menjadi kekuatan yang mendorong dinamika politik lokal yang sehat. Di berbagai daerah, norma-norma lokal seperti musyawarah, gotong royong, serta keterikatan terhadap lembaga adat menjadi sarana penguatan partisipasi politik berbasis komunitas. Sidel (2008) mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, keterlibatan komunitas dalam proses politik sering kali dimediasi melalui jaringan informal berbasis kekerabatan, agama, atau organisasi sosial tradisional, yang berfungsi sebagai penghubung antara warga dan institusi politik formal.

Faktor sosial budaya juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi politik jika tidak dikelola dengan baik. Segregasi sosial dan konflik identitas dapat memunculkan rasa keterasingan atau bahkan permusuhan antarkelompok yang pada akhirnya memicu apatisme atau penolakan terhadap proses pemilu. Liddle dan Mujani (2007) mengamati bahwa dalam situasi polarisasi politik berbasis identitas, warga lebih memilih menjauh dari arena politik untuk menghindari konflik atau karena merasa tidak memiliki representasi yang adil dalam sistem. Dalam beberapa kasus, tekanan dari kelompok mayoritas atau dominasi elite lokal yang mengontrol informasi politik juga dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat minoritas. Akibatnya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang setara untuk mengekspresikan preferensi politiknya, yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

Salah satu kekuatan utama dalam konteks sosial budaya Indonesia adalah peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Fealy dan White (2008) menekankan bahwa figur-figur ini sering kali memiliki posisi sentral dalam mempengaruhi opini publik dan memobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kepercayaan masyarakat terhadap sebagai pemimpin moral dan sosial menjadikan sebagai jembatan yang

efektif antara rakyat dan proses politik. Tidak hanya memberikan legitimasi terhadap proses pemilu, tetapi juga membantu menjelaskan pentingnya partisipasi politik dalam bahasa dan narasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam banyak kasus, fatwa, seruan, atau ajakan tokoh agama dapat mempengaruhi secara langsung keputusan pemilih untuk hadir di tempat pemungutan suara atau bahkan pilihan politik yang diambil.

Peran dominan tokoh masyarakat juga memiliki sisi dilematis. Dalam beberapa kasus, pengaruh yang sangat kuat dapat mengarah pada pembentukan opini politik yang tidak otonom atau bahkan manipulatif. Pemilih yang bergantung pada arahan tokoh tertentu mungkin tidak mendapatkan informasi politik yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian rasional dan independen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang tinggi belum tentu berarti partisipasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kapasitas kritis masyarakat agar tetap dapat menilai secara objektif berbagai pilihan politik yang tersedia, meskipun menghormati dan mengikuti arahan tokoh komunitas.

Pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pemilu di Indonesia harus memperhatikan secara cermat latar belakang sosial budaya masyarakat. Program edukasi politik tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik komunitas lokal. Hadiz (2010) menyarankan agar strategi peningkatan partisipasi memperhatikan keberadaan lembaga adat, komunitas keagamaan, dan organisasi lokal sebagai mitra dalam menyampaikan pesan-pesan politik secara efektif. Penggunaan bahasa lokal, metode komunikasi tradisional, serta pelibatan tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat akan membuat kampanye edukatif menjadi lebih relevan dan diterima. Dengan demikian, partisipasi politik tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran kolektif tentang pentingnya kedaulatan rakyat.

Pada kerangka yang lebih luas, pembentukan budaya politik partisipatif memerlukan dukungan institusi negara yang mampu menjamin keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Tanpa kepercayaan terhadap institusi politik, masyarakat akan sulit mengembangkan budaya partisipasi yang sehat, meskipun nilai-nilai sosial budaya mendorong keterlibatan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas lembaga pemilu

dan partai politik merupakan prasyarat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mendukung partisipasi politik. Masyarakat yang merasa diperlakukan secara adil dan dihargai sebagai subjek politik akan lebih termotivasi untuk turut serta dalam proses demokrasi.

D. Kepercayaan terhadap Lembaga Demokrasi

1. Peran Kepercayaan dalam Membangun Stabilitas Demokrasi

Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi adalah elemen krusial yang menentukan keberlangsungan dan kualitas demokrasi dalam suatu negara. Lembaga demokrasi, seperti parlemen, eksekutif, badan kehakiman, dan lembaga penyelenggara pemilu, harus dipandang sebagai entitas yang legitimate dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Menurut Easton (1965), kepercayaan tersebut merupakan fondasi yang menopang stabilitas dan efektivitas demokrasi. Ketika kepercayaan terhadap lembaga menurun, terjadi risiko erosi legitimasi yang dapat memicu apatisme politik dan bahkan konflik sosial. Norris (2011) menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak peduli terhadap proses politik, sehingga mengurangi partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi adalah tugas yang tidak dapat ditunda dalam rangka membangun demokrasi yang stabil dan inklusif.

Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi seringkali disebabkan oleh praktik korupsi, birokrasi yang tidak transparan, dan kurangnya akuntabilitas. Korupsi, sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik. Birokrasi yang tidak transparan membuat masyarakat sulit untuk memahami dan mengawasi tindakan lembaga-lembaga demokrasi. Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat menilai dengan tepat bagaimana kebijakan dan keputusan dibuat, sehingga menimbulkan rasa curiga dan ketidakpercayaan. Kurangnya akuntabilitas juga menjadi masalah besar, karena lembaga demokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kegiatan dan kebijakannya akan dianggap tidak layak dipercaya. Di Indonesia, fenomena ini telah terjadi dan berdampak pada partisipasi masyarakat

dalam pemilu serta kegiatan politik lainnya. Sejumlah survei nasional, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), menunjukkan fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah terhadap parlemen dan partai politik dapat menimbulkan sikap skeptis yang mendorong golput (Golongan Putih) atau pemilih yang abstain. Haryanto (2017) menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik dapat mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Kepercayaan terhadap lembaga demokrasi tidak hanya berdampak pada partisipasi pemilu, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik dan stabilitas sosial-politik secara umum. Putnam (1993) mengemukakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diterima dan diimplementasikan. Ketika masyarakat percaya pada lembaga demokrasi, lebih cenderung mendukung dan mematuhi kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, kebijakan publik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan bagi masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan ketidakstabilan sosial-politik. Selain itu, stabilitas sosial-politik juga dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Ketika masyarakat percaya bahwa lembaga demokrasi dapat menyelesaikan konflik dan mengatur kepentingan berbagai pihak dengan adil, maka stabilitas sosial-politik akan terjaga. Namun, ketika kepercayaan terhadap lembaga demokrasi menurun, konflik sosial dapat meningkat dan stabilitas politik terancam. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi agar kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dan stabilitas sosial-politik terjaga.

Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. OECD (2017) menekankan bahwa transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas adalah faktor-faktor penting yang dapat memperkuat kepercayaan publik. Transparansi

memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi tindakan lembaga demokrasi, sehingga meningkatkan kepercayaan. Akuntabilitas memastikan bahwa lembaga demokrasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, sehingga masyarakat percaya bahwa kebijakan dan keputusan dibuat dengan pertimbangan yang tepat. Pelayanan publik yang berkualitas juga meningkatkan kepercayaan publik, karena masyarakat merasa bahwa lembaga demokrasi bekerja untuk kepentingan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik adalah langkah yang penting dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.

Reformasi kelembagaan yang berorientasi pada pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas demokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif. Schedler (2002) menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dengan menghapus praktik-praktik yang merusak kepercayaan, seperti korupsi. Pemberantasan korupsi adalah langkah penting dalam rangka memperkuat kepercayaan publik, karena korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utama penurunan kepercayaan. Selain itu, reformasi kelembagaan juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperbaiki sistem pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol. Dengan reformasi kelembagaan, lembaga demokrasi dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melayani kepentingan publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif. Iklim politik yang sehat dan partisipatif sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi, karena mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik dan mendukung kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga demokrasi. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang berorientasi pada pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas demokrasi adalah langkah yang penting dalam rangka membangun demokrasi yang stabil dan inklusif.

Di Indonesia, beberapa upaya telah dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Reformasi birokrasi ini melibatkan perbaikan sistem pengambilan

kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi melalui berbagai kebijakan dan program. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menindak tegas para pelaku korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Upaya-upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi berlangsung secara berkelanjutan dan mencakup semua aspek lembaga demokrasi. Selain itu, tantangan lain adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kegiatan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong reformasi kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi melalui berbagai upaya yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, parlemen, badan kehakiman, dan lembaga penyelenggara pemilu harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan kontrol terhadap tindakan lembaga demokrasi, sehingga memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja sesuai dengan kepentingan publik. Media massa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang tindakan lembaga demokrasi, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan tersebut. Selain itu, media massa juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kegiatan demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak adalah penting dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif.

Pendidikan demokrasi juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sistem demokrasi bekerja dan bagaimana dapat berpartisipasi dalam proses politik. Dengan pendidikan demokrasi, masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai demokrasi dan lebih percaya pada lembaga demokrasi. Selain itu, pendidikan demokrasi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi adalah salah satu faktor penting yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan formal di sekolah, program pendidikan non-formal, dan kampanye publik. Dengan pendidikan demokrasi yang efektif, kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif.

Peran media sosial dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi juga tidak dapat diabaikan. Media sosial telah menjadi sarana yang penting bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan berbagi informasi tentang berbagai isu politik dan sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih luas dan beragam tentang tindakan lembaga demokrasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan kegiatan demokrasi. Masyarakat dapat mengungkapkan pendapatnya, mengadvokasi kepentingan, dan berinteraksi dengan para pemimpin politik melalui media sosial. Namun, perlu diingat bahwa media sosial juga dapat menjadi sumber informasi yang salah dan tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan literasi media sosial agar dapat memilih dan menilai informasi dengan tepat. Dengan kemampuan literasi media sosial yang baik, masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Oleh karena itu, peran media sosial dalam memperkuat kepercayaan publik

terhadap lembaga demokrasi adalah penting, tetapi perlu diimbangi dengan kemampuan literasi media sosial yang baik.

Pada rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, penting untuk memperhatikan peran pemimpin politik. Pemimpin politik memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Pemimpin politik yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Selain itu, pemimpin politik juga dapat berperan penting dalam mendorong reformasi kelembagaan dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pemimpin politik dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghargai nilai-nilai demokrasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik untuk memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi agar dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Selain itu, pemimpin politik juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, media massa, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Dengan kerja sama yang baik antara pemimpin politik dan berbagai pihak, kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan iklim politik yang sehat dan partisipatif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Demokrasi

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan suatu sistem politik. Kepercayaan ini tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kinerja lembaga itu sendiri hingga persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi. Menurut Mishler dan Rose (2001), kepercayaan terhadap institusi politik terbentuk melalui dua jalur utama: pengalaman langsung masyarakat dengan lembaga tersebut dan penilaian terhadap kinerja lembaga dalam menjalankan fungsinya. Pengalaman langsung ini mencakup interaksi warga dengan birokrasi, partai politik, maupun lembaga perwakilan, sementara penilaian kinerja meliputi sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mampu memenuhi harapan publik dalam menjalankan mandat demokratis.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepercayaan publik adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga demokrasi. Lembaga yang terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Sebaliknya, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakjelasan dalam pembuatan kebijakan dapat dengan cepat mengikis kepercayaan publik. Di Indonesia, misalnya, skandal korupsi yang melibatkan anggota legislatif atau pejabat eksekutif sering kali berdampak pada turunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara (Hadiz & Robison, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa integritas moral dan etika para pemegang kekuasaan berperan sentral dalam membangun atau merusak kepercayaan publik.

Media juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap demokrasi. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang mempengaruhi cara publik menilai kinerja pemerintah dan lembaga politik. Namun, ketika media terpolarisasi atau menyebarkan informasi yang tidak akurat, hal ini dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat. Norris (2011) menekankan bahwa media yang independen dan berkualitas sangat penting untuk menciptakan diskursus publik yang sehat. Di era digital, tantangan semakin kompleks dengan maraknya hoaks dan disinformasi di platform media sosial, yang sering kali digunakan untuk menyerang legitimasi lembaga demokrasi (Lim, 2017). Oleh karena itu, literasi media menjadi krusial agar masyarakat dapat menilai informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang merusak kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Polarisasi politik juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan secara ideologis, kepercayaan terhadap institusi politik sering kali terkikis karena setiap kelompok cenderung memandang lembaga negara melalui kacamata kepentingan politik sendiri. Misalnya, kelompok yang kalah dalam pemilihan umum mungkin akan memandang lembaga pemilu atau sistem peradilan dengan skeptis jika merasa tidak diuntungkan oleh keputusan-keputusan yang diambil. Fenomena ini terlihat jelas di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana polarisasi pasca-Pemilu 2019 meninggalkan jejak

ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok politik tertentu. Kondisi seperti ini memperumit upaya membangun konsensus dan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi.

Keterwakilan politik juga merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat cenderung lebih percaya terhadap lembaga demokrasi jika merasa suara dan kepentingannya terwakili dengan baik. Sebaliknya, jika lembaga legislatif atau partai politik dianggap hanya mewakili elite tertentu atau kelompok kepentingan yang sempit, kepercayaan publik akan menurun. Di Indonesia, misalnya, meskipun sistem pemilu telah dirancang untuk lebih inklusif, masih ada keluhan dari berbagai kelompok, seperti masyarakat adat atau minoritas agama, yang merasa kepentingannya kurang diperhatikan dalam proses politik (Aspinall, 2019). Ketidakpuasan seperti ini jika terus menumpuk dapat menggerogoti legitimasi lembaga demokrasi dan memicu apatisme politik di kalangan warga.

Pendidikan politik masyarakat juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Masyarakat yang memahami mekanisme demokrasi dan hak-hak politik cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja lembaga-lembaga negara. Sebaliknya, rendahnya pemahaman politik dapat membuat masyarakat mudah terjebak dalam sikap apatis atau justru mendukung pandangan-pandangan yang merusak demokrasi, seperti dukungan terhadap otoritarianisme (Dalton, 2008). Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi politik melalui pendidikan formal maupun kampanye publik harus menjadi prioritas. Di Indonesia, program-program civic education yang digalakkan oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah daerah telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi.

Pengalaman historis suatu bangsa juga turut membentuk tingkat kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Masyarakat yang memiliki trauma terhadap rezim otoriter di masa lalu mungkin akan lebih kritis dan menuntut akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah saat ini. Sebaliknya, di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat, kepercayaan terhadap institusi politik cenderung lebih stabil. Indonesia, dengan pengalaman transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke demokrasi, menunjukkan bagaimana memori kolektif terhadap masa lalu dapat mempengaruhi harapan masyarakat terhadap lembaga-lembaga

demokrasi saat ini. Proses demokratisasi pasca-Reformasi 1998 memang telah membawa banyak kemajuan, tetapi warasan ketidakpercayaan terhadap negara yang terbentuk selama puluhan tahun tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat (Aspinall, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kontrol sosial juga merupakan faktor krusial dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Ketika warga merasa memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah, cenderung lebih percaya terhadap sistem yang ada. Mekanisme seperti pengaduan publik, aksi protes damai, atau keterlibatan dalam forum musyawarah dapat memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap proses demokrasi (Fox, 2015). Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil yang mengadvokasi transparansi anggaran atau memantau pelaksanaan pemilu merupakan contoh bagaimana partisipasi aktif dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

BAB VI
TANTANGAN DEMOKRASI DI MASA DEPAN

Tantangan demokrasi di masa depan semakin kompleks dan multidimensional seiring dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan perubahan politik global yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, demokrasi menghadapi berbagai ancaman mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik hingga meningkatnya polarisasi sosial dan penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, transformasi digital dan media sosial membawa dampak signifikan terhadap cara warga negara berinteraksi dengan proses politik, sekaligus membuka peluang baru sekaligus risiko manipulasi politik dan propaganda yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, globalisasi ekonomi dan pergeseran geopolitik juga mempengaruhi stabilitas politik nasional dengan menghadirkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, migrasi, dan konflik identitas yang dapat mengancam kohesi sosial dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat demokrasi di masa depan harus mampu merespons berbagai tantangan ini melalui inovasi kebijakan, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan mekanisme partisipasi dan akuntabilitas yang inklusif. Demokrasi yang adaptif dan resilien menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sistem politik yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat serta menjamin hak-hak warga negara dalam menghadapi kompleksitas zaman yang terus berubah.

A. Politik Uang dan Oligarki

1. Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Politik uang merupakan salah satu persoalan serius yang terus menghantui pelaksanaan pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Politik uang adalah praktik di mana uang atau materi diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih, calon, atau pihak terkait dalam rangka mempengaruhi hasil pemilu (Hadiz, 2014). Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan suara, tetapi juga mencederai integritas proses demokrasi serta memperlemah legitimasi lembaga-lembaga politik.

Pada konteks Indonesia, politik uang telah menjadi budaya politik yang sulit dihapuskan meskipun ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Mietzner, 2013). Praktik ini sering kali didukung oleh jaringan patronase yang kuat antara elite politik dan pelaku ekonomi, sehingga memperkuat oligarki politik yang berdampak pada ketidakadilan dalam persaingan politik (Aspinal & Fealy, 2003). Politik uang juga mendorong calon untuk mengeluarkan biaya politik yang sangat besar, yang kemudian mempengaruhi perilaku politik setelah terpilih, seperti mengutamakan kepentingan donor daripada rakyat (Muhtadi, 2016).

Dampak negatif politik uang terhadap demokrasi cukup luas, mulai dari menurunnya kualitas partisipasi politik masyarakat yang menjadi apatis dan skeptis, hingga terjadinya korupsi dan ketimpangan dalam pengambilan kebijakan publik (Schaffer, 2007). Politik uang menciptakan siklus di mana uang menjadi penentu utama dalam politik, bukan visi atau program kerja calon, sehingga menggerus prinsip demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, transparansi, dan pendidikan politik kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi praktik politik uang dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia (Törnquist, 2000).

2. Oligarki Politik: Struktur Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi

Oligarki politik mengacu pada penguasaan kekuasaan politik oleh segelintir kelompok atau elite yang memiliki sumber daya ekonomi,

politik, dan sosial yang besar. Winters (2011) mendefinisikan oligarki politik sebagai struktur kekuasaan di mana sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki sumber daya besar menguasai kekuasaan politik. Dalam demokrasi yang ideal, kekuasaan politik seharusnya tersebar merata dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, oligarki seringkali menguasai proses politik dan pengambilan keputusan, sehingga membatasi partisipasi demokratis dan memperkuat ketimpangan kekuasaan. Oligarki politik dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses ke kekuasaan politik, di mana kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar dapat mendominasi proses politik dan pengambilan keputusan, sementara kelompok-kelompok lain yang kurang berkekuatan ekonomi dan sosial terpinggirkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam representasi dan kebijakan publik, di mana kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan oligarki daripada kepentingan publik secara luas.

Di Indonesia, oligarki politik tumbuh subur terutama setelah era Reformasi, meskipun sistem demokrasi telah terbuka lebih luas dibandingkan masa Orde Baru. Hadiz (2010) menunjukkan bahwa setelah era Reformasi, oligarki politik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Kelompok oligarkis yang terdiri dari pengusaha besar, elite politik, dan pejabat negara, mengendalikan berbagai sektor penting, termasuk media, ekonomi, dan birokrasi. Mietzner (2015) juga menunjukkan bahwa oligarki politik di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap proses politik dan pengambilan keputusan. Keberadaan oligarki ini mengakibatkan dominasi kelompok tertentu dalam menentukan arah kebijakan publik dan hasil pemilu, yang sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara luas. Kurlantzick (2017) menunjukkan bahwa oligarki politik di Indonesia dapat mempengaruhi hasil pemilu dan pembentukan pemerintahan, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam representasi dan kebijakan publik. Oligarki politik di Indonesia juga berkontribusi pada praktik politik uang karena kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya finansial yang besar. Robison & Hadiz (2004) menunjukkan bahwa oligarki politik di Indonesia seringkali menggunakan sumber daya finansial untuk mempengaruhi hasil pemilu dan pembentukan pemerintahan. Fenomena ini menyebabkan demokrasi di Indonesia

mengalami distorsi, di mana elit oligarki lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik.

Upaya pemberantasan oligarki membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, termasuk transparansi keuangan politik, penguatan institusi pengawas, dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel. Aspinal & Fealy (2003) menunjukkan bahwa reformasi struktural yang mendalam diperlukan untuk mengatasi masalah oligarki politik di Indonesia. Transparansi keuangan politik adalah salah satu langkah penting dalam mengatasi oligarki politik. Dengan meningkatkan transparansi keuangan politik, dapat diharapkan bahwa penggunaan sumber daya finansial dalam politik akan lebih terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Penguatan institusi pengawas juga penting dalam mengatasi oligarki politik. Institusi pengawas yang kuat dapat memastikan bahwa tindakan oligarki politik dapat diawasi dan diatur dengan baik. Pemberdayaan masyarakat sipil juga merupakan langkah penting dalam mengatasi oligarki politik. Dengan memberdayakan masyarakat sipil, dapat diharapkan bahwa masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi dan mengontrol tindakan oligarki politik. Oleh karena itu, reformasi struktural yang mendalam, termasuk transparansi keuangan politik, penguatan institusi pengawas, dan pemberdayaan masyarakat sipil, sangat penting dalam mengatasi oligarki politik di Indonesia dan mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan akuntabel.

Oligarki politik juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara. Ketika kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir kelompok atau elite, dapat terjadi ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan. Ketidakpuasan ini dapat memicu konflik sosial dan politik, sehingga mengancam stabilitas negara. Selain itu, oligarki politik juga dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi, karena masyarakat merasa bahwa lembaga-lembaga tersebut lebih melayani kepentingan oligarki daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah oligarki politik agar stabilitas politik dan sosial dapat terjaga. Upaya untuk mengatasi oligarki politik dapat dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah tersebut,

diharapkan bahwa kekuasaan politik dapat lebih tersebar merata dan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik.

Oligarki politik juga dapat mempengaruhi kualitas kebijakan publik dalam suatu negara. Ketika kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir kelompok atau elite, kebijakan publik yang dihasilkan seringkali lebih mencerminkan kepentingan oligarki daripada kepentingan publik secara luas. Kebijakan yang dihasilkan oleh oligarki politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, karena kebijakan tersebut lebih memperkuat posisi oligarki daripada memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, oligarki politik juga dapat mengakibatkan ketidakefektifan kebijakan publik, karena kebijakan yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan oligarki daripada oleh pertimbangan kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah oligarki politik agar kualitas kebijakan publik dapat ditingkatkan. Upaya untuk mengatasi oligarki politik dapat dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa kebijakan publik dapat lebih mencerminkan kepentingan publik secara luas dan dapat berfungsi dengan lebih efektif.

B. Polarisasi Politik dan Disinformasi

1. Polarisasi Politik sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia

Polarisasi politik di Indonesia telah menjadi fenomena yang menonjol dalam lanskap demokrasi pasca-Reformasi. Fenomena ini mengacu pada pembelahan tajam dalam masyarakat ke dalam kubu-kubu politik yang memiliki perbedaan ideologis, kepentingan, dan identitas yang semakin mengeras. Polarisasi tidak sekadar perbedaan pendapat, tetapi berkembang menjadi antagonisme yang memperlakukan kelompok lain sebagai ancaman. Sejak era pemilihan langsung dimulai, khususnya dalam pemilu presiden dan kepala daerah, kontestasi politik yang seharusnya berlangsung secara sehat dan kompetitif malah berkembang menjadi ajang pertarungan emosional antarpendukung. Polarisasi ini diperkuat oleh narasi yang menyentuh ranah identitas primordial seperti agama, etnis, dan status sosial, sehingga menambah kedalaman pembelahan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Gejala polarisasi ini semakin terlihat pada pemilu 2014 dan 2019, ketika wacana politik tidak hanya didominasi oleh perdebatan isu kebijakan, tetapi juga oleh serangan identitas dan retorika permusuhan. Pertarungan antara dua kandidat utama tidak hanya berlangsung di arena kampanye resmi, melainkan juga membelah ruang sosial dan komunitas, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Media sosial, khususnya, telah menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi yang bias, hoaks, dan ujaran kebencian yang memperkuat sikap eksklusif antar kelompok. Akibatnya, masyarakat semakin terkotak-kotak dalam ruang gema yang memperkuat pandangan kelompoknya sendiri dan menolak informasi dari pihak lain. Situasi ini menyebabkan ruang dialog politik yang seharusnya terbuka dan rasional menjadi tertutup dan sarat emosi.

Kondisi semacam ini membahayakan semangat deliberatif yang menjadi fondasi dari demokrasi. Ketika masyarakat hanya mau mendengar dan berinteraksi dengan kelompok yang sepaham, nilai-nilai toleransi, kompromi, dan saling pengertian sebagai pilar utama demokrasi akan melemah. Polarisasi politik, dalam jangka panjang, dapat mengikis rasa saling percaya antarwarga negara dan menumbuhkan sikap eksklusivitas yang menghambat kerja sama sosial. Bukan tidak mungkin, ketegangan politik yang terus dipelihara akan menjalar menjadi konflik horizontal yang merusak stabilitas sosial dan politik nasional. Negara demokratis yang sehat membutuhkan masyarakat yang bersedia berdebat secara rasional dan terbuka terhadap perbedaan, bukan masyarakat yang saling menegasikan eksistensi pihak lain hanya karena perbedaan pilihan politik.

Polarisasi yang terus dibiarkan tanpa penanganan dapat berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa institusi negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga peradilan dianggap tidak netral atau berpihak kepada satu kelompok politik tertentu, maka kepercayaan terhadap proses demokrasi pun runtuh. Norris dan Inglehart (2019) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan semacam ini berujung pada menurunnya partisipasi politik karena warga merasa bahwa suara tidak akan membawa perubahan. Dalam konteks Indonesia, indikasi ini sudah mulai terlihat, misalnya dalam bentuk meningkatnya jumlah golput (golongan putih) dalam beberapa pemilu terakhir, terutama di kalangan muda yang kecewa terhadap atmosfer politik yang terlalu penuh konflik dan intrik.

Polarisasi juga memperburuk kualitas diskursus publik. Isu-isu penting yang seharusnya menjadi perhatian bersama seperti pendidikan, kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan lingkungan justru tenggelam oleh wacana yang bersifat sektarian dan penuh sentimen identitas. Para aktor politik cenderung memanfaatkan sentimen ini untuk mendulang dukungan instan, alih-alih membangun visi dan program kebijakan yang menyeluruh dan berbasis data. Dengan demikian, polarisasi tidak hanya mengganggu hubungan sosial, tetapi juga menciptakan disinsentif bagi politisi untuk berkompetisi secara substantif. Akibatnya, pemilu sebagai mekanisme akuntabilitas publik berubah menjadi kontestasi yang dangkal dan penuh simbolisme, tanpa menawarkan solusi nyata terhadap permasalahan bangsa.

Penyebab utama dari menguatnya polarisasi di Indonesia adalah lemahnya pendidikan politik yang dapat menumbuhkan sikap kritis dan empati terhadap perbedaan. Masyarakat yang tidak terbiasa berpikir kritis cenderung lebih mudah percaya pada narasi manipulatif, konspiratif, dan propaganda yang bertujuan memperkuat pembelahan sosial. Di samping itu, masih minimnya ruang publik yang dapat menjembatani dialog antar kelompok berbeda memperparah situasi. Alih-alih mempertemukan pandangan yang berbeda, ruang-ruang diskusi publik sering kali dijadikan ajang konfrontasi yang semakin memperkuat permusuhan. Di sinilah pentingnya membangun literasi politik dan ruang deliberatif yang inklusif, baik di dunia nyata maupun digital, agar masyarakat dapat terlibat secara lebih matang dalam kehidupan politik dan tidak mudah terjebak dalam dinamika polarisasi yang destruktif.

Solusi untuk mengurangi dampak polarisasi politik tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Pertama, reformasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada penguatan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan di sekolah dan di masyarakat harus diarahkan untuk menciptakan warga negara yang mampu berdialog, menghargai perbedaan, dan mengambil sikap politik berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosional. Kedua, lembaga media, baik arus utama maupun digital, perlu didorong untuk mengambil peran yang lebih etis dalam menyajikan informasi, harus menjadi penjernih opini publik, bukan justru memperkeruh situasi dengan menebar sensasi dan bias. Regulasi dan mekanisme etik yang

ketat perlu diterapkan untuk mengendalikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menjadi bahan bakar utama polarisasi.

2. Disinformasi dan Peran Media Sosial dalam Memperkuat Polarisasi

Disinformasi, yaitu penyebaran informasi palsu yang disengaja untuk menyesatkan publik, telah menjadi salah satu tantangan utama demokrasi modern, terutama di era digital. Wardle & Derakhshan (2017) mengemukakan bahwa disinformasi dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan mengganggu proses politik yang sehat. Di Indonesia, penyebaran disinformasi melalui media sosial sangat masif dan cepat, terutama selama masa kampanye politik dan pemilu. Platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter (X) menjadi saluran utama yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong, hoaks, dan propaganda yang memperburuk polarisasi politik. Pratama (2020) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ladang subur bagi penyebaran disinformasi, yang dapat dengan mudah menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat. Hal ini mengakibatkan persepsi dan sikap politik warga negara menjadi terdistorsi, sehingga menghambat proses demokrasi yang inklusif dan berdasarkan pada informasi yang akurat.

Disinformasi ini tidak hanya mempengaruhi persepsi dan sikap politik warga negara, tetapi juga memicu konflik sosial dan menghambat dialog yang konstruktif. Berbagai studi, termasuk yang dilakukan oleh Sulastri dan Haryanto (2021), mengungkapkan bahwa masyarakat yang terpapar disinformasi cenderung memperkuat bias konfirmasi dan menutup diri terhadap pandangan yang berbeda. Lebih memilih untuk percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan dan pandangan politik, meskipun informasi tersebut adalah palsu. Hal ini memperkuat sikap eksklusif dan intoleran yang semakin memperparah polarisasi politik di Indonesia. Ketika masyarakat terpapar disinformasi, menjadi lebih sulit untuk menerima pandangan yang berbeda dan lebih cenderung untuk menyerang atau mengabaikan pandangan tersebut. Hal ini mengakibatkan dialog yang konstruktif menjadi sulit terjadi, sehingga menghambat proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Upaya mengatasi disinformasi memerlukan pendekatan multifaset, termasuk penguatan literasi digital dan media bagi masyarakat. Literasi digital dan media sangat penting dalam membekali

masyarakat dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai kebenaran informasi yang diterima. Dengan literasi digital dan media yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan lebih mudah untuk mengenali disinformasi. Pendidikan tentang literasi digital dan media dapat dilakukan melalui sekolah, program komunitas, dan kampanye publik. Selain itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan literasi digital dan media masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital dan media, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi dan lebih terlibat dalam proses demokrasi yang sehat.

Regulasi yang ketat terhadap penyebaran konten hoaks juga merupakan salah satu upaya penting dalam mengatasi disinformasi. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan tegas terhadap penyebaran konten hoaks, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku disinformasi. Regulasi tersebut dapat mencakup sanksi hukum bagi yang sengaja menyebarluaskan informasi palsu, serta pengawasan terhadap platform media sosial untuk memastikan bahwa tidak menjadi sarana bagi penyebaran disinformasi. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan penghapusan konten hoaks. Dengan regulasi yang ketat, diharapkan penyebaran disinformasi dapat dikurangi dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatifnya.

C. Menurunnya Kepercayaan Publik

1. Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Demokrasi

Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi merupakan fondasi vital yang menentukan kekuatan dan ketahanan sistem politik suatu negara. Tanpa kepercayaan ini, legitimasi lembaga-lembaga demokrasi akan terus terkikis, berpotensi mengarah pada krisis politik yang lebih dalam. Di Indonesia, tren penurunan kepercayaan terhadap lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun partai politik telah menjadi perhatian serius para pengamat politik dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan

dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berinteraksi secara kompleks.

Salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan publik adalah maraknya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan politisi. Kasus-kasus korupsi besar seperti yang menimpa anggota DPR, pejabat kementerian, atau kepala daerah telah menciptakan citra buruk tentang lembaga demokrasi di mata masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus korupsi justru terjadi di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, seperti kepolisian dan kejaksaan. Masyarakat semakin skeptis ketika melihat proses hukum terhadap koruptor seringkali berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera, sementara rakyat kecil harus menanggung akibat dari korupsi tersebut melalui pelayanan publik yang buruk dan pembangunan yang tidak merata.

Faktor kedua yang turut menyumbang pada krisis kepercayaan ini adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Banyak kebijakan penting yang dirumuskan secara tertutup oleh segelintir elite politik tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Proses penganggaran, misalnya, seringkali tidak dapat diakses secara penuh oleh masyarakat, menimbulkan kecurigaan adanya pemborosan atau penyimpangan. Ketika publik merasa dikucilkan dari proses politik dan hanya dijadikan objek keputusan semata, rasa tidak percaya terhadap institusi demokrasi pun semakin menguat. Hal ini diperparah oleh budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup dan resisten terhadap pengawasan masyarakat.

Media massa dan platform digital turut berperan signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap lembaga demokrasi. Di satu sisi, media berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang penting, namun di sisi lain, pemberitaan yang terlalu fokus pada konflik dan skandal tanpa konteks yang memadai dapat menciptakan distorsi persepsi. Di era digital saat ini, penyebaran informasi palsu (hoaks) dan narasi-narasi provokatif tentang lembaga negara telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Banyak konten di media sosial yang sengaja dirancang untuk merusak reputasi institusi demokrasi tertentu, seringkali didorong oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Masyarakat yang kurang memiliki literasi media yang memadai mudah terpapar dan terpengaruh oleh narasi-narasi semacam ini.

Polarisasi politik yang semakin tajam dalam beberapa tahun terakhir juga berkontribusi pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Konflik politik yang berlarut-larut telah membagi masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan, di mana masing-masing kelompok cenderung memandang lembaga negara melalui kacamata kepentingan kelompoknya sendiri. Lembaga-lembaga netral seperti KPU dan MK seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan dari kelompok yang kalah dalam kontestasi politik. Polarisasi ini tidak hanya merusak iklim politik nasional, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi secara keseluruhan, karena masyarakat mulai mempertanyakan netralitas dan objektivitas lembaga-lembaga tersebut.

Kinerja lembaga demokrasi yang dinilai tidak memenuhi harapan publik juga menjadi faktor penting. Banyak warga yang merasa bahwa DPR tidak cukup produktif dalam menghasilkan undang-undang yang pro-rakyat, atau bahwa birokrasi pemerintahan tidak efektif dalam memberikan pelayanan publik. Ketika harapan masyarakat terhadap kemampuan lembaga-lembaga negara dalam menyelesaikan masalah-masalah konkret seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan tidak terpenuhi, kekecewaan dan ketidakpercayaan pun muncul. Persoalan ini semakin kompleks ketika lembaga-lembaga tersebut justru terlihat sibuk dengan urusan-urusan politis dan konflik internal, sementara masalah-masalah mendasar rakyat tidak kunjung teratasi.

Budaya politik patrimonial yang masih kuat juga turut mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Dalam sistem seperti ini, hubungan antara negara dan warga negara seringkali lebih bersifat patron-klien daripada hubungan yang setara antara penyelenggara negara dan pemilik kedaulatan. Praktik-praktik seperti nepotisme, kolusi, dan politik uang semakin mengukuhkan persepsi publik bahwa institusi demokrasi hanya menjadi alat bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan dan mengeruk keuntungan pribadi. Ketika masyarakat melihat bahwa akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan jaringan tertentu, kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan pun menurun.

Ketidakpuasan terhadap sistem elektoral juga berkontribusi pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Banyak pemilih yang merasa bahwa suaranya tidak benar-benar berarti dalam menentukan arah pembangunan negara, karena setelah pemilu selesai,

para wakil rakyat seringkali dianggap tidak lagi mendengarkan aspirasi konstituen. Sistem kepartaian yang dianggap tidak representatif, di mana partai-partai besar mendominasi sementara suara-suara minoritas terabaikan, semakin memperkuat perasaan keterasingan politik di kalangan masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap proses elektoral ini berpotensi menurunkan partisipasi politik warga dalam jangka panjang.

2. Dampak Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Salah satu dampak utama adalah menurunnya tingkat partisipasi politik, termasuk partisipasi dalam pemilu, pemilihan kepala daerah, dan kegiatan politik lainnya. Dalton (2017) menunjukkan bahwa ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, cenderung menjadi apatis dan menarik diri dari proses politik. Hal ini menyebabkan demokrasi menjadi kurang representatif, karena masyarakat yang tidak terlibat dalam proses politik tidak dapat menyampaikan suara dan kepentingan melalui mekanisme demokratis seperti pemilu. Selain itu, legitimasi pemimpin terpilih juga menjadi lemah, karena dipilih oleh sebagian kecil masyarakat yang tetap terlibat dalam proses politik. Dengan tingkat partisipasi politik yang rendah, demokrasi menjadi rentan terhadap kepentingan kelompok kecil yang dominan dalam proses politik, sehingga mengancam kualitas dan stabilitas demokrasi jangka panjang.

Menurunnya kepercayaan juga mendorong munculnya sikap skeptis dan sinis terhadap proses politik, yang dapat berujung pada polarisasi sosial dan konflik horizontal. Pharr & Putnam (2000) mengemukakan bahwa ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, menjadi lebih skeptis dan sinis terhadap proses politik secara umum. Sikap ini dapat memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mempercayai kelompok-kelompok alternatif yang sering kali tidak bertanggung jawab atau bahkan anti-demokrasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko disintegrasi sosial, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan tidak mau bekerja sama. Selain itu, polarisasi sosial juga dapat memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dengan meningkatnya

polarisasi sosial dan konflik horizontal, demokrasi menjadi lebih rentan terhadap gangguan dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai sistem pemerintahan yang inklusif dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Pada konteks Indonesia, penurunan kepercayaan ini juga memperbesar ruang bagi politik identitas dan populisme yang eksklusif. Muhtadi (2018) menunjukkan bahwa dalam lingkungan politik dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah, kelompok-kelompok tertentu sering menggunakan sentimen sektarian atau etnis untuk meraih dukungan politik. Politik identitas dan populisme eksklusif ini dapat memperuncing konflik sosial dan memperlemah ikatan sosial nasional. Hal ini terjadi karena kelompok-kelompok tersebut lebih fokus pada kepentingan kelompok sendiri daripada kepentingan publik secara luas. Selain itu, politik identitas dan populisme eksklusif juga dapat mengancam stabilitas politik dan proses demokrasi jangka panjang, karena sering menggunakan retorika yang memecah belah dan tidak mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan kerukunan sosial. Dengan meningkatnya politik identitas dan populisme eksklusif, demokrasi di Indonesia menjadi lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai sistem pemerintahan yang inklusif dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya serius dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas. Norris (2011) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga demokrasi adalah kunci penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Pemerintah dan partai politik perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, juga perlu meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa lembaga-lembaga demokrasi bekerja untuk kepentingan publik. Pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan inklusivitas juga penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat lebih memahami sistem demokrasi dan nilai-nilai yang mendasarinya, sehingga lebih terlibat dalam proses politik dan lebih percaya terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran politik juga menjadi kunci penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perlu diperkuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran politik, seperti korupsi dan pelanggaran dalam pemilu, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, pemerintah dan partai politik perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan bahwa proses politik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi dapat ditingkatkan dan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat.

Upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi juga perlu melibatkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan kontrol terhadap tindakan lembaga-lembaga demokrasi, sehingga memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja sesuai dengan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan nilai-nilai demokrasi. Melalui kampanye publik, masyarakat dapat lebih terinspirasi untuk terlibat dalam proses politik dan lebih percaya terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan partai politik untuk mengembangkan program-program pendidikan politik yang efektif dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat sipil dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi dapat ditingkatkan dan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat.

D. Tantangan Generasi Muda dalam Demokrasi Digital

1. Peran dan Risiko Generasi Muda dalam Era Demokrasi Digital

Generasi muda saat ini berperan strategis dalam era demokrasi digital karena merupakan pengguna utama teknologi informasi dan media sosial. Keakrabannya dengan berbagai platform digital

menjadikan kelompok ini sebagai aktor utama dalam menyuarakan pendapat, memperjuangkan isu-isu sosial-politik, dan membentuk opini publik. Fenomena ini menandai transformasi signifikan dalam cara demokrasi dijalankan, dari yang semula bersifat konvensional menjadi lebih terbuka, interaktif, dan berbasis teknologi. Media sosial, dalam konteks ini, menjadi arena baru bagi generasi muda untuk mengartikulasikan kepentingannya secara langsung tanpa perantara institusi formal.

Kehadiran media digital dalam ranah politik telah memungkinkan generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam diskursus publik. Teknologi digital menurunkan hambatan-hambatan struktural seperti jarak geografis dan keterbatasan akses terhadap informasi. Melalui media sosial, pemuda dapat berinteraksi secara langsung dengan para pemimpin, mengikuti proses legislasi, bahkan mengorganisir gerakan kolektif. Kondisi ini memberi ruang yang lebih luas bagi demokrasi deliberatif di mana suara individu, termasuk kaum muda, dapat lebih didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Peluang partisipasi yang besar ini juga menyimpan risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital, yang menyebabkan generasi muda rentan terhadap paparan informasi palsu dan disinformasi. Ketidakmampuan untuk membedakan antara fakta dan hoaks berpotensi merusak kualitas keputusan politik yang diambil. Dalam banyak kasus, misinformasi telah digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik, termasuk melalui kampanye politik yang manipulatif dan tidak etis, sehingga mengancam integritas sistem demokrasi itu sendiri.

Masalah ini diperparah dengan keberadaan algoritma media sosial yang menciptakan ruang informasi yang terfragmentasi. Generasi muda cenderung hanya menerima informasi yang selaras dengan pandangan sendiri karena algoritma menyaring dan menyesuaikan konten sesuai preferensi pengguna. Fenomena ini dikenal sebagai echo chamber atau ruang gema, di mana individu terjebak dalam lingkungan yang memperkuat keyakinan tanpa konfrontasi dengan pandangan yang berbeda. Akibatnya, dialog lintas pandangan menjadi langka dan perpecahan dalam masyarakat semakin menguat.

Konsep filter bubble juga turut mempersempit wawasan politik generasi muda, yang terjebak dalam filter bubble hanya menerima

informasi dari sumber-sumber tertentu yang berulang, menciptakan kesan semu bahwa pandangannya adalah satu-satunya yang valid. Padahal, demokrasi membutuhkan keterbukaan terhadap keragaman opini agar kompromi dan solusi bersama dapat tercapai. Kurangnya paparan terhadap sudut pandang yang berbeda ini berpotensi melemahkan fondasi toleransi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokratis.

Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi penguatan kapasitas kritis generasi muda. Tanpa kemampuan literasi digital dan literasi politik yang memadai, partisipasi digital hanya akan menjadi aktivitas permukaan yang mudah dimanipulasi oleh kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis untuk memasukkan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum formal maupun nonformal, agar generasi muda memiliki keterampilan evaluatif dalam mengakses dan mengelola informasi di dunia maya.

Di tengah tantangan tersebut, potensi demokrasi digital untuk memperluas partisipasi tetap tidak bisa dikesampingkan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak inisiatif dari anak muda yang memanfaatkan media digital untuk membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan sosial. Gerakan petisi online, kampanye kesadaran isu, hingga forum diskusi daring menunjukkan bahwa generasi muda mampu memobilisasi massa untuk tujuan bersama melalui cara-cara baru yang lebih inklusif dan efisien. Hal ini mencerminkan bahwa jika dikelola dengan baik, demokrasi digital dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk memperkuat demokrasi partisipatoris.

Keterlibatan politik anak muda dalam ruang digital berpotensi menjadi katalisator perubahan sosial-politik yang progresif. Penggunaan teknologi bukan hanya mempercepat penyebaran ide, tetapi juga memperluas jejaring sosial dan solidaritas lintas batas. Dalam konteks ini, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen gagasan dan inovasi politik yang segar. Peran aktif ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tidak terjebak dalam bentuk-bentuk formalitas yang kaku.

2. Tantangan Sosial dan Politik yang Dihadapi Generasi Muda dalam Demokrasi Digital

Generasi muda saat ini menghadapi tantangan multidimensi dalam berpartisipasi di demokrasi digital, di mana kesenjangan akses menjadi masalah mendasar yang perlu diatasi. Meskipun teknologi digital dianggap mampu mendemokratisasi partisipasi politik, realitanya masih terdapat disparitas yang signifikan antara yang memiliki akses penuh terhadap infrastruktur digital dengan yang tidak. Anak muda di daerah terpencil seringkali terkendala jaringan internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia, sementara di perkotaan, meskipun akses lebih baik, biaya perangkat dan koneksi tetap menjadi hambatan bagi kalangan ekonomi lemah. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kesempatan berpartisipasi, di mana hanya segelintir pemuda dengan privilese tertentu yang bisa aktif menyuarakan pendapatnya secara online, sementara yang lain tetap terpinggirkan dalam proses demokratis.

Budaya politik yang masih kental dengan patrimonialisme dan oligarki turut membatasi ruang gerak generasi muda dalam demokrasi digital. Di banyak daerah, sistem politik masih didominasi oleh keluarga atau kelompok tertentu yang memonopoli kekuasaan melalui jaringan patronase yang sudah mengakar. Generasi muda yang ingin terlibat dalam proses politik seringkali dihadapkan pada pilihan sulit: mengikuti aturan main yang sudah ada dengan segala kompromi moralnya, atau tetap pada prinsip tetapi kesulitan mendapatkan tempat. Situasi ini diperparah oleh praktik politik uang yang membuat banyak anak muda idealis merasa tidak memiliki tempat dalam sistem yang ada. Akibatnya, demokrasi digital yang seharusnya menjadi ruang egaliter bagi suara-suara baru, justru sering kali direbut kembali oleh kekuatan-kekuatan lama yang mampu memanipulasi platform digital untuk kepentingan.

Ancaman terhadap keamanan siber dan privasi data menjadi momok tersendiri bagi generasi muda yang aktif di dunia digital. Banyak anak muda yang ragu untuk menyuarakan pendapat politik secara terbuka di media sosial karena khawatir menjadi target peretasan, doxing, atau bentuk-bentuk intimidasi digital lainnya. Kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik tertentu semakin menambah ketakutan ini. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pemerintah daerah diketahui menggunakan pasal-pasal karet seperti UU ITE untuk membungkam kritik dari anak muda, menciptakan efek chilling effect yang membuatnya enggan berpendapat. Kondisi ini jelas

bertentangan dengan semangat demokrasi digital yang seharusnya melindungi kebebasan berekspresi.

Polarisasi politik yang semakin tajam di ruang digital juga menjadi tantangan serius bagi partisipasi generasi muda. Platform media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi sehat justru sering kali berubah menjadi medan pertempuran antara kubu-kubu politik yang saling menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian. Generasi muda yang belum memiliki ketahanan terhadap informasi palsu rentan terjerumus dalam ekosistem informasi yang bias dan penuh permusuhan. Banyak yang akhirnya memilih untuk apatis terhadap politik karena trauma terhadap konflik-konflik tidak produktif di dunia maya, atau justru terjebak dalam fanatisme buta terhadap kelompok politik tertentu tanpa pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang diperdebatkan.

Dominasi algoritma media sosial yang cenderung memperkuat pandangan yang sudah ada (*echo chamber effect*) turut membatasi wawasan politik generasi muda. Sistem rekomendasi konten yang didasarkan pada preferensi pengguna sering kali membuat anak muda hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri, tanpa kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda. Hal ini menciptakan generasi muda yang kurang terlatih dalam berpikir kritis dan berdebat secara sehat, padahal kemampuan tersebut sangat penting dalam demokrasi yang sehat. Yang lebih berbahaya, algoritma ini sering kali lebih memprioritaskan konten-konten sensasional dan provokatif yang bisa memicu konflik, ketimbang diskusi-diskusi substantif tentang kebijakan publik.

Kurangnya pendidikan literasi digital dan kewarganegaraan yang memadai juga menjadi kendala besar. Banyak generasi muda yang mahir menggunakan teknologi digital tetapi tidak dibekali pemahaman yang cukup tentang bagaimana berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam demokrasi digital, mungkin pandai membuat konten viral tetapi tidak memahami implikasi politik dari apa yang disebarkan. Pendidikan formal sering kali gagal mengajarkan keterampilan penting seperti cara memverifikasi informasi, mengenali propaganda, atau berdebat secara rasional tentang isu-isu kebijakan. Akibatnya, banyak partisipasi politik generasi muda di dunia digital yang bersifat reaktif dan emosional, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan informasi yang akurat.

Tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan turut mempengaruhi cara generasi muda berpartisipasi dalam demokrasi

digital. Banyak anak muda yang sebenarnya peduli dengan isu-isu politik tetapi harus fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar seperti mencari pekerjaan atau menyelesaikan pendidikan. Kondisi ini membuat partisipasi politik sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Di sisi lain, ada juga generasi muda yang memanfaatkan keterampilan digital untuk menjadi buzzer politik atau penyebar konten propaganda demi imbalan materi, meskipun mungkin tidak sejalan dengan keyakinan politik yang sebenarnya. Praktik semacam ini merusak kualitas demokrasi digital karena mengubah partisipasi politik dari bentuk keterlibatan warga negara yang otentik menjadi sekadar transaksi ekonomi.

Perlu ada upaya sistematis dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Pemerintah perlu memperluas akses internet merata sekaligus membuat regulasi yang melindungi privasi dan kebebasan berekspresi warganya. Lembaga pendidikan harus mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan konteks kekinian. Platform media sosial perlu bertanggung jawab dalam menciptakan algoritma yang lebih sehat dan memerangi misinformasi. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil bisa berperan dalam membangun ruang-ruang diskusi yang inklusif bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. Hanya dengan pendekatan menyeluruh seperti inilah demokrasi digital bisa benar-benar menjadi sarana pemberdayaan bagi generasi muda, bukan sekadar memperpanjang ketidakadilan yang sudah ada di dunia nyata.

BAB VII
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN KUALITAS DEMOKRASI

Pada dinamika kehidupan politik modern, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta penguatan kualitas demokrasi menjadi dua pilar utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Realitas partisipasi yang fluktuatif dan tantangan demokrasi yang semakin kompleks, seperti polarisasi politik, disinformasi, hingga menurunnya kepercayaan publik, menuntut strategi yang menyeluruh, adaptif, dan berkelanjutan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif warga negara tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, partisipan kebijakan, dan penggerak perubahan sosial-politik. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin relevan mengingat keberagaman masyarakat serta dinamika sosial yang terus berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi yang tidak hanya meningkatkan kuantitas partisipasi yakni berapa banyak orang yang menggunakan hak pilih tetapi juga kualitas partisipasi, yaitu sejauh mana warga memahami isu yang dipilih, menilai secara kritis informasi politik, dan ikut serta dalam diskursus publik yang konstruktif. Penguatan kelembagaan, pendidikan politik sejak dini, pemanfaatan teknologi secara etis, serta pembangunan budaya demokrasi yang inklusif menjadi fondasi penting dalam menyusun strategi yang mampu menjawab tantangan zaman dan memastikan demokrasi Indonesia terus tumbuh ke arah yang lebih partisipatif dan berintegritas.

A. Pendidikan Kewarganegaraan dan Literasi Politik

1. Literasi Politik sebagai Pilar Kritis dalam Demokrasi Digital

Di era digital, literasi politik menjadi semakin penting sebagai alat untuk menghadapi banjir informasi, disinformasi, dan manipulasi opini publik yang kian kompleks. Literasi politik merujuk pada kemampuan individu untuk memahami proses politik, menilai informasi politik secara kritis, serta mengambil sikap dan keputusan berdasarkan analisis rasional dan etis (Mihailidis & Thevenin, 2013). Tanpa literasi politik yang memadai, partisipasi pemilu dan keterlibatan warga dalam demokrasi berisiko menjadi superfisial dan rentan terhadap eksploitasi.

Menurut Kahne dan Bowyer (2017), literasi politik merupakan kombinasi dari pengetahuan politik (*political knowledge*), pemahaman terhadap media (*media literacy*), serta kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*). Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang lembaga demokrasi, fungsi legislatif dan eksekutif, serta proses pemilu, akan lebih mampu menilai validitas informasi politik yang ditemui di media sosial dan platform digital. Sebaliknya, minimnya literasi politik membuat seseorang lebih mudah percaya pada narasi populis, ujaran kebencian, dan propaganda yang menyusup melalui algoritma digital.

Literasi politik juga berkaitan erat dengan resistensi terhadap disinformasi. McGrew *et al*. (2018) menunjukkan bahwa siswa dan pemilih muda yang tidak terlatih dalam menilai sumber informasi cenderung kesulitan membedakan konten berita dari opini atau propaganda. Hal ini mengkhawatirkan dalam sistem demokrasi karena keputusan politik warga tidak lagi didasarkan pada fakta dan argumen rasional, melainkan pada emosi dan kepentingan sempit yang dibentuk oleh manipulasi digital.

Di Indonesia, fenomena "serbuan hoaks" dalam setiap penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa literasi politik belum merata. Laporan MAFINDO (2020) mencatat bahwa selama pemilu 2019, lebih dari 60% hoaks politik tersebar melalui WhatsApp dan Facebook, serta mempengaruhi persepsi pemilih terhadap calon tertentu. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kemampuan verifikasi informasi di kalangan pengguna media sosial, khususnya dari kelompok usia muda dan pendidikan menengah ke bawah.

Untuk meningkatkan literasi politik, perlu dikembangkan program pendidikan yang menyatukan kurikulum politik dan keterampilan digital. Program seperti *News Literacy Project* atau *Civic Online Reasoning* yang diterapkan di beberapa sekolah Amerika Serikat dapat menjadi inspirasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berperan aktif dengan membangun platform edukatif yang melibatkan influencer, content creator, dan komunitas digital dalam kampanye literasi politik berbasis bukti dan dialog.

2. Literasi Politik sebagai Pilar Kritis dalam Demokrasi Digital

Di tengah banjir informasi dan percepatan arus komunikasi digital, literasi politik muncul sebagai kompetensi krusial yang menentukan kualitas partisipasi demokratis warga negara. Kemampuan ini tidak sekadar mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan atau mekanisme pemilu, tetapi lebih mendasar lagi berupa kapasitas untuk menavigasi kompleksitas informasi politik di ruang digital dengan kritis dan bertanggung jawab. Studi Mihailidis dan Thevenin (2013) mengungkapkan bahwa literasi politik di era digital harus mencakup tiga dimensi utama: kemampuan mengakses informasi politik yang beragam, menganalisis konten politik secara mendalam, serta menciptakan dan menyebarkan respon politik yang konstruktif. Ketiga dimensi ini menjadi benteng pertahanan terhadap degradasi kualitas diskursus publik yang semakin terfragmentasi oleh algoritma media sosial.

a. Komponen Utama Literasi Politik Digital

Literasi politik digital merupakan konsep penting dalam era modern, di mana teknologi dan media digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan politik. Kahne dan Bowyer (2017) mengembangkan kerangka yang menggabungkan pengetahuan substantif tentang sistem politik dengan keterampilan media yang adaptif. Pengetahuan tentang checks and balances pemerintahan, misalnya, membantu warga menilai kredibilitas klaim politik tentang kinerja lembaga negara. Hal ini penting karena dalam sistem demokrasi, checks and balances adalah mekanisme yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga negara berfungsi sesuai dengan konstitusi dan hukum. Ketika warga memiliki pengetahuan yang baik tentang checks and balances, dapat lebih kritis dalam menilai klaim

politik yang seringkali digunakan untuk mempengaruhi opini publik, dapat mengidentifikasi apakah klaim tersebut sesuai dengan kenyataan atau hanya merupakan retorika kosong yang bertujuan untuk memperoleh dukungan politik.

Pemahaman tentang bias algoritmik adalah komponen penting lain dalam literasi politik digital. Bias algoritmik terjadi ketika algoritma media sosial, yang dirancang untuk menampilkan konten yang paling relevan bagi pengguna, hanya menampilkan jenis informasi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan politik, sehingga memperkuat bias konfirmasi dan membatasi persepsinya tentang berbagai pandangan politik. Pemahaman tentang bias algoritmik membantu warga menyadari bahwa informasi yang diterima melalui media sosial mungkin tidak mencerminkan gambaran yang lengkap tentang situasi politik. Dengan demikian, dapat lebih kritis dalam mencari dan mengevaluasi sumber informasi yang beragam, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung.

Komponen ketiga yang sering terlupakan dalam literasi politik digital adalah kemampuan bernalar secara sistematis. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengaitkan fakta-fakta politik, mengenali pola argumentasi yang menyesatkan, serta membedakan antara bukti empiris dengan retorika kosong. Dalam dunia politik yang penuh dengan informasi dan retorika, kemampuan ini sangat penting agar warga dapat mengambil keputusan yang tepat dan terinformasi, dapat mengidentifikasi argumen yang berdasarkan pada bukti empiris yang kuat dan dapat dipercaya, serta menghindari argumen yang hanya menggunakan retorika kosong untuk mempengaruhi opini publik. Kemampuan bernalar secara sistematis juga membantu warga dalam mengaitkan fakta-fakta politik yang terpisah menjadi gambaran yang lebih besar tentang situasi politik, sehingga dapat memahami konteks dan implikasi dari kebijakan dan tindakan politik.

Ketiga komponen literasi politik digital ini harus berkembang secara integral agar literasi politik tidak terjebak pada hafalan prosedur demokrasi tanpa pemahaman tentang

praktiknya yang dinamis. Pengetahuan tentang sistem politik, pemahaman tentang bias algoritmik, dan kemampuan bernalar secara sistematis saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Pengetahuan tentang sistem politik memberikan dasar yang kuat bagi warga untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga negara berfungsi dan bagaimana kebijakan dibuat. Pemahaman tentang bias algoritmik membantu warga dalam mencari dan mengevaluasi sumber informasi yang beragam, sehingga dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu politik. Kemampuan bernalar secara sistematis membantu warga dalam mengolah informasi tersebut dan mengambil keputusan yang tepat dan terinformasi. Dengan mengembangkan ketiga komponen ini secara integral, literasi politik digital dapat membantu warga menjadi lebih terlibat dan lebih terinformasi dalam proses politik, sehingga mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Pengembangan literasi politik digital yang mencakup ketiga komponen ini sangat penting dalam konteks saat ini, di mana informasi palsu dan disinformasi tersebar dengan cepat melalui media sosial. Dengan literasi politik digital yang kuat, warga dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan lebih mudah dalam mengenali disinformasi, dapat membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan tidak kredibel, serta menghindari terpengaruh oleh retorika kosong dan argumen yang menyesatkan. Hal ini sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi politik yang berdasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya.

b. Ancaman Disinformasi dan Respons Kognitif

Ancaman disinformasi telah menjadi salah satu tantangan besar dalam era digital, terutama bagi generasi muda yang lebih rentan terhadap manipulasi informasi. Temuan McGrew dkk. (2018) mengungkap bahwa generasi muda mengalami kesulitan dalam melacak asal-usul informasi politik, mengidentifikasi konflik kepentingan narasumber, atau mengenali teknik persuasi terselubung dalam konten politik viral. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan saat ini belum mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas informasi dalam dunia digital. Mayoritas siswa kesulitan dalam mengevaluasi

kebenaran dan kredibilitas informasi yang diterima, sehingga mudah terpengaruh oleh disinformasi dan hoaks.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak pemilih muda yang tidak menyadari bagaimana platform digital memanipulasi emosi melalui desain antarmuka yang sengaja dirancang untuk memicu keterlibatan emosional. Platform media sosial sering menggunakan algoritma yang memanfaatkan psikologi manusia untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna. Hal ini dapat menyebabkan pengguna, terutama pemilih muda, lebih mudah terpengaruh oleh konten yang memicu emosi seperti amarah, takut, atau kebencian. Dalam konteks pemilu, kondisi ini menciptakan pemilih yang mudah diarahkan oleh kampanye hitam atau isu sektarian, bukan oleh pertimbangan platform kebijakan yang rasional. Pemilih muda yang rentan terhadap manipulasi emosi lebih cenderung untuk mempercayai dan menyebarkan informasi palsu yang sesuai dengan emosi, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Respons kognitif terhadap ancaman disinformasi menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pendidikan literasi digital dan media perlu diperkuat dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Literasi digital dan media dapat membekali siswa dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebenaran informasi yang diterima. Pendidikan ini harus mencakup pengetahuan tentang bagaimana platform digital bekerja, bagaimana algoritma mempengaruhi konten yang ditampilkan, dan bagaimana teknik persuasi terselubung dapat memanipulasi persepsi dan emosi pengguna. Selain itu, pendidikan juga harus mencakup kemampuan kritis dalam menganalisis sumber informasi, mengenali konflik kepentingan, dan membedakan antara fakta dan opini.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam meningkatkan respons kognitif terhadap disinformasi, dapat mengadakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya disinformasi dan pentingnya literasi digital dan media. Selain itu, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang ketat terhadap penyebaran konten palsu dan memonitor platform media sosial untuk memastikan bahwa tidak menjadi sarana bagi penyebaran

disinformasi. Platform media sosial juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan penghapusan konten palsu.

Pada konteks pemilu, penting untuk memberikan pendidikan politik yang berfokus pada pemahaman tentang platform kebijakan dan pentingnya pertimbangan rasional dalam memilih pemimpin. Pemilih muda perlu dididik untuk tidak hanya terpengaruh oleh kampanye hitam atau isu sektarian, tetapi juga untuk mempertimbangkan platform kebijakan yang diusulkan oleh calon pemimpin. Dengan pendidikan politik yang komprehensif, pemilih muda dapat lebih terinformasi dan lebih kritis dalam mengambil keputusan dalam pemilu.

c. Landskap Disinformasi Politik di Indonesia

Lanskap disinformasi politik di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kualitas dan stabilitas demokrasi di negara ini. Pengalaman Indonesia dalam pemilu 2019 menjadi studi kasus nyata tentang betapa rapuhnya demokrasi digital terhadap serbuan disinformasi. Laporan MAFINDO (2020) mencatat volume hoaks yang masif selama periode kampanye dan pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa disinformasi telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan dan berdampak luas pada proses demokrasi di Indonesia.

Laporan MAFINDO (2020) tidak hanya mencatat volume hoaks yang masif, tetapi juga mengungkap pola distribusi yang sistematis melalui jaringan tertutup seperti WhatsApp Group dan Facebook Messenger. Penggunaan platform komunikasi tertutup ini memungkinkan penyebaran disinformasi dengan lebih cepat dan lebih sulit untuk diawasi. WhatsApp Group dan Facebook Messenger menjadi sarana yang efektif bagi para pelaku disinformasi untuk menyebarkan konten palsu kepada ribuan orang dalam waktu singkat. Karena sifatnya yang tertutup, pengawasan terhadap konten yang disebar melalui platform ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan konten yang disebar melalui media sosial terbuka seperti Twitter (X) atau Facebook.

Yang patut dicermati adalah temuan bahwa hoaks politik paling efektif ketika dikemas dalam bentuk konten visual (meme

atau video pendek) yang menyentuh sentimen identitas atau ketakutan primordial. Konten visual seperti meme dan video pendek lebih mudah untuk dikonsumsi dan disebarluaskan dibandingkan dengan konten teks, juga lebih efektif dalam memicu emosi dan reaksi cepat dari pengguna. Ketika konten visual tersebut menyentuh sentimen identitas atau ketakutan primordial, seperti agama, etnis, atau ras, menjadi lebih kuat dalam mempengaruhi persepsi dan sikap politik pengguna. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi politik di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca teks, tetapi juga memerlukan kecakapan "membaca" pesan terselubung dalam berbagai format multimedia dan memahami psikologi di balik penyebarannya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang ketat terhadap penyebaran konten palsu dan memonitor platform media sosial serta komunikasi tertutup. Platform media sosial juga perlu bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan penghapusan konten palsu. Selain itu, pendidikan literasi digital dan media perlu diperkuat dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Literasi digital dan media harus mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebenaran informasi dalam berbagai format, termasuk konten visual. Pendidikan ini juga harus mencakup pemahaman tentang psikologi di balik penyebaran disinformasi, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi.

Pada konteks pemilu, penting untuk memberikan pendidikan politik yang berfokus pada pemahaman tentang platform kebijakan dan pentingnya pertimbangan rasional dalam memilih pemimpin. Pemilih perlu dididik untuk tidak hanya terpengaruh oleh konten visual yang menyentuh sentimen identitas atau ketakutan primordial, tetapi juga untuk mempertimbangkan platform kebijakan yang diusulkan oleh calon pemimpin. Dengan pendidikan politik yang komprehensif, pemilih dapat lebih

terinformasi dan lebih kritis dalam mengambil keputusan dalam pemilu.

d. Model Pendidikan Literasi Politik Adaptif

Pengalaman *News Literacy Project* di AS menawarkan pendekatan praktis yang sangat relevan dan dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Program ini tidak hanya mengajarkan teori jurnalisme tetapi juga melatih peserta didik melalui simulasi kasus nyata. Hal ini mencakup bagaimana melacak sumber berita, memverifikasi foto dan video, hingga mengenali bot politik. Metode ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan kritis peserta didik dalam menghadapi disinformasi dan konten palsu.

Di tingkat lokal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa mengembangkan modul serupa yang terintegrasi dengan platform belajar daring. Modul ini dapat mencakup berbagai topik penting dalam literasi politik digital, seperti cara mengidentifikasi sumber berita yang kredibel, teknik memverifikasi konten visual, dan cara mengenali manipulasi data dan informasi. Dengan menggunakan platform belajar daring, modul ini dapat diakses oleh lebih banyak orang, terutama generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi digital.

Melibatkan komunitas relawan verifikasi fakta juga merupakan langkah penting dalam mengembangkan model pendidikan literasi politik adaptif. Relawan ini dapat membantu dalam menyebarkan informasi yang terverifikasi dan melawan disinformasi di lingkungan, juga dapat berperan sebagai mentor bagi peserta didik dalam program literasi politik, memberikan panduan dan dukungan dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan komunitas, program ini dapat menjadi lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat lokal.

Memanfaatkan mekanisme gamifikasi untuk meningkatkan *engagement* adalah salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam model pendidikan literasi politik adaptif. Gamifikasi, atau penggunaan elemen permainan dalam konteks non-permainan, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Misalnya, platform belajar daring dapat menggunakan sistem poin, hadiah, dan tantangan untuk mendorong peserta didik dalam menyelesaikan modul dan latihan. Hal ini dapat

meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar tentang literasi politik digital.

Pendekatan ini harus keluar dari paradigma "penyuluhan" yang monolog, menuju model pembelajaran partisipatif yang mengakui pengalaman digital anak muda sebagai titik masuk dialog. Model pembelajaran partisipatif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat berkontribusi dengan pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan sesi tanya-jawab interaktif. Dengan mengakui pengalaman digital anak muda sebagai titik masuk dialog, program literasi politik dapat lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kemampuan kritis dalam menghadapi disinformasi dan konten palsu.

Pada konteks Indonesia, model pendidikan literasi politik adaptif ini dapat diintegrasikan dengan program-program pendidikan formal dan non-formal. Misalnya, modul literasi politik digital dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, serta program pelatihan dan seminar untuk masyarakat umum. Dengan pendekatan yang inklusif dan interaktif, model ini dapat membantu meningkatkan literasi politik di masyarakat dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi lebih kritis dan terinformasi dalam menghadapi tantangan politik di era digital.

e. Peran Strategis Pendidikan Tinggi

Universitas memiliki peran ganda yang strategis dalam menghadapi tantangan literasi politik di era digital. Pertama, universitas berfungsi sebagai produsen pengetahuan tentang literasi politik, di mana para akademisi dan peneliti menghasilkan penelitian dan teori-teori yang mendalam tentang fenomena politik dan disinformasi. Kedua, universitas juga berfungsi sebagai laboratorium praktik demokrasi digital, di mana mahasiswa dapat belajar dan berlatih dalam lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang demokrasi dan literasi politik.

Integrasi literasi politik dalam kurikulum universitas tidak harus melalui mata kuliah khusus, tetapi bisa diwujudkan dalam pembenahan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan interdisipliner. Salah satu contohnya adalah melalui tugas

analisis wacana media, di mana mahasiswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi konten media, termasuk berita, opini, dan konten viral. Tugas ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan kritis dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebenaran informasi serta teknik persuasi yang digunakan dalam konten media. Selain itu, simulasi debat kebijakan berbasis data juga dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif. Melalui simulasi debat, mahasiswa dapat belajar bagaimana menggunakan data dan bukti empiris untuk mendukung argumen, serta mengembangkan kemampuan dalam berdiskusi dan berargumen secara konstruktif.

Proyek pengabdian masyarakat yang melatih mahasiswa memfasilitasi diskusi politik di komunitas juga merupakan metode pembelajaran yang berharga. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di kampus ke dalam konteks masyarakat yang lebih luas, dapat belajar bagaimana mengelola diskusi politik yang inklusif dan berdasarkan pada fakta, serta bagaimana mengatasi tantangan seperti disinformasi dan polarisasi dalam lingkungan komunitas. Hal ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam pengembangan keterampilan, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas dengan meningkatkan literasi politik dan kualitas diskusi politik di masyarakat.

Temuan Aralica dkk. (2020) tentang efektivitas pendekatan experiential learning dalam mengembangkan literasi politik perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak fakultas, tidak hanya dari ilmu sosial tetapi juga teknik dan sains. Hal ini penting karena tantangan literasi politik di era digital bersifat multidisipliner. Misalnya, mahasiswa teknik dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan alat untuk mendeteksi dan mengatasi disinformasi, sementara mahasiswa sains dapat berkontribusi dalam penelitian tentang dampak psikologis dan sosial dari disinformasi. Dengan melibatkan lebih banyak fakultas, universitas dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan komprehensif, di mana mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan literasi politik di era digital.

Universitas juga dapat berperan sebagai pusat inovasi dalam pengembangan metode dan teknologi untuk mengatasi disinformasi. Melalui kolaborasi antara fakultas teknik, ilmu sosial, dan sains, universitas dapat mengembangkan alat-alat dan teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi dan mengatasi disinformasi. Selain itu, universitas dapat mengadakan seminar, workshop, dan konferensi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang literasi politik dan disinformasi. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terinformasi dan lebih kritis dalam menghadapi tantangan literasi politik di era digital.

Dengan memanfaatkan peran ganda universitas sebagai produsen pengetahuan dan laboratorium praktik demokrasi digital, serta dengan mengintegrasikan literasi politik dalam kurikulum melalui metode pembelajaran yang inklusif dan interdisipliner, universitas dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan literasi politik di masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dengan menciptakan lingkungan yang lebih terinformasi dan lebih kritis dalam menghadapi tantangan literasi politik di era digital.

B. Reformasi Sistem Pemilu dan Transparansi

1. Sejarah dan Dinamika Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia

Reformasi sistem pemilu di Indonesia merupakan bagian integral dari transformasi politik nasional pasca-1998, ketika rezim otoriter Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim demokratis yang mengusung prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Selama masa Orde Baru, sistem pemilu sangat sentralistis dan represif, dengan dominasi Golkar sebagai partai penguasa dan terbatasnya ruang kontestasi bagi partai politik oposisi. Pemilu pada era tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (Aspinall & Mietzner, 2010). Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya demokratisasi sistem politik, termasuk pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilu.

Perubahan signifikan pertama terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang kemudian diperbarui beberapa kali, termasuk melalui UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2008, hingga UU Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan-perubahan ini memperluas hak politik warga negara, memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan membuka ruang kompetisi politik yang lebih terbuka melalui sistem multipartai. Salah satu reformasi krusial adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan tidak berada di bawah kontrol pemerintah (Buehler, 2009). KPU diberi wewenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara mandiri, mulai dari verifikasi partai politik hingga penetapan hasil suara.

Sistem pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009. Dalam sistem ini, pemilih memiliki hak untuk memilih langsung calon anggota legislatif, bukan sekadar mencoblos partai. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas personal calon anggota legislatif terhadap konstituennya (Sherlock, 2009). Meski membawa konsekuensi positif terhadap keterlibatan masyarakat, sistem ini juga memunculkan tantangan baru seperti meningkatnya biaya politik dan potensi terjadinya praktik vote buying secara individual.

Reformasi lainnya mencakup penguatan mekanisme pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, serta pengenalan sistem pemilu serentak. Pemilu serentak yang pertama kali diterapkan pada 2019 menyatukan pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Tujuannya adalah efisiensi anggaran dan sinkronisasi agenda politik nasional, meskipun pelaksanaannya menimbulkan beban logistik dan administratif yang luar biasa besar (Ufen, 2019). Namun demikian, meski reformasi sistem pemilu telah membuka ruang demokrasi lebih luas, sejumlah persoalan tetap menjadi tantangan, seperti politisasi lembaga penyelenggara pemilu, lemahnya penegakan hukum pemilu, dan inkonsistensi kebijakan pemilu antar periode. Oleh karena itu, pembenahan sistem pemilu harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, agar demokrasi Indonesia tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif.

2. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Penyelenggaraan Pemilu Demokratis

Pada sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang menjamin integritas dan legitimasi pemilu. Transparansi pemilu mencakup keterbukaan dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, penetapan daftar calon, proses kampanye, penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari semua aktor politik termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan kandidat atas tindakan dan keputusan selama proses pemilu (Norris, 2014). Di Indonesia, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemilu mengalami perkembangan positif pasca-reformasi, namun masih menghadapi tantangan serius di lapangan.

Salah satu indikator kemajuan transparansi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemilu. Sejak 2014, KPU telah menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mempermudah publik dalam mengakses data pemilu secara real-time. Pada Pemilu 2019, KPU memperkenalkan Sistem Informasi Penghitungan (Sirekap) yang digunakan secara resmi di Pilkada 2020 dan diimplementasikan secara lebih luas di Pemilu 2024. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat rekapitulasi suara serta meminimalisasi kecurangan di tingkat TPS dan kecamatan (Prasetyo, 2021). Kendati demikian, penerapan teknologi ini juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan siber dan validitas data digital.

Transparansi juga dituntut dalam hal pendanaan politik. Partai politik dan kandidat diwajibkan melaporkan dana kampanye secara terbuka, termasuk sumber dan penggunaan dana. Sayangnya, laporan ini sering kali tidak akurat atau disampaikan secara formalistis. Penelitian oleh Ubaidillah dan Basuki (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil partai yang benar-benar transparan dan akuntabel dalam laporan dana kampanye. Praktik politik uang dan pembiayaan kampanye ilegal masih marak terjadi karena lemahnya sistem audit dan sanksi.

Pada konteks penyelenggara pemilu, akuntabilitas menuntut integritas dari individu dan lembaga. Kasus dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU atau Bawaslu dapat mencederai kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat, termasuk peran Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik. Menurut Sulaiman (2022), keterbukaan informasi dan akses masyarakat untuk mengawasi penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial untuk menjamin pemilu yang bersih dan kredibel.

Partisipasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam mendorong transparansi. Pemantau pemilu independen seperti Perludem, Netgrit, dan JPPR aktif melakukan audit publik terhadap jalannya pemilu, serta memberikan masukan terhadap regulasi pemilu yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Keterlibatan media massa dan jurnalisme investigatif turut memperkuat kontrol publik terhadap kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan selama proses pemilu.

Transparansi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkannya. Literasi pemilu dan keterbukaan data harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk membaca, memahami, dan memproses informasi tersebut secara kritis. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas publik melalui pendidikan politik dan pelatihan teknis, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula.

Sebagai refleksi, reformasi sistem pemilu dan peningkatan transparansi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural dan teknis semata. Esensi demokrasi terletak pada kepercayaan publik bahwa setiap suara dihitung secara adil, setiap peserta memiliki kesempatan setara, dan hasil akhir mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa reformasi sistem pemilu dan transparansi tidak menjadi jargon politik semata, melainkan diterjemahkan ke dalam praktik yang konsisten, partisipatif, dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

C. Penguatan Partai Politik dan Lembaga Pengawas

Partai politik dan lembaga pengawas demokrasi berperan krusial dalam membentuk sistem politik yang sehat dan responsif terhadap kehendak rakyat. Kualitas demokrasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga oleh kapasitas institusi-institusi politiknya dalam menjalankan fungsi representasi, kontrol, dan akuntabilitas. Di Indonesia, pasca-reformasi 1998, peran partai politik dan lembaga pengawas mengalami transformasi signifikan. Namun, hingga kini, masih terdapat berbagai

tantangan dalam memperkuat institusi-institusi ini agar dapat secara optimal menjaga kualitas demokrasi dan mencegah penyimpangan kekuasaan.

1. Reformasi dan Penguatan Institusional Partai Politik

Reformasi sistem pemilu di Indonesia merupakan bagian integral dari transformasi politik nasional pasca-1998, ketika rezim otoriter Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim demokratis yang mengusung prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Selama masa Orde Baru, sistem pemilu sangat sentralistis dan represif, dengan dominasi Golkar sebagai partai penguasa dan terbatasnya ruang kontestasi bagi partai politik oposisi. Pemilu pada era tersebut lebih bersifat simbolik dan tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya demokratisasi sistem politik, termasuk pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilu. Perubahan signifikan pertama terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang kemudian diperbarui beberapa kali, termasuk melalui UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 10 Tahun 2008, hingga UU Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan-perubahan ini memperluas hak politik warga negara, memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan membuka ruang kompetisi politik yang lebih terbuka melalui sistem multipartai.

Salah satu reformasi krusial adalah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan tidak berada di bawah kontrol pemerintah. KPU diberi wewenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara mandiri, mulai dari verifikasi partai politik hingga penetapan hasil suara. Pembentukan KPU adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas. KPU juga bertugas untuk memastikan bahwa semua partai politik memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi dalam pemilu. Dengan demikian, KPU menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

Sistem pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009. Dalam sistem ini, pemilih memiliki hak untuk memilih langsung calon anggota legislatif, bukan sekadar mencoblos partai. Perubahan ini bertujuan untuk

memperkuat akuntabilitas personal calon anggota legislatif terhadap konstituennya. Meski membawa konsekuensi positif terhadap keterlibatan masyarakat, sistem ini juga memunculkan tantangan baru seperti meningkatnya biaya politik dan potensi terjadinya praktik vote buying secara individual. Meningkatnya biaya politik dapat menjadi beban bagi calon anggota legislatif yang tidak memiliki sumber daya finansial yang besar, sehingga dapat membatasi partisipasi dari kalangan yang lebih luas dalam proses pemilu.

Reformasi lainnya mencakup penguatan mekanisme pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, serta pengenalan sistem pemilu serentak. Pemilu serentak yang pertama kali diterapkan pada 2019 menyatukan pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Tujuannya adalah efisiensi anggaran dan sinkronisasi agenda politik nasional, meskipun pelaksanaannya menimbulkan beban logistik dan administratif yang luar biasa besar. Pemilu serentak memang memberikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, karena pemilu legislatif dan eksekutif dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, pelaksanaannya juga menimbulkan tantangan, seperti beban logistik dan administratif yang besar. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penyelenggara pemilu, serta sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola proses pemilu yang lebih kompleks.

Meski reformasi sistem pemilu telah membuka ruang demokrasi lebih luas, sejumlah persoalan tetap menjadi tantangan, seperti politisasi lembaga penyelenggara pemilu, lemahnya penegakan hukum pemilu, dan inkonsistensi kebijakan pemilu antar periode. Politisasi lembaga penyelenggara pemilu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu, karena masyarakat dapat merasa bahwa lembaga tersebut lebih melayani kepentingan politik tertentu daripada menjaga integritas proses pemilu. Lemahnya penegakan hukum pemilu juga menjadi masalah, karena dapat memungkinkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu untuk tidak ditindaklanjuti dengan serius. Inkonsistensi kebijakan pemilu antar periode dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi para pemilih dan peserta pemilu.

Pembenahan sistem pemilu harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, agar demokrasi Indonesia tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif. Pembenahan ini dapat

mencakup peningkatan kemandirian dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu, penguatan penegakan hukum pemilu, serta konsistensi dalam kebijakan pemilu antar periode. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga dapat lebih terinformasi dan terlibat dalam proses pemilu. Dengan pembenahan yang komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan sistem pemilu di Indonesia dapat terus berkembang dan mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Peningkatan kemandirian dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu adalah salah satu langkah penting dalam pembenahan sistem pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan profesionalisme dalam mengelola proses pemilu. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemilu. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Penguatan penegakan hukum pemilu juga merupakan langkah penting dalam pembenahan sistem pemilu. Penegakan hukum pemilu yang kuat dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan jujur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu, kejaksaan, dan kepolisian dalam penindakan pelanggaran pemilu. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum pemilu, sehingga dapat lebih terlibat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.

Konsistensi dalam kebijakan pemilu antar periode juga sangat penting dalam pembenahan sistem pemilu. Inkonsistensi kebijakan pemilu dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi para pemilih dan peserta pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemilu yang diterapkan dalam satu periode dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam periode berikutnya. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan kebijakan pemilu yang berbasis pada penelitian dan analisis mendalam, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan konsistensi dalam kebijakan

pemilu, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Peningkatan partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat juga merupakan langkah penting dalam pembenahan sistem pemilu. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Pendidikan politik yang berkualitas dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemilu, serta cara berpartisipasi dalam proses pemilu. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, baik di sekolah, komunitas, maupun melalui media massa. Dengan meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dan terinformasi dalam proses pemilu.

2. Peran Strategis dan Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu dan Demokrasi

Lembaga pengawas pemilu dan demokrasi berperanan sentral dalam menjaga integritas proses demokrasi. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pengawas utama, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga kehormatan seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi penjaga moral dan institusional terhadap berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan, dan korupsi dalam sistem politik dan pemerintahan. Lembaga pengawas ini tidak hanya bertugas untuk mengawasi proses pemilu, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses politik berperilaku sesuai dengan hukum dan etika. Dengan demikian, lembaga pengawas berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Bawaslu memiliki mandat utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, distribusi logistik, hingga rekapitulasi suara. Sejak diberi kewenangan adjudikatif oleh UU No. 15 Tahun 2011, Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa administratif pemilu secara langsung. Namun, efektivitas Bawaslu sering kali terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, terutama di wilayah terpencil atau daerah rawan konflik. Selain itu,

dalam beberapa kasus, netralitas dan profesionalisme anggota Bawaslu juga masih menjadi sorotan. Keterbatasan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk anggaran dan regulasi yang memungkinkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

DKPP sebagai lembaga etik penyelenggara pemilu berperan penting dalam menjaga integritas personal anggota KPU dan Bawaslu. Melalui sidang etik, DKPP bisa memberikan sanksi hingga pemberhentian anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika. Meski perannya lebih bersifat moral daripada yudisial, keberadaan DKPP penting dalam memperkuat akuntabilitas personal di lembaga-lembaga pemilu. Dengan adanya DKPP, diharapkan anggota KPU dan Bawaslu akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan menjaga integritas pribadi. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.

Lembaga lain yang juga tidak kalah penting adalah KPK, yang mengawasi potensi korupsi dalam politik, terutama dalam praktik jual beli suara, suap politik, dan pengaturan anggaran. Sayangnya, pelemahan terhadap KPK dalam beberapa tahun terakhir seperti revisi UU KPK Tahun 2019 membatasi ruang gerak lembaga ini dalam mengusut kasus korupsi politik tingkat tinggi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan kelembagaan terhadap lembaga pengawas agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek. KPK telah berperan penting dalam memerangi korupsi di Indonesia, dan pelemahan kelembagaan KPK dapat mengancam upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk memperkuat kembali kelembagaan KPK agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan independen.

Peran masyarakat sipil dan media juga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan. Pemantau pemilu independen seperti Perludem dan JPPR terbukti memberikan kontribusi besar dalam mengungkap pelanggaran kampanye dan kecurangan di lapangan. Kehadiran jurnalisme investigatif, pelaporan partisipatif, serta keterbukaan informasi publik memberikan saluran alternatif untuk kontrol sosial terhadap elite politik dan pejabat publik. Masyarakat sipil

dan media dapat berperan sebagai pengawas independen yang memberikan pandangan dan informasi yang objektif kepada publik. Dengan demikian, masyarakat sipil dan media dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan politik secara umum.

Penguatan lembaga pengawas tidak bisa dilepaskan dari kemauan politik yang kuat. Pemerintah dan DPR perlu secara aktif memberikan dukungan anggaran, regulasi yang memadai, serta perlindungan hukum terhadap kerja-kerja pengawasan. Tanpa dukungan ini, lembaga pengawas akan tetap lemah, rentan dikriminalisasi, dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara independen dan profesional. Dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pengawas memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif. Regulasi yang memadai juga diperlukan untuk memberikan kewenangan yang cukup bagi lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum terhadap kerja-kerja pengawasan dapat membantu mencegah intimidasi dan tekanan terhadap lembaga pengawas dari pihak-pihak yang tidak menginginkan pengawasan yang ketat.

Dengan demikian, penguatan partai politik dan lembaga pengawas merupakan pilar penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Jika partai mampu menjadi institusi yang demokratis dan representatif, serta lembaga pengawas menjalankan fungsinya dengan independen dan transparan, maka sistem politik Indonesia akan lebih stabil, akuntabel, dan partisipatif. Reformasi yang berkelanjutan dan partisipasi publik yang aktif adalah kunci agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur lima tahunan, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan sosial dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguatan partai politik dapat membantu meningkatkan kualitas representasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Lembaga pengawas yang kuat dan independen dapat memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan jujur dan adil. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif dan berdasarkan pada kepentingan publik.

Pemerintah dan DPR memiliki peran penting dalam mendukung penguatan lembaga pengawas. Perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk anggaran, regulasi, dan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah dan DPR juga perlu memastikan bahwa lembaga

pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan profesional. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pengawasan. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah dan DPR, lembaga pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Masyarakat sipil dan media juga memiliki peran penting dalam mendukung penguatan lembaga pengawas, dapat berperan sebagai pengawas independen yang memberikan pandangan dan informasi yang objektif kepada publik. Masyarakat sipil dapat mengadakan pemantauan independen terhadap proses pemilu dan politik, serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada lembaga pengawas. Media dapat memberikan liputan yang mendalam dan objektif tentang proses pemilu dan politik, serta memberikan ruang bagi publik untuk mengungkapkan pendapat dan kritiknya. Dengan demikian, masyarakat sipil dan media dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dan politik secara umum.

Pada konteks Indonesia, penguatan lembaga pengawas perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pengawasan. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk anggaran, regulasi, dan perlindungan hukum. Masyarakat sipil dan media juga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan. Dengan penguatan lembaga pengawas yang komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan proses pemilu dan politik di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih jujur, adil, dan transparan.

D. Mendorong Partisipasi Generasi Muda dan Kelompok Marginal

Partisipasi politik yang inklusif merupakan fondasi utama dalam pembangunan demokrasi yang representatif dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, generasi muda dan kelompok marginal sering kali

masih menghadapi hambatan struktural maupun kultural dalam menjalankan hak-hak politik. Padahal, keberadaan dua kelompok ini menyumbang proporsi signifikan dalam populasi, dan jika dimobilisasi secara tepat, dapat menjadi kekuatan transformatif dalam sistem politik. Mendorong partisipasi generasi muda serta kelompok marginal bukan hanya urusan keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga menyangkut bagaimana negara dan masyarakat menciptakan ekosistem yang adil, aksesibel, dan memberdayakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

1. Revitalisasi Peran Generasi Muda dalam Demokrasi

Generasi muda (usia 17–35 tahun) merupakan segmen demografis terbesar di Indonesia, yang dalam beberapa pemilu terakhir telah menjadi penentu hasil pemilu nasional. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa pada Pemilu 2019, sekitar 55% dari total pemilih adalah pemilih muda. Namun, secara substansial, keterlibatan dalam politik tidak serta-merta mencerminkan partisipasi yang aktif dan kritis. Banyak studi menunjukkan bahwa generasi muda cenderung apatis terhadap politik formal, kurang percaya terhadap partai politik, dan hanya terlibat secara simbolik melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih muda besar, kualitas partisipasinya dalam politik masih perlu ditingkatkan agar lebih aktif dan kritis dalam membentuk kebijakan dan proses demokrasi.

Masalah utama yang dihadapi generasi muda adalah minimnya ruang representasi politik serta terbatasnya pendidikan politik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah sering kali normatif dan tidak membekali pelajar dengan keterampilan kritis dalam menilai isu-isu politik. Selain itu, partai politik juga gagal menjangkau dan memfasilitasi peran pemuda secara aktif. Struktur partai yang hierarkis dan didominasi elite senior menyulitkan regenerasi politik yang sehat. Hal ini mengakibatkan generasi muda merasa terpinggirkan dan kurang terlibat dalam proses politik formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam politik melalui pendidikan politik yang lebih relevan dan partai politik yang lebih inklusif.

Untuk mendorong partisipasi generasi muda secara bermakna, perlu dilakukan transformasi strategi komunikasi politik dan pendidikan demokrasi. Pemerintah, lembaga pemilu, serta organisasi masyarakat

sipil dapat berkolaborasi untuk menghadirkan program edukasi politik berbasis digital, simulasi pemilu di sekolah dan kampus, hingga pelatihan kepemimpinan politik muda. Selain itu, partisipasi dalam forum-forum kebijakan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), parlemen remaja, dan kegiatan advokasi berbasis komunitas juga dapat menjadi media belajar demokrasi substantif bagi kaum muda. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif, generasi muda dapat lebih terlibat dalam proses politik dan merasa bahwa suaranya didengar dan dihargai.

Peran media sosial sebagai alat mobilisasi juga tidak dapat diabaikan. Banyak gerakan sosial yang dimotori anak muda muncul melalui kanal digital, seperti ReformasiDikorupsi atau GejayanMemanggil. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki semangat partisipatif tinggi, namun lebih nyaman mengekspresikan suaranya melalui saluran non-formal yang dianggap lebih otentik dan tidak birokratis. Oleh karena itu, upaya mendorong partisipasi pemuda perlu mengakui dinamika tersebut dan menyediakan ruang-ruang kreatif serta partisipatif yang lebih egaliter dan non-konvensional. Media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengorganisir dan menggerakkan generasi muda dalam berpartisipasi dalam isu-isu politik dan sosial yang relevan dengannya.

Pendidikan politik yang relevan dengan kebutuhan zaman sangat penting dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah perlu diperbaharui agar lebih fokus pada pengembangan keterampilan kritis dan pemahaman mendalam tentang isu-isu politik kontemporer. Selain itu, program-program edukasi politik berbasis digital dapat membantu menyediakan akses yang lebih luas dan interaktif bagi generasi muda untuk belajar tentang politik dan demokrasi. Dengan pendidikan politik yang lebih relevan, generasi muda dapat lebih terinformasi dan terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih aktif dan kritis.

Partai politik juga perlu melakukan transformasi untuk menjadi lebih inklusif dan mendukung partisipasi generasi muda. Struktur partai yang lebih terbuka dan partisipatif dapat membantu mendorong regenerasi politik yang sehat. Partai politik dapat mengadakan program-program khusus untuk melibatkan pemuda dalam proses pengambilan kebijakan dan kegiatan kampanye. Selain itu, partai politik dapat menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk berkomunikasi

dan berinteraksi dengan generasi muda. Dengan demikian, partai politik dapat menjadi lebih relevan dan menarik bagi generasi muda, sehingga meningkatkan keterlibatannya dalam politik formal.

Forum-forum kebijakan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan parlemen remaja dapat menjadi media belajar demokrasi substantif bagi generasi muda. Melalui forum-forum ini, generasi muda dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan dan merasakan dampak langsung dari partisipasinya. Selain itu, kegiatan advokasi berbasis komunitas juga dapat memberikan pengalaman praktis dalam berpartisipasi dalam isu-isu politik dan sosial. Dengan terlibat dalam forum-forum kebijakan dan kegiatan advokasi, generasi muda dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Upaya mendorong partisipasi generasi muda dalam politik perlu mengakui dinamika dan preferensinya dalam berpartisipasi dalam proses politik. Generasi muda lebih nyaman mengekspresikan suaranya melalui saluran non-formal yang dianggap lebih otentik dan tidak birokratis. Oleh karena itu, perlu disediakan ruang-ruang kreatif dan partisipatif yang lebih egaliter dan non-konvensional. Media sosial dan teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengorganisir dan menggerakkan generasi muda dalam berpartisipasi dalam isu-isu politik dan sosial. Dengan mengakui dinamika ini, upaya mendorong partisipasi generasi muda dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan.

Pada konteks Indonesia, revitalisasi peran generasi muda dalam demokrasi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini mencakup pendidikan politik yang lebih relevan, partai politik yang lebih inklusif, serta forum-forum kebijakan dan kegiatan advokasi yang lebih partisipatif. Selain itu, perlu juga mengakui dan memanfaatkan dinamika partisipasi generasi muda melalui media sosial dan teknologi digital. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan generasi muda dapat lebih terlibat dalam proses politik dan demokrasi secara aktif dan kritis.

2. Meningkatkan Representasi dan Partisipasi Kelompok Marginal

Kelompok marginal, yang mencakup perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin kota atau desa tertinggal, sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem politik.

Kendala struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, akses informasi terbatas, hingga peraturan yang belum inklusif menjadi hambatan partisipasi yang nyata. Menurut UNDP (2020), partisipasi politik yang tidak inklusif menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan kebijakan publik dan rendahnya legitimasi demokrasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung inklusi politik, seperti kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif (UU No. 7 Tahun 2017), serta aturan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan teknis dan sosial. Dalam konteks perempuan, misalnya, kehadiran kuota belum sepenuhnya menjamin kualitas representasi, karena banyak calon perempuan yang ditempatkan di posisi tidak strategis dalam daftar caleg. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung inklusi, implementasinya masih belum efektif dalam memastikan partisipasi yang inklusif dan berarti.

Demikian pula, penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses informasi pemilu yang ramah disabilitas. Laporan Perludem (2019) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil TPS yang menyediakan fasilitas khusus bagi tunanetra atau penyandang hambatan mobilitas. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Kendala ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam pemilu masih menjadi masalah yang perlu diatasi agar partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat.

Untuk memperbaiki situasi tersebut, pendekatan afirmatif dan transformasional perlu dilakukan. Pertama, perluasan pendidikan pemilih berbasis komunitas sangat penting. Kelompok marginal memerlukan informasi yang dikemas sesuai dengan bahasa, budaya, dan kebutuhan. Lembaga penyelenggara pemilu dapat bekerja sama dengan organisasi lokal, LSM, dan tokoh komunitas untuk menjangkau basis akar rumput secara langsung. Pelibatan masyarakat dalam simulasi pemilu atau dialog kebijakan juga dapat meningkatkan pemahaman

politik. Dengan pendidikan pemilih yang lebih inklusif, diharapkan kelompok marginal dapat lebih terlibat dalam proses politik.

Kedua, reformasi kelembagaan di tubuh partai politik juga perlu diarahkan untuk lebih inklusif terhadap kelompok marginal. Perekrutan kader dari kalangan perempuan, difabel, dan minoritas perlu diprioritaskan sebagai bagian dari regenerasi yang inklusif. Hal ini tidak hanya memperluas basis konstituen, tetapi juga memperkaya perspektif dan representasi dalam pengambilan kebijakan. Dengan reformasi kelembagaan yang inklusif, partai politik dapat menjadi lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal.

Ketiga, peran negara sangat penting dalam menyediakan infrastruktur partisipasi yang adil, seperti akses internet gratis di desa tertinggal, pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, serta perlindungan hukum terhadap kelompok rentan yang ingin terlibat dalam politik. Ketika partisipasi tidak hanya dilihat sebagai hak formal, tetapi juga didukung oleh intervensi afirmatif, maka sistem demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan inklusivitas di masa depan. Dukungan infrastruktur yang adil dapat membantu mengatasi kendala struktural yang menghambat partisipasi kelompok marginal.

Dengan demikian, meningkatkan partisipasi generasi muda dan kelompok marginal bukan sekadar persoalan teknis atau kuantitatif, tetapi menyangkut komitmen untuk membangun demokrasi yang berbasis kesetaraan, keberagaman, dan keadilan sosial. Demokrasi yang hanya dikuasai oleh elite mapan tidak akan pernah menghasilkan kebijakan yang inklusif. Sebaliknya, keterlibatan aktif dari kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan akan memperkuat legitimasi politik dan memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat secara menyeluruh. Keterlibatan kelompok marginal dalam proses politik dapat membawa perspektif yang lebih luas dan beragam dalam pembuatan kebijakan.

Peningkatan partisipasi kelompok marginal juga dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Ketika kelompok-kelompok ini terlibat dalam proses politik, dapat mengadvokasi kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok marginal.

Untuk mencapai inklusivitas dalam partisipasi politik, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur, lembaga penyelenggara pemilu dapat menyediakan aksesibilitas dan pendidikan pemilih, partai politik dapat merekrut dan mendukung kader dari kelompok marginal, dan masyarakat sipil dapat mengadvokasi dan mendukung partisipasi kelompok marginal dalam proses politik. Dengan kerja sama yang efektif, inklusivitas dalam partisipasi politik dapat dicapai.

Peningkatan partisipasi kelompok marginal dalam politik juga dapat membantu memperkuat demokrasi lokal. Ketika kelompok-kelompok ini terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal, dapat membawa perspektif yang lebih dekat dengan kebutuhan dan realitas masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam konteks Indonesia, meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam politik adalah langkah penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan partisipasi kelompok marginal, diharapkan demokrasi Indonesia dapat lebih mewakili kepentingan seluruh rakyat dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Langkah-langkah afirmatif dan transformasional yang diambil oleh pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil dapat membantu mencapai inklusivitas dalam partisipasi politik dan memperkuat demokrasi Indonesia.

BAB VIII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Partisipasi pemilu merupakan indikator utama dari keberlangsungan demokrasi yang sehat, inklusif, dan representatif. Dalam konteks Indonesia, dinamika partisipasi pemilih mencerminkan tidak hanya antusiasme warga terhadap proses politik, tetapi juga kualitas sistem demokrasi yang berkembang dari masa ke masa. Melalui pembahasan mendalam tentang sejarah pemilu, perubahan sistem, faktor-faktor penentu partisipasi, hingga tantangan serta strategi penguatan ke depan, terlihat bahwa partisipasi tidak bisa dipisahkan dari aspek struktural, kultural, dan teknologi informasi yang melingkupinya. Terlibatnya generasi muda dan kelompok marginal, peran lembaga demokrasi, serta pengaruh ekonomi, sosial, dan media menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi menuntut kerja kolektif dan reformasi berkelanjutan. Oleh karena itu, kesimpulan dan rekomendasi akhir dari kajian ini menjadi penting untuk merumuskan arah kebijakan, strategi pendidikan politik, serta reformasi kelembagaan demi mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa mendatang.

A. Ringkasan Temuan Penting

Studi ini mengungkap sejumlah temuan penting mengenai dinamika partisipasi pemilu di Indonesia serta kaitannya dengan kualitas demokrasi dan tantangan masa depan yang dihadapi bangsa. Pertama, partisipasi politik, khususnya dalam pemilu, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga negara, tetapi juga memperlihatkan legitimasi terhadap institusi demokrasi yang ada.

Berdasarkan data empiris dan teoritis yang dihimpun dalam buku ini, ditemukan bahwa definisi dan indikator indeks partisipasi pemilu mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, serta aspek kualitatif seperti kualitas keterlibatan warga dalam proses politik secara sadar dan bermakna (Verba, Schlozman, & Brady, 1995).

Kedua, data partisipasi dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dari berbagai periode menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor struktural seperti kerangka hukum dan sistem kepemiluan, serta faktor sosiologis seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, hingga lokasi geografis. Pada Pemilu 2019, misalnya, angka partisipasi mencapai lebih dari 80% secara nasional, namun ketimpangan partisipasi antar daerah dan antar segmen masyarakat masih terlihat jelas, terutama di wilayah terpencil dan komunitas marginal. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi, kesadaran politik, dan keterlibatan sosial masih menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat demokrasi partisipatif (KPU, 2019).

Ketiga, temuan lain menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilu di Indonesia meliputi: pendidikan kewarganegaraan, literasi politik, peran media dan teknologi informasi, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, serta kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Pendidikan politik yang kurang merata menyebabkan banyak pemilih belum memahami hak dan tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi. Sementara itu, keberadaan media sosial dan internet, meskipun telah membuka ruang partisipasi digital, juga menimbulkan tantangan baru berupa polarisasi dan disinformasi, yang justru dapat menurunkan kualitas partisipasi (Wardani, 2020).

Keempat, buku ini juga membahas sejumlah tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia di masa mendatang, terutama terkait dengan praktik politik uang, dominasi oligarki, menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga pengawas, serta kurangnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik. Politik uang, misalnya, tetap menjadi strategi kampanye yang dominan dan melemahkan integritas pemilu, sementara oligarki politik menghambat regenerasi kepemimpinan yang inklusif dan demokratis (Hadiz & Robison, 2013). Di sisi lain, generasi muda yang seharusnya menjadi

kekuatan baru dalam demokrasi digital justru seringkali apatis atau terfragmentasi secara ideologis oleh algoritma media sosial.

Kelima, kajian ini merekomendasikan perlunya strategi penguatan kelembagaan, reformasi sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas pendidikan politik berbasis komunitas. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu direformasi agar lebih terbuka, demokratis, dan mampu merekrut kader secara meritokratis. Penguatan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU juga menjadi krusial untuk menjaga integritas proses pemilu dari hulu ke hilir. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda melalui pendekatan digital yang positif, serta menjangkau kelompok marginal dengan kebijakan afirmatif yang menjamin inklusi politik (Mietzner, 2020).

B. Implikasi Kebijakan

1. Penguatan Kebijakan Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi

Salah satu implikasi kebijakan utama yang dapat diambil dari keseluruhan kajian ini adalah pentingnya penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kesenjangan pengetahuan politik di masyarakat Indonesia masih menjadi hambatan besar dalam menciptakan partisipasi yang berkualitas. Banyak warga menggunakan hak pilih berdasarkan tekanan sosial, pragmatisme ekonomi, atau bahkan ketidaktahuan terhadap platform dan rekam jejak calon. Untuk itu, negara harus merumuskan kebijakan yang bersifat edukatif dan inklusif dalam memperluas kesadaran warga terhadap hak dan tanggung jawab politik.

Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam kurikulum formal dan nonformal harus diperbarui untuk mencakup pemahaman substantif tentang demokrasi, pemilu, fungsi lembaga politik, serta keterampilan berpikir kritis. Seperti ditegaskan oleh Print (2007), pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi politik dalam jangka panjang karena membentuk warga yang aktif dan melek demokrasi. Selain di lingkungan sekolah, pemerintah juga perlu mendukung program literasi politik berbasis komunitas, termasuk pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan

pelatihan kepemiluan, diskusi publik, dan simulasi pemilu di tingkat akar rumput.

Di era digital, pendekatan literasi politik juga harus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pusat-pusat informasi pemilu berbasis daring perlu diperluas untuk menjangkau kelompok pemilih muda yang lebih aktif di platform digital. Namun demikian, kehadiran media sosial sebagai alat penyebaran informasi politik harus dibarengi dengan program literasi digital yang kuat, mengingat potensi penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku politik pemilih. Sebagaimana dicatat oleh Wardle dan Derakhshan (2017), penyebaran misinformasi dalam konteks politik dapat melemahkan kepercayaan publik dan merusak proses demokrasi secara keseluruhan.

Kebijakan literasi digital dan anti-disinformasi harus terkoordinasi antara KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pendidikan dan media massa. Penguatan regulasi terhadap konten politik di media sosial juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, agar tidak menimbulkan sensor berlebihan. Keterlibatan generasi muda dalam ruang digital juga perlu diarahkan dengan kebijakan afirmatif, seperti penyediaan platform diskusi virtual, pelibatan dalam debat publik, dan fasilitasi forum dialog antara pemilih pemula dan penyelenggara pemilu. Secara keseluruhan, pendidikan politik dan literasi demokrasi yang adaptif, partisipatif, dan digital-inklusif merupakan fondasi kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilu di Indonesia. Implikasi kebijakan ini mendesak untuk diimplementasikan guna menciptakan warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

2. Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemilu yang Transparan

Implikasi kebijakan berikutnya adalah perlunya reformasi kelembagaan dan tata kelola pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selama beberapa dekade, pelaksanaan pemilu di Indonesia mengalami banyak transformasi, tetapi berbagai tantangan struktural masih mengemuka, seperti rendahnya integritas penyelenggara, politik uang, serta lemahnya pengawasan terhadap proses rekrutmen politik di partai-partai.

Pertama, reformasi kelembagaan perlu dimulai dari penguatan posisi dan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemandirian dan profesionalitas harus dijaga melalui mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi. Menurut Norris (2014), integritas pemilu hanya bisa dicapai jika penyelenggaranya memiliki kredibilitas dan bebas dari intervensi politik. Oleh karena itu, pemilihan anggota KPU dan Bawaslu tidak boleh menjadi arena kompromi politik elite, tetapi harus mengedepankan kompetensi dan integritas yang dapat diuji secara terbuka oleh publik.

Reformasi juga harus menyentuh aspek tata kelola pemilu, khususnya pada sistem transparansi data dan logistik. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-voting, e-rekapitulasi, dan dashboard pemilu berbasis real-time dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi manipulasi. Namun, penerapan teknologi ini harus didukung oleh jaminan keamanan siber dan perlindungan data pribadi pemilih. Transparansi dalam proses penghitungan suara juga harus dioptimalkan dengan akses publik terhadap dokumen C1, laporan keuangan kampanye, dan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Kebijakan pengawasan terhadap praktik politik uang juga perlu diperkuat dengan revisi regulasi yang memberikan sanksi tegas dan membuat efek jera. Saat ini, pengaturan tentang politik uang dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat ambigu dan sering kali tidak efektif dalam menindak pelaku. Studi oleh Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi instrumen utama dalam mobilisasi suara, khususnya di level lokal, sehingga menurunkan kualitas representasi dan meningkatkan pragmatisme politik. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten, termasuk pelibatan lembaga antikorupsi dan peradilan dalam menangani kasus-kasus kepemiluan.

Reformasi juga harus mencakup pembenahan sistem rekrutmen partai politik agar lebih terbuka terhadap partisipasi publik. Sistem pencalonan legislatif dan eksekutif harus mengedepankan transparansi dalam seleksi, serta memberikan ruang yang adil bagi perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas. Dengan begitu, pemilu tidak lagi menjadi milik elite politik tertentu, melainkan menjadi wadah representasi sejati dari seluruh elemen masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu juga perlu difasilitasi oleh kebijakan publik, seperti pemberdayaan pengawas

partisipatif, pemantau independen, dan jurnalisme investigatif. Pemerintah dan DPR perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendorong partisipasi pengawasan sipil ini, serta melindungi para pengawas dari intimidasi dan kriminalisasi. Sebab, seperti yang dikemukakan oleh Diamond dan Morlino (2005), demokrasi yang sehat membutuhkan accountability tidak hanya secara vertikal oleh pemilih, tetapi juga secara horizontal oleh masyarakat sipil.

C. Rekomendasi untuk Pemerintah, KPU, dan Masyarakat Sipil

1. Peran Strategis Pemerintah dan KPU dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Demokratis

Untuk mendorong partisipasi pemilu yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, rekomendasi utama ditujukan kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan dan KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis pemilu. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun kerangka kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitatif partisipasi, melainkan juga pada kualitas keterlibatan warga negara. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan menetapkan program strategis nasional yang menyinergikan antara pendidikan politik, penguatan demokrasi digital, dan pemberantasan praktik politik transaksional.

Salah satu bentuk kebijakan yang perlu didorong adalah peningkatan alokasi anggaran untuk program literasi pemilu dan pendidikan kewarganegaraan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal berbasis masyarakat. Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik sangat bergantung pada sumber daya politik yang dimiliki individu, termasuk pengetahuan, motivasi, dan waktu. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus diarahkan untuk memperkecil kesenjangan akses terhadap pendidikan politik, terutama di daerah tertinggal dan kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

KPU harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan sistem informasi kepemiluan berbasis digital yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Portal rekapitulasi suara, laporan dana kampanye, dan daftar calon tetap harus dikemas dalam format yang informatif, mudah dipahami, dan ramah pengguna. Hal ini

penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, sebagaimana ditegaskan oleh Norris (2014) yang menyatakan bahwa integritas pemilu sangat berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi warga.

KPU juga harus meningkatkan efektivitas pendidikan pemilih, terutama dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi. Program relawan demokrasi, sosialisasi tatap muka, hingga kampanye melalui media sosial harus terus diperluas dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Dalam konteks pemilih muda, perlu dikembangkan konten-konten kreatif yang menarik, seperti video explainers, infografik, podcast politik, dan permainan edukatif yang disesuaikan dengan gaya komunikasi generasi digital. Penelitian Wardani (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih muda sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional terhadap isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta cara penyampaian pesan politik yang tidak kaku.

Pemerintah dan KPU perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik curang seperti politik uang, manipulasi suara, dan tekanan terhadap pemilih. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi bersama Bawaslu, aparat penegak hukum, dan lembaga antikorupsi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar menciptakan efek jera, sekaligus menunjukkan komitmen negara terhadap keadilan elektoral. Sebagaimana diungkapkan oleh Diamond dan Morlino (2005), keadilan elektoral merupakan fondasi dari legitimasi demokrasi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses perundang-undangan terkait pemilu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan pemilu akan memperkuat legitimasi aturan dan mencegah dominasi kepentingan elite politik. Dalam jangka panjang, langkah ini akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap proses demokrasi dan memperkuat partisipasi aktif dalam setiap siklus elektoral.

2. Penguatan Kapasitas dan Keterlibatan Masyarakat Sipil sebagai Pilar Demokrasi

Peran masyarakat sipil sangat strategis dalam membangun partisipasi politik yang sehat dan berdaya guna. Oleh karena itu, rekomendasi berikutnya ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga swadaya masyarakat, media independen, dan komunitas akar rumput sebagai kekuatan penyeimbang dan katalisator partisipasi publik. Masyarakat sipil perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam melakukan pendidikan politik dan pemantauan pemilu. Keberadaan komunitas-komunitas yang fokus pada isu demokrasi, seperti Perludem, Netgrit, JPPR, dan lembaga riset lainnya harus didukung dan difasilitasi, baik oleh donor, negara, maupun kolaborasi publik-swasta. OMS harus berperan sebagai jembatan antara warga dan pembuat kebijakan, termasuk dalam mengadvokasi kepentingan kelompok rentan, menyuarakan temuan lapangan, serta memberikan masukan berbasis data kepada penyelenggara pemilu.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu juga sangat penting untuk menjamin independensi dan keadilan proses elektoral. Pemantau independen dapat memberikan informasi dan data alternatif yang berguna untuk mendeteksi kecurangan, intimidasi, atau ketimpangan distribusi logistik pemilu. Studi oleh López-Pintor (2000) menekankan bahwa pemantauan sipil adalah elemen vital dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu dan memperbaiki kelemahan institusional dalam jangka panjang.

Masyarakat sipil juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi dan mobilisasi politik. Platform digital seperti situs edukatif, media sosial, live polling, dan diskusi daring dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun, dalam konteks maraknya disinformasi, organisasi sipil juga dituntut untuk menjadi penjaga ruang informasi publik melalui fact-checking, kampanye anti-hoaks, dan edukasi literasi digital. Hal ini sesuai dengan temuan Wardle dan Derakhshan (2017), yang menyatakan bahwa masyarakat sipil harus menjadi aktor utama dalam membangun ketahanan informasi di tengah tantangan demokrasi digital.

Untuk mendukung efektivitas peran masyarakat sipil, dibutuhkan regulasi yang ramah terhadap kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan berserikat. Negara harus menjamin bahwa aktivitas pengawasan dan advokasi politik oleh masyarakat tidak dikriminalisasi atau dibatasi

secara berlebihan. Ruang sipil yang terbuka adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, penting pula bagi masyarakat sipil untuk menjaga independensi, akuntabilitas internal, dan profesionalisme agar tidak mudah disusupi oleh kepentingan partisan atau elite tertentu.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memperluas dampak gerakan masyarakat sipil. Sinergi antara OMS, perguruan tinggi, media independen, dan sektor swasta dalam kampanye kesadaran politik perlu dikembangkan secara lebih sistematis. Inisiatif bersama seperti "Koalisi Demokrasi Digital," forum dialog lintas agama tentang politik etik, dan pelatihan calon pemimpin muda dari kalangan marjinal harus didorong sebagai upaya kolektif membangun demokrasi dari bawah. Seperti disampaikan oleh Fung dan Wright (2003), demokrasi partisipatoris yang ideal hanya dapat tumbuh melalui kerja sama horizontal antara warga negara yang terorganisasi dan negara yang responsif.

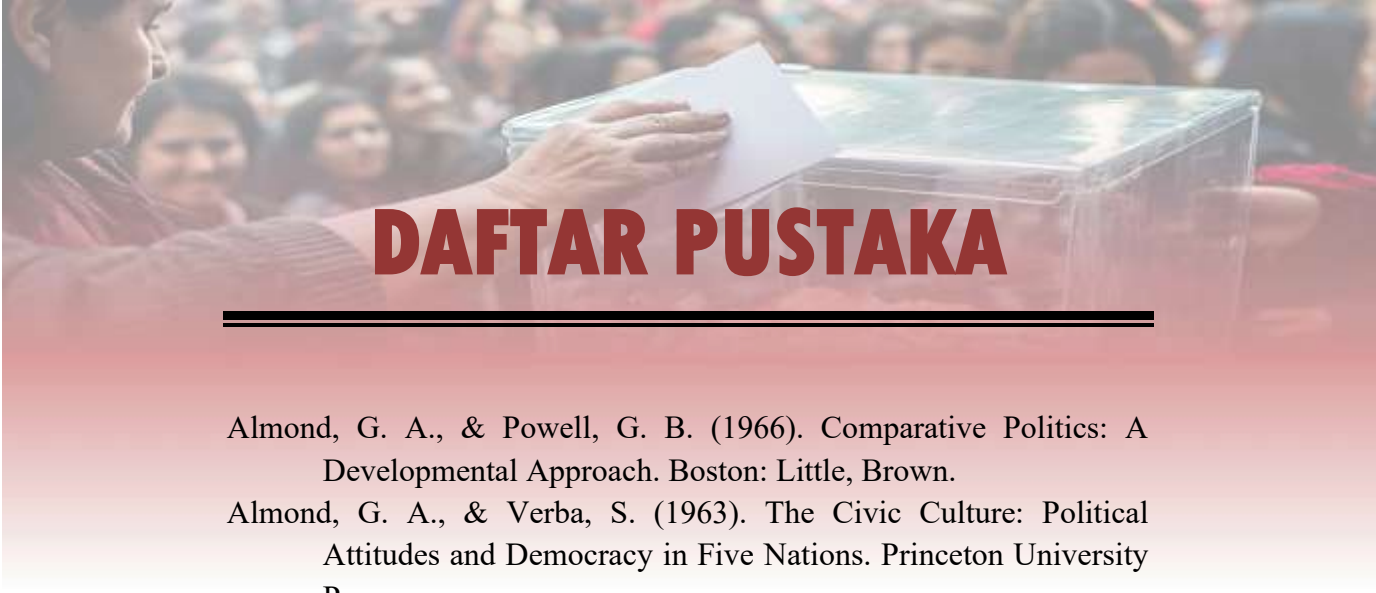

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown.

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.

Aspinal, E., & Fealy, G. (2003). Local Power and Politics in Indonesia: Democratisation and Decentralisation. Institute of Southeast Asian Studies.

Aspinall, E. (2005). Opposition and Regime in Indonesia. Routledge.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. Singapore: NUS Press.

Bawaslu. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu 2020: Perspektif Daerah. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. Cambridge University Press.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information, Communication & Society, 18(5), 524-538.

Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2018). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Computational Propaganda Research Project.

Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. American Political Science Review.

Buckingham, D. (2013). Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press.

Buehler, M. (2016). Democratization in Post-Suharto Indonesia. Routledge.

Buehler, M. (2016). Indonesia's Democratic Transition: The Dynamics of Electoral Politics and Political Reform. Journal of Contemporary Asia, 46(4), 580-598.

Chadwick, A. (2013). The Hybrid Media System: Politics and Power. Oxford University Press.

CSIS. (2022). Laporan Persepsi Politik Generasi Muda Indonesia. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

CSIS. (2022). Laporan Survei Nasional: Generasi Muda dan Partisipasi Politik di Indonesia. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

CSIS. (2022). Survei Nasional: Persepsi Politik Anak Muda. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Dahl, R. A. (2000). On Democracy. Yale University Press.

Dalton, R. J. (2008). Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. CQ Press.

Dalton, R. J. (2013). The Apartisan American: Dealignment and Changing Electoral Politics. CQ Press.

Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Assessing the Quality of Democracy. Johns Hopkins University Press.

Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Methuen.

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. Wiley.

EIU. (2023). Democracy Index 2023. The Economist Intelligence Unit.

Fitriani, E. (2020). Bawaslu dan Penguatan Demokrasi Substansial. Jurnal Politik, 6(2), 123–140.

Fox, J. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?. World Development, 72, 346-361.

Freedom House. (2022). Freedom in the World Report. https://freedomhouse.org

Freedom House. (2023). Freedom in the World Report.

Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance. Verso.

Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. Science Advances, 5(1), eaau4586.

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.

Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford University Press.

Hadiz, V. R. (2014). Indonesian Politics and the Neo-Authoritarian Turn. Critical Asian Studies, 46(4), 553-567.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). Neoliberal Reforms and Illiberal Democracies in Indonesia. Journal of Development Studies, 49(3), 1-20.

Hague, R., & Harrop, M. (2010). Comparative Government and Politics: An Introduction. Palgrave Macmillan.

Hamayotsu, K. (2011). Party clientelism in Indonesia: Electoral strategies of Muslim parties. Journal of Southeast Asian Studies, 42(2), 241–261.

Haryanto, B. (2017). Politik Golput di Indonesia: Fenomena dan Faktor Penyebab. Jurnal Ilmu Politik, 4(2), 115-130.

Heryanto, A. (2011). Democracy in Indonesia: From Transition to Consolidation? Southeast Asian Affairs.

Hidayat, R. (2020). Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Generasi Milenial. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hidayat, T. (2019). Dinamika Polarisasi Politik dan Implikasinya bagi Demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(2), 157-176.

Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2018). Voter Turnout Database.

IFES. (2020). Electoral Integrity Guidelines.

Indonesian Corruption Watch. (2020). Laporan Tahunan Politik Uang di Indonesia. Jakarta: ICW.

International IDEA. (2021). Global State of Democracy Report. https://idea.int

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2009). Data Partisipasi Pemilu Presiden 2009.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2014). Laporan Resmi Pemilu Presiden 2014.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). Rekapitulasi Partisipasi Pemilu 2019.

KPU. (2019). Laporan Nasional Partisipasi Pemilu 2019. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kurlantzick, J. (2017). Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government. Yale University Press.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2018). Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Demokrasi di Indonesia.

Lembaga Survei Indonesia. (2020). Literasi Politik Masyarakat Indonesia. Jakarta: LSI.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

Liddle, R. W. (1999). Indonesia's Democratic Transition: Between Success and Failure. Asian Survey, 39(2), 240-252.

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. Comparative Political Studies, 40(7), 832-857.

Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

Lim, M. (2017). Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Political Participation in Southeast Asia. Routledge.

Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427.

Lincoln, A. (1863). Gettysburg Address.

Lipset, S. M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics.

Loader, B. D., & Mercea, D. (2012). Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics. Routledge.

López-Pintor, R. (2000). Electoral Management Bodies as Institutions of Governance. United Nations Development Programme.

LSI. (2022). Survei Nasional Perilaku Pemilih Pemilu 2024. Lembaga Survei Indonesia.

MacKinnon, R. (2012). Consent of the Networked: The Worldwide Struggle for Internet Freedom. Basic Books.

Mafindo. (2020). Laporan Hoaks Pemilu 2019 di Media Sosial. Jakarta: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of Contention. Cambridge University Press.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.

McQuail, D. (2010). McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.). Sage Publications.

Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action. Palgrave Macmillan.

Mietzner, M. (2007). Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption. Contemporary Southeast Asia, 29(2), 238–263.

Mietzner, M. (2009). Political Conflict and Democratization in Indonesia: Structural Constraints and Strategic Challenges. Institute of Southeast Asian Studies.

Mietzner, M. (2012). Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society. Democratization, 19(2), 209–229.

Mietzner, M. (2013). Indonesia's Democratic Decline: A Reassessment. Journal of Democracy, 24(4), 119-132.

Mietzner, M. (2013). Indonesia's 2014 Elections: Democracy, Elites, and the Limits of Electoral Politics. Contemporary Southeast Asia, 35(2), 180-205.

Mietzner, M. (2013). Indonesia's Democratic Decline: A Reassessment. Journal of Democracy, 24(4), 119-132.

Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 Presidential Election: Democracy and Political Contestation. Journal of Democracy, 25(4), 56-70.

Mietzner, M. (2019). Authoritarian Innovations in Indonesia: Restricting Democracy, Regulating Religion. Democratization, 26(2), 257–275.

Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy. American Behavioral Scientist, 57(11), 1611-1622.

Milbrath, L. W. (1965). Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics? Chicago: Rand McNally.

Mishler, W., & Rose, R. (2001). What Are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30-62.

Muhtadi, B. (2016). Political Oligarchy and Democracy in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 46(2), 301-320.
Muhtadi, B. (2017). Indonesia's Democracy and Its Discontents: The Impact of Political Polarization. Asian Journal of Political Science, 25(3), 327-346.
Muhtadi, B. (2019). Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery. Singapore: Springer.
Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge University Press.
Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.
Norris, P., & Inglehart, R. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press.
OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust. OECD Publishing.
Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press.
Pratama, A. (2020). Media Sosial dan Disinformasi Politik di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 14(1), 45-60.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Palgrave Macmillan.
Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.
Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). Mobilization, Participation, and Democracy in America. Macmillan.
Saragih, B. (2017). Variasi Partisipasi Politik di Indonesia: Studi Komparatif Antar Daerah. Jurnal Politik Indonesia.
Schaffer, F. C. (2007). Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Lynne Rienner Publishers.
Schedler, A. (2002). The Menu of Manipulation. Journal of Democracy, 13(2), 36-50.
Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.

Sen, K., & Hill, D. T. (2006). Media, Culture and Politics in Indonesia. Equinox Publishing.

Shoemaker, P. J., & Vos, T. P. (2009). Gatekeeping Theory. Routledge.

Sihombing, J. (2020). Polarisasi Politik dan Implikasinya bagi Demokrasi di Indonesia. Media Politik, 9(1), 25-39.

Stolle, D., Hooghe, M., & Micheletti, M. (2005). Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a Form of Political Participation. International Political Science Review.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications.

Sulastri, D., & Haryanto, S. (2021). Disinformasi dan Polarisasi Politik di Era Digital. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(2), 210-225.

Sunstein, C. R. (2017). Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.

Susanti, N. (2022). Strategi Literasi Digital untuk Melawan Disinformasi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi, 18(1), 90-105.

Tapsell, R. (2007). Communicating Politics in Indonesia: The Role of Radio. Journal of Contemporary Asia, 37(3), 335-350.

Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.

The Economist Intelligence Unit. (2022). Democracy Index Report. https://www.eiu.com

The Economist Intelligence Unit. (2023). Democracy Index.

Tomsa, D. (2008). Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era. Routledge.

Törnquist, O. (2000). Politics and Change in the Third World. Zed Books.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index.

Tufekci, Z. (2017). Twitter (X) and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale University Press.

Ufen, A. (2018). Party Institutionalization and Policy Making in Indonesia: Between Consolidation and Crisis. South East Asia Research, 26(1), 5–22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UNDP. (2023). Human Development Report.

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. New Media & Society, 21(2), 354-375.

Verba, S., & Nie, N. H. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equality. University of Chicago Press.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.

Wardani, R. Y. (2020). "Peran Literasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Era Digital." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 1–15.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe Report.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe Report.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

World Justice Project. (2023). Rule of Law Index.

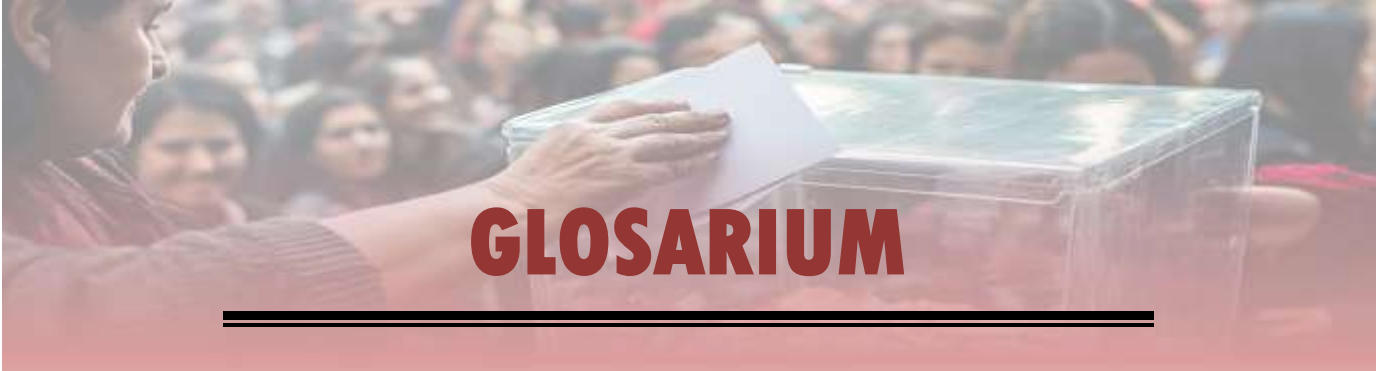

GLOSARIUM

Aspirasi	Harapan, keinginan, atau tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada para pemimpin atau wakil rakyat agar dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan politik.
Demokrasi	Sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih.
Golput	Sikap politik warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik.
Hak	Kemampuan atau kewenangan yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses politik, termasuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
Kampanye	Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon atau partai politik untuk meyakinkan pemilih agar memilih dalam pemilu melalui berbagai media dan metode komunikasi.
Keterwakilan	Prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya semua kelompok dalam masyarakat memiliki perwakilan yang adil dalam lembaga-lembaga politik.
KPU	Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan, mengatur, dan mengawasi seluruh tahapan pemilu di Indonesia secara adil dan transparan.
Legitimasi	Pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah atau hasil pemilu sebagai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Partisipasi	Keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai tahapan proses politik, baik dalam bentuk

	pemungutan suara, diskusi publik, kampanye, maupun pengawasan jalannya pemerintahan.
Pemilu	Proses demokratis yang diselenggarakan secara periodik untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui pemberian suara oleh warga negara yang memenuhi syarat.
Pluralisme	Keberagaman dalam masyarakat yang mencakup perbedaan etnis, agama, budaya, dan pandangan politik yang harus diakomodasi dalam sistem demokrasi.
Polarisasi	Pembelahan tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan politik yang dapat mengganggu stabilitas dan kohesi sosial dalam demokrasi.
Suara	Pilihan resmi yang diberikan oleh pemilih terhadap calon atau partai politik dalam pemilu, yang dihitung untuk menentukan hasil akhir pemilihan.
TPS	Tempat Pemungutan Suara, yaitu lokasi resmi yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian suara oleh pemilih dalam suatu pemilu.
Wajib	Kewajiban moral atau hukum yang mengharuskan warga negara untuk menjalankan peran politiknya, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu.

INDEKS

A

akademik · 10
aksesibilitas · 138, 139
audit · 126

D

digitalisasi · 7
disparitas · 7, 56, 71, 79, 108
distribusi · 27, 56, 74, 79, 119, 131, 148
domestik · 56

E

ekonomi · 3, 5, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 26, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 71, 78, 79, 80, 93, 94, 95, 98, 108, 110, 139, 141, 142, 143
ekspansi · 14
empiris · 5, 6, 8, 11, 59, 116, 122, 141, 165
entitas · 84
etnis · 2, 4, 23, 27, 38, 56, 81, 97, 104, 119, 160

F

finansial · 3, 95, 128
fleksibilitas · 74
fluktuasi · 6, 43, 44, 45, 52, 54, 58, 84, 142
fundamental · 17, 37, 65

G

geografis · 4, 56, 70, 106, 142
globalisasi · 93

H

hoaks · 7, 15, 16, 19, 51, 54, 58, 67, 68, 71, 76, 77, 90, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 114, 117, 119, 143, 148

I

implikasi · 110, 116, 143
inflasi · 79
infrastruktur · 4, 55, 79, 80, 108, 139
inklusif · 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 29, 37, 42, 45, 47, 49, 55, 58, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 91, 93, 95, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 117, 121, 122, 123, 124, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147

inovatif · 70
integrasi · 14, 60, 74
integritas · 3, 26, 37, 39, 43, 62, 69, 73, 76, 77, 81, 89, 90, 94, 107, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 143, 144, 146
interaktif · 63, 68, 73, 74, 77, 106, 121, 122, 135, 136
investasi · 80

K

kolaborasi · 56, 71, 123, 148
komparatif · 6, 11
komprehensif · 10, 12, 22, 45, 48, 61, 87, 116, 119, 120, 123, 125, 129, 131, 134, 137
konkret · 3, 21, 46, 103
konsistensi · 39, 129, 130

L

Leadership · 154

M

manifestasi · 40
manipulasi · 3, 21, 24, 27, 35, 36, 39, 42, 52, 53, 58, 62, 64, 66, 69, 72, 78, 80, 93, 113, 114, 117, 118, 121, 145, 147

O

otoritas · 146

P

Persepsi · 152
politik · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 159, 160, 165

R

rasional · 7, 22, 23, 28, 66, 83, 97, 98, 99, 110, 113, 114, 118, 120
real-time · 20, 68, 126, 145
regulasi · 7, 14, 16, 29, 63, 94, 101, 111, 118, 120, 126, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 144, 145, 148
Representasi · 137

S

siber · 21, 109, 126, 145
stabilitas · 25, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 47, 64, 66, 84, 85, 90, 93, 96, 98, 104, 105, 119, 160

T

teoretis · 6
transformasi · 4, 7, 31, 37, 39, 62, 68, 74, 93, 106, 124, 127, 135, 136, 144
transparansi · 18, 24, 25, 26, 35, 39, 43, 47, 49, 53, 57, 58, 61, 62, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 102, 105, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 145, 146

U

universal · 23

W

workshop · 123

BIOGRAFI PENULIS

Trasmianto, S.H.
(Tras)

Lahir di Kapuas, 1 Februari 1983, biasa dipanggil *Tras* dan dikenal aktif sebagai Penggiat Pemilu dan Demokrasi sejak masih dibangku kuliah melalui Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lulus S1 di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada Tahun 2006, Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 Menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya kemudian pada periode kedua-nya sebagai Komisioner *Tras* menjabat sebagai ketua divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai penyelenggara Pemilu, *Tras* dikenal mampu merawat interaksi sosial di kalangan peserta Pemilu, Pemerintah dan Pemilih sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam menjaga dan menumbuhkan partisipasi pemilih baik pada saat Pemilu maupun pasca Pemilu untuk mewujudkan Pendidikan politik yang inklusif, partisipatif dan berkelanjutan

Buku Referensi

INDEKS PARTISIPASI PEMILU

DAN TANTANGAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Buku referensi "Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia" membahas analisis mendalam mengenai dinamika partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, serta bagaimana fenomena tersebut mencerminkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui pendekatan empiris dan konseptual, buku referensi ini menyusun sebuah indeks partisipasi yang tidak hanya mengukur tingkat kehadiran di TPS, tetapi juga mencakup aspek kesadaran politik, keterlibatan warga dalam kampanye, kepekaan terhadap isu sosial dan kebijakan pemerintah serta kepercayaan terhadap institusi Pemilu. Di samping itu, buku referensi ini membahas berbagai tantangan yang mengemuka dalam praktik demokrasi kontemporer, seperti apatisme politik, disinformasi digital, politik uang, hingga polarisasi sosial.

Tidak hanya memberikan gambaran praktis dalam memahami partisipasi pemilu, buku referensi ini juga menciptakan gagasan baru dalam menumbuhkan partisipasi pemilih dan kohesi sosial pasca penetapan calon terpilih oleh KPU sehingga mampu memberikan gambaran strategis bagi Masyarakat, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pemerintah dalam merawat interaksi sosial berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dengan memadukan data, kajian teoritis, dan refleksi kritis, buku referensi ini bertujuan memberikan gambaran utuh tentang kondisi demokrasi Indonesia hari ini dan arah perbaikannya ke depan sebagai upaya untuk mewujudkan budaya politik inklusif dan partisipatif.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA
mediapenerbitindonesia.com
+6281362150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn
ISBN 978-634-7305-52-7
9 786347 305527